DAKWAH POLITIK BUPATI BOJONEGORO SUYOTO

TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister dalam Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh
Muhammad Faizin
NIM. F02716160

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Faizin

Nim : F02716160

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2018
Saya yang menyatakan

Muhammad Faizin

PERSETUJUAN

Tesis Muhammad Faizin ini telah disetujui Pada tanggal 28 Juni 2018

Oleh
Pembimbing

Dr. Moch. Choirul Arif, M. Fil. I
NIP. 197110171998031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Muhammad Faizin ini telah diuji
Pada tanggal 20 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Dr. Abdul Muhid, M. Si (Ketua/Penguji) .....
2. Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M. Ag (Penguji Utama) .....
3. Dr. Moch. Choirul Arif, M. Fil. I (Pembimbing/Penguji) .....

Surabaya, 20 Juli 2018
Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: **Muhammad Faizin**
NIM	: **F02716160**
Fakultas/Jurusan	: **Pascasarjana/Komunikasi dan Penyiaran Islam**
E-mail address	: **faizinmuhammad94@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

DAKWAH POLITIK BUPATI BOJONEGORO SUYOTO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Agustus 2018

Penulis

(Muhammad Faizin)

ABSTRAK

Faizin, Muhammad : F02716160
Dakwah Politik Bupati Bojonegoro Suyoto

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana dakwah politik Bupati Bojonegoro Suyoto dalam membangun birokrasi pemerintah yang bersih dan baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap informan. Informasi yang diperoleh dari informan utama kemudian dikonfirmasi ulang dengan informan pendukung sehingga didapatkan data antar subjektivitas untuk memastikan keabsahan data.

Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann. Menurutnya, konstruksi sosial terhadap realitas dapat terjadi melalui tiga proses simultan, yaitu: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Hasil penelitian menemukan bahwa; 1) Dakwah politik Suyoto menekankan pada penanaman unsur *value,* nilai, budaya dan keagamaan secara substansial. Pelatihan "Jalan Sukses Al-Fatihah" salah satu cara inovatif dan kreatif Suyoto sebagai solusi masalah birokrat,seperti memiliki *mindset*, sifat dan karakter yang salah. Selain itu, Suyoto menagadakan varian kegiatan, seperti dialog publik, pengajian kebangsaan, dan berbagai kegiatan di ruang birokrasi. Semua kegiatan tersebut hakekatnya ialah sebagai instrumen Suyoto dalam mentranformasikan segala bentuk pengalaman subjektifnya. Ketokohan Suyoto sebagai Bupati yang patut diteladani menjadi faktor penting dalam sukses tidaknya berbagai upaya tersebut. 2) Nilai kandungan "Jalan Sukses Al-Fatihah", ilmu, dan pengalaman Suyoto yang diajarkan kepada birokrat dilegitimasi bersama sebagai nilai objektif yang rasional dan bertujuan. 3) "Jalan Sukses Al-Fatihah" menjadi salah satu sistem refleksi diri yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Tentunya, hal itu berdampak langsung terhadap terciptanya birokrasi yang bersih dan baik.

Keyword: **Dakwah Politik, Suyoto, Bupati Bojonegoro**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSTUJUAN PUBLIKASI v
PEDOMAN TRANSLITERASI vi
MOTTO vii
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
BAB I :PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 15
C. Tujuan Penelitian 17
D. Manfaat Penelitian 17
E. Penelitian Terdahulu 18
F. Kerangka Teoretik 21
G. Penelitian Terdahulu 26
H. Metode Penelitian 30
I. Sistematika Pembahasan 38

BAB II : KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Dakwah Politik 40
1. Urgensi Dakwah Politik 40
2. Sinergitas Politik dan Dakwah 46
B. Komunikasi Politik 49
1. Komunikator Politik 49
2. Strategi Komunikasi Politik 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Birokrasi Pemerintahan 62
1. Kinerja dan Pelayanan Birokrasi Pemerintah 62
2. *Good Governance* Sebagai Tujuan Reformasi Birokras ... 69
D. Teori Konstruksi Sosial: Memahami Dakwah Politik Suyoto . 72

BAB III : DAKWAH POLITIK SUYOTO
A. Bojonegoro: Lokasi Dakwah Politik Suyoto 80
1. Profil Bojonegoro 80
2. Geografis 85
3. Demografis 88
4. Postur Aparatur Pemerintah (PNS) 90
5. Profil DPRD dan Legislatif 94
6. Profil Suyoto 95
7. Bojonegoro Dimata Suyoto 100
B. PENDEKATAN DAKWAH POLITIK SUYOTO 104
1. Awal Mulai Belajar Dakwah Politik 107
2. Suyoto dalam Melayani Masyarakat 111
3. Menanamkan Unsur *Value* Terhadap Para Birokrat 114
4. Merubah *Mindset* Para Birokrat 143
5. Mewujudkan Budaya Keterbukaan 115
6. Mengadakan Pengajian Kebangsaan 117
7. Membangun Karakter Para Birokrat Berbasis Jalan Sukses Al-Fatihah 118

BAB IV : MEMAHAMI KONSTRUKSI SOSIAL DAKWAH POLITIK SUYOTO
A. Konstruksi Dakwah Politik Suyoto: Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi 149
1. Esternalisasi: Momen Adaptasi Diri..... 149
2. Objektivasi: Momen Interaksi Diri dengan Dunia Sosio-Kultural 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Internalisasi: Momen Identifikasi Diri dalam Dunia Sosio-Kultural 157
B. Prinsip-prinsip Dakwah Politik Suyoto: Unsur *Value* Sebagai Subjek, Objek, dan Subjek-Objek..... 164
1. Prinsip Adaptif 164
2. Prinsip Transparansi 165
3. Prinsip Solutif 166
4. Prinsip Visionaris 166

BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan..... 168
B. Saran dan Rekomendasi 169

DAFTAR PUSTAKA 172

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan fungsional antara dakwah dan politik sering tidak dimengerti oleh kaum Muslimin sehingga banyak yang menganggap bahwa kegiatan politik berdiri sendiri, terpisah sama sekali dengan dakwah. Bahkan dalam masyarakat ada kesan kurang positif terhadap kegiatan politik, seolah-olah politik mengandung kelicikan, penghianatan, penipuan, dan berbagai konotasi buruk lainnya.[1]Padahal dakwah politik mengandung dua bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dan sinergi yang baik antara keduanya adalah keniscayaan solusi bagi setiap usaha memperbaiki keadaan umat. Maka dalam konteks dakwah politik seorang da'i atau mad'u dapat masuk dalam jalur politik melalui institusi negara atau partai politik dengan memanfaatkan struktur, jabatan, kepangkatan sebagai instrumen dakwah.

Membincang dakwah politik seperti dikatakan Ali Maschan Moesa,[2] sama dengan membahas antara agama dan politik. Akan selalu ada tiga pilihan jika menyandingkan antara keduanya. Tiga pilihan yang dimaksud itu adalah *pertama,* sangat dekat atau integrated. *Kedua,* simbiotik, dalam artian, antara agama dengan politik itu ada hubungan, namun tidak boleh terlalu dekat. Jadi, antara agama dan politik ada jarak. Sedangkan model yang *ketiga* adalah sekuler, yakni memisahkan sama sekali antara agama dan politik.[3]

---

[1] Syamsul Bachhri Day, "Hubungan Politik dan Dakwah", *Mediator*, (Juni 2005), Vol. 6, No. 1, 7.
[2] Ali Maschan Moesa, "Kiai Berpolitik Tidak dilarang*, Aula*" (Maret 2007), 32-33.
[3]Yang sering digunakan selama ini adalah kategori kedua, yakni simbiotik. Dalam artian agama butuh negara. Jadi, garisnya saling membutuhkan. Namun yang perlu diperhatikan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal senada dikatakan oleh Al-Qaradawi yang sangat tegas menjelaskan bahawa tidak ada pemisahan antara agama (dakwah) dan politik. Ini kerana menjauhkan politik daripada agama adalah sama dengan menjauhkan politik daripada unsur-unsur pembentuk kebaikan dan penolak kejahatan, menjauhkan daripada pendorong kebaikan dan ketaqwaan, serta membiarkan politik penuh dengan dosa dan permusuhan.[4] Selanjutnya, Al-Qaradawi mengutip pendapat Shaykh Muhammad al-Khidr Husayn[5] yang mengatakan bahawa Islam adalah sebuah agama yang mengajarkan kepada umatnya tentang keseluruhan aspek termasuklah dasar-dasar hukum dan norma-norma dalam politik.

Hubungan agama (dakwah) dan politik jika ditarik dalam konteks pemerintahan Indonesia senantiasa menarik untuk dibicarakan. Salah satu asumsinya adalah, bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga sebenarnya Islam mempunyai power[6] yang cukup besar untuk

---

menghindari kecenderungan yang terlalu dekat. Karena inti dari politik itu kekuasaan, yang sifatnya terbatas dan cenderung terjadi konflik yang kompleks.

[4] Yusuf al-Qaradawi, *al-Din wa al-Siyasah : Ta'silu wa Raddu Shubuhat* (Qaherah : Darul Shuruq, 2007), 82. Dalam sejarah juga diceritakan, bahwa Nabi Yusuf pernah terlibat dalam pemerintahan dan menjadi Menteri Perbendaharaan Negara,. Lihat, Syarifudin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 125.

[5] Shaykh Muhammad al-Khidr Husayn merupakan seorang ulama besar dan beliau juga salah seorang syeikh al-Azhar. Beliau juga antara salah seorang ulama yang menentang keras golongan yang berpendapat tidak ada politik dalam agama dan memisahkan agama daripada politik. Melalui bukunya yang berjudul *Rasa'il al-Islah,* beliau secara terperinci menjelaskan tentang agama dan politik serta lantang mengkritik dalam menafikan pendapat-pendapat yang memisahkan agama dan politik. Bahkan al-Khidr telah menggunakan istilah kesesatan *(dalalah)* bagi yang mengungkapkan tindakan memisahkan agama daripada politik. Tindakan memisahkan agama dan politik juga berlawanan dengan apa yang dibawa oleh Islam. Ini kerana al-Khidr menyatakan bahwa terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahawa al-Quran sangat mempraktikkan urusan muamalah dan mengandungi petunjuk politik bagi pemerintah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-Ma'idah, ayat : 50.

[6]*Pow*er yang dimaksudkan di sini adalah *power* dalam artian positif, sebab kalau kita bicara *power*, gambaran orang seakan-akan sedang menyusun kekuatan. Kekuatan fisik bukan mengarah ke sana. Selama ini potensi umat Islam belum terorganisasi secara baik. Karena itu, kita menginginkan jama'ah yang nonsektoral. Kita mau mencoba mencari terobosan yang jamaahnya *kafah,* universal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk ke dalam segala sistem yang ada pada kekuasaan. Akan tetapi pada kenyataannya, justru terjadi pasang surut dalam perjalanannya, khusnya di era Orde Baru,[7] di era tersebut, Islam dalam posisi yang tidak menguntungkan, terpinggirkan dan dijauhkan diri dari peran-peran di kelembagaan negara.[8]

Jatuhnya pemerintah Orde Baru dan munculnya era reformasi, yang mendukung demokrasi secara substantif, tidak membatasi politik rakyat, melainkan mengarahkan agar aspirasi mereka bisa tersalurkan dengan optimal melalui fungsionalisasi dalam melakukan praktek komunikasi politik.[9] Selain itu pemerintah memberikan kebebasan warga untuk bersosialisasi sebagai bagian dari partisipasi politik, termasuk membawa misi dakwah dalam kancah politik untuk menjadikan pemerintahan yang bersih sesuai tuntunan agama. Tentu hal tersebut dapat meningkatkan kerukunan dan kedamain dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah. Bahkan hal ini

---

Jadi bagaimana kita bisa *program minded* , bukan *organisation minded*. Karena itu, jika mereka di NU, jangan lantas fanatik dengan NU-nya, begitu juga dengan yang di Muhammadiyah. Setiap sektor tentu mempunyai misi sendiri-sendiri, itu kita biarkan saja. Namun ketika mencuat ke permukaan kita satu warna. Lihat, Zainuddin MZ, *Dakwah dan Politik "Da'i Berjuta Umat",* (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), 198.

[7] Pada masa Orde Baru Kata M. Natsir, Islam diperlakukan seperti anjing kurap. Aktivitas dakwah baik di partai, majlis-majlis ta'lim, khutbah jum'at, dan aktivitas lainnya mendapatkan pengontrolan yang ketat. Bahkan tidak jarang Da'I yang masuk penjara karena melakukan kritik terhadap penguasa. Puncak pemerintah yang tidak bersahabat dengan umat Islam terjadi pada peristiwa Tanjung Priuk. Banyak Da'i dan umatb Islam yang menjadi korban keganasan dari penguasa orde baru. Lihat, Abdul Basit, *Wacana Dakwah Kontempoprer*, (Yogyakarta: STAIN Purwokerto Press & Pustaka Pelajar, 2005), 125. Namun ketika semi penguasa Orde Baru yang mulai akomodatif dengan Islam pada tahun 1990-an. Soeharto berangkat naik haji. Mulailah apa yang disebut ijo royo-royo tampil dalam kancah birokrasi. Saat ini penguasa Orde Baru merangkul kembali Islam yang sempat dipinggirkan. Selengkapnya lihat, Kurdi Mustofa, *Dakwah di Balik Kekuasaan*, (Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2012), 66.

[8] Usamah Hisyam, *Sepanjang Jalan Dakwah Tifatul Sembiring*, (Jakarta: Dharmapena Citra Media, 2012) cetakan pertama, 245.

[9] Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama dan Negara dalam onteks Modernisasi Politik di Era Reformasi", *Ahkam*, V. XIII, No 2, (Jakarta: Juli 2013), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dianggap sebagai bentuk jihad dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* melalui jalur politik.[10]

Pasca masa Orde Baru atau di masa Reformasi,[11] pembaharuan tata politik nasional dalam suasana transisi menuju demokrasi dinilai sukses merestrukturisasi kepemimpinan nasional dan lokal secara demokratis, menghasilkan sejumlah pembaruan konstitusi dan tata hukum turunannya, mendesentralisasi kekuasaan dan lain sebagainya. Namun, meski harus tetap diakui ada beberapa capaian positifnya, perubahan-perubahan itu masih lebih bersifat prosedural, sedikit sekali atau bahkan sama sekali tidak membawa perubahan yang lebih substansial. Tatanan politik lama masih menjadi corak pekat kehidupan politik kini. Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih mewarnai berbagai lembaga yang menjadi tulang punggung penataan format kenegaraan Indonesia. Lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif masih diwarnai oleh segunung penyakit kronis yang memberi efek buruk dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Kesalahan mendasar bagi para politisi dalam kiprahnya adalah menempatkan politik sebagai tujuan, kemudian demi mencapai tujuan menghalalkan segala cara.[12] Mereka bekerja dalam tatanan pola hierarki

---

[10] Ismail Suny, *Menegakkan Prinsip Konstitusi,* dalam Denny J.A. (e.d.), *Menegakkan Demokrasi* (Jakarta: Kelompok Studi Indonesia), 52.

[11] Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk dan prilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman baik karena tidak efisien, tidak bersih, tidak demokratis dan lain-lain. Lihat, Rumzi Samin, "Reformasi Birokrasi", *Jurnal FISIP UMRAH*, V. 2, No. 2, (2011), 172. Karena, dalam konteks dakwah politik orde baru, umat Islam telah merasakan berbagai pengalaman tentang bagaimana sebuah rezim yang berkuasa mempengaruhi pesat dan berkembangnya sebuah gerakan dakwah Lihat, Zalikha, "Dakwah dan Kekuasaan Perspektif Historis", *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 19, No. 28, (Banda Aceh: 2013). 21.

[12] M. Sidi Ritaudin, "Kungkungan Patologi Politik Hancurkan Budaya Luhur Bangsa", *Jurnal TAPIs,* Vol. 8, No. 1, (2012), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai perwujudan dari tingkatan otoritas[13] dan kelompok-kelompok yang membawa kepentingan kuasa modal, yang menginginkan menginginkan keuntungan sebesar-besarnya bagi kelompoknya.[14]Selain itu, kesalahan dalam sistem birokrasi Indonesia khususnya, salah satu sebabnya adalah model birokrasi patrimonial yang dianut oleh Indonesia yang begitu mengakar kuat ketika pemerintahan Orde Baru berkuasa.[15] Maka Reformasi ini seharusnya dapat mewujudkan pemerintah dengan perubahan dari sistem birokrasi patrimonial menuju sistem birokrasi yang rasional.[16] Namun, tidak bisa dipungkiri pragmatisme politik agaknya sudah merasuk begitu jauh, tidak lagi pada tataran penguasa bahkan telah berkolaborasi dengan rakyat yang dibuktikan dengan adanya *money politic* (transaksional politik).

Dari berbagai kesalahan birokrasi pemerintahan di atas yang muncul, pelibatan agama dalam penguatan etika moral (akhlak) bangsa saat ini sangat dibutuhkan, terutama ketika kondisi akhlak birokrasi bangsa ini masih lemah,

---

[13]Miftah Thoha, *Pembangunan Organisasi, Proses Diagnose dan Intervensi,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 45.

[14]VediR. Hadiz, *Reorganizing Political Power in Indonesia: a Reconsideration of so-called 'Democratic Transitions',* dalam *The Pacific Review*, Vol.16 No. 4, 2003, (London: Routledge), 591-611. Lihat juga Richard Robisonand Vedi R. Hadiz, *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*.

[15] Dalam konteks birokrasi, Weber memberikan penilaian bahwa sistem birokrasi patrimonial, ialah suatu sistem birokrasi dimana jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hirarki birokrasi lebih didasarkan pada hubungan familier, hubungan pribadi dan hubungan 'bapak-anak buah' (*patron client*). Lihat Yahya Muhaimin, *Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia*, Jurnal Prisma No.10 Tahun IX Oktober 1980, hal. 21. Dorojatun Kuntjoro Jakti menyebut birokrasi patrimonial serupa dengan lembaga perkawulaan, dimana patron adalah gusti atau juragan, dan klien adalah kawula. Hubungan anatara gusti-kawula bersifat ikatan pribadi, implisit dianggap mengikat seluruh hidup, seumur hidup, dengan loyalitas primordial sebagai dasar pertalian hubungan. Lihat, Dorojatun Kuntjoro Jakti, Birokrasi di Dunia Ketiga: Alat Rakyat, Alat Penguasa, atau Penguasa, *Jurnal Prisma* No.10, (Oktober 1980), 6.

[16] Martin Albrow, *Birokrasi*,(Yogyakarta:TiaraWacana, 2005), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti kebohongan, korupsi, penipuan, kekerasan dan sebagainya.[17] Menurut pandangan Islam, tanpa pengetahuan yang luas dan kuat yang bertumpu pada ilmu pengetahuan keagamaan yang paling luhur *(ulum al-din)* maka tidak akan ada realisasi etika (akhlak) dalam praktek politik[18]sebut saja misalnya bahwa secara empiris kasat mata prilaku elite politik yang tidak mendidik rakyatnya dengan melakukan politik uang, politik transaksi. Maka di sinilah agaknya relevansi nilai-nilai dakwah Islam dalam politik perlu diterapkan oleh seorang politisi (pemimpin) sebagai *qudwah hasanah* bagi rakyat yang dipimpinnya, meliputi perilaku, moral dan kebaikan, kesabaran, kesederhanaan, keadilan dan lain sebagainya.[19]

Akan tetapi kesulitan-kesulitan dan kerusakan para pelaku birokrasi pemerintahan di atas tidak lekas membuat sosok pejuang dakwah saat ini mengurungkan niatnya untuk mencoba berdakwah dengan keteladanan dalam kaitannya dengan perilaku elite politik saat ini. Sebab latar belakang para elite politik sangat erat dengan tugas-tugas dakwah. Sebelum menjadi elite politik di tanah air, mereka adalah rokoh-tokoh ormas Islam. Gus Dur adalah mantan Ketua Umum PBNU, Amien Rais mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Akbar Tanjung mantan Ketua Umum PM HMI. Masing-asing tokoh orams Islam itu mempunyai komitmen yang kuat dalam mengemban tugas dakwah.

---

[17] Lihat, Harold Chrouch, *political Reform in Indonesia After Soeharto*, (Singapure: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), h. 35; Edward Aspinal and Marcus Mietzner (eds.) *Problem of Democratizations in Indonesia*: Elections, *Institutions, and Society,* (Singapure: ISEAS, 2010), 27.

[18] Abu al-Hasan al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din,* (Mesir : AlMathba'ah al-Amiriyyah, 1375 H/ 1955), 44.

[19] M. Sidi Ritaudin, *Etika Politik Islam,* (Jakarta: Transmisi Media, 2009), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam realitasnya, fenomena kepemimpinan diatas yang memiliki latar belakang sebagai tokoh-tokoh Islam, masih belum secara keseluruhan diterapkan dengan baik di dalam instansi atau organisasi birokrasi, baik dalam pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Problematika mendasar dalam konsep kepemimpinan birokrasi yang ada saat ini adalah komunikasi pemimpin yang lemah terhadap bawahan sebagai pelaksana kebijakan pemimpin serta komitmen dan kompetensi kepemimpinan masih kurang dari harapan.

Lemahnya kualitas dan kompetensi pimpinan birokrasi berdampak terhadap kinerja pegawai dalam pelayanan publik. Sehingga tujuan reformasi birokrasi sulit dicapai dengan baik. Hal ini juga dipengaruhi oleh individu pemimpin dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan masih belum memenuhi tuntutan masyarakat, karena setiap ganti kepemimpinan, maka kebijakan reformasi birokrasi bermula dari awal.

Selain itu, sepanjang sejarah pasca reformasi kepemimpinan birokrasi di Indonesia baik di tingkat pusat atau di daerah-daerah tidak sedikit para pemimpin yang implikasi kerjanya masih jauh dari nilai-nilai keislaman[20] hal itu dapat dibuktikan dengan salah satu penelitian yang

[20] Nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah terhadap berbagai perubahan dunia yang telah dihasilkan dan menjadi ikon penting bagi rakyatnya (umatnya) dalam keteladanannya, antara lain; (1) mampu menegakkan rasa keadilan; (2) memiliki rasa cinta, empati, dan simpati yang ditujukan kepada sesama umat manusia; (3) memegang teguh prinsip kejujuran; (4) menjunjung tinggi prinsip amanah; (5) memiliki kecerdasan dalam dimensi intelektual, emosional, dan spiritual; (6) bersikap transparan dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Lihat, Pusat Kajian Manajemen Pelayanan: Deputi II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan. *Standar Pelayanan Publik; Langkah-Langkah Penyusunan.* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara: 2009), h. 30, Ed. Revisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh Ali Hasan Siswanto,[21] yang menjelaskan tentang moralitas kiai politik di Jawa Timur. Penelitian tersebut menggambarkan tiga tipologi kiai yang ikut serta di kancah politik yaitu kiai makelar, kiai pejabat dan kiai (terkena) kasus. Ketiga kiai tersebut tindakan moral politiknya berbasis finansial pribadi atau golongannya sehingga tidak mencerminkan bentuk kesadaran moral ketuhanan dan kemanusiaan serta masih jauh dari substansi nilai-nilai keislaman.

Terkait dengan kebobrokan moral para tokoh agama dalam kancah politik, khusunya di pemerintahan pusat, Peneliti Bidang Hukum Indonesia Corruption Warch (ICW) Aradia Caesar[22] mengaku miris dengan banyaknya tokoh agama yang terjebak kasus korupsi. Dia melihat korupsi telah menyasar ke tokoh agama karena adanya pemahaman budaya politik (parpol) mewajibkan kepada kadernya memberikan setoran yang cukup mahal ke partai. Aradia Caesar menyebutkan di antara para tokoh agama yang terjebak korupsi ialah Said Agil Husin Al-Munawar,[23] Luthfi Hasan Ishaaq,[24] Suryadharma Ali,[25] dan Ahmad Fathanah,[26]. Kasus serupa juga terjadi di tingkat daerah seperti KH. Fuad Amin Imron,[27] dan Gatot Pujo Nugroho.[28]

---

[21] Ali Hasan Siswanto, "Moral Kiai Politik: Studi Relasi Kiai dan Politik di Jawa Timur" (Thesis UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 56.
[22] Aradia Caesar, "Para Tokoh Agma Terjerat Korupsi*" Okezone.com* (Desember 2015), 9
[23] Said Agil Husin Al-Munawar adalah mantan Menteri Agama (Menag) di era presiden Megawati Soekarnoputri yang terlibat korupsi dana abadi haji periode 202-2005.
[24] Luthfi Hasan Ishaaq adalah presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), lulusan Punjab University, Pakistan dalam program Islamic studies. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap impor daging sapi pada akhir Januari 2013.
[25] Suryadharma Ali merupakan Menteri Agama (Menag) di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia lulusan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarata yang namanya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam korupsi dana haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilmu agama yang kuat dianggap tidak akan bisa menggoyahkan para tokoh agama dalam melakukan paraktek kotor di birokrasi pemerintahan. Namun kenyataannya sangat berbeda, agama yang menjadi benteng terakhir ternyata juga tidak ampuh bagi para tokoh agama agar tidak terjebak dalam pusaran korupsi. Dapat dipastikan bahwa praktek politik bukan lagi persoalan keimanan saja, tapi adanya pemahaman yang keliru dalam menjalankan sistem, cara main dan budaya dalam dunia perpolitikan yang akhirnya secara sadar atau tidak telah menerjang nilai-nilai dan etika politik sesuai yang diajarkan agama.

Seperti yang dikatakan oleh Joko Widodo dalam buku karangan Alberthiene Endah, "sebagai seorang pemimpin, melawan dan membersihkan praktek kotor birokrasi bukanlah pekerjaan yang mudah. bahwa gagasan untuk memeperbaiki berbagai masalah birokrasi dihunus oleh tembok angkuh berbagai peraturan. Ada PP, perda dan peraturan-peraturan lainnya. Aturan-aturan itu menciptakan lorong yang sempit sehingga para pemikir kebaikan menjadi sulit bergerak. Mereka tidak bisa kreatif untuk mencari jalan keluar, karena jurus-jurus pintar mereka dilumpuhkan birokrasi-birokrasi peraturan."[29]

---

[26] Ahmad Fathanah pernah mengenyam kuliah di Imam Muhammad Ibnu Saud Islamic University. Dia menjadi terkenal sejak ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap kuota impor daging sapi di tahun 2013.

[27] KH. Fuad Amin Imron merupakan ketua DPRD Bangkalan, tokoh agama di Madura yang sebelumnya menjabat Bupati Bangkalan. Dia terlibat kasus suap suplai gas dan pembayaran ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

[28] Gatot Pujo Nugroho adalah kader terbaik PKS yang merupakan Gubernur Sumatera Utara. Dia diduga tersandung kasus suap terhadap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Sumatera Utara.

[29] Alberthiene Endah, *Jokowi: Memimpin Kota Menyentuh Jakarta* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerangka permasalahan birokrasi di atas juga dipengaruhi oleh komposisi aparatur di dalam organisasi, pun demikian, ditambah dengan gemuknya struktur yang ada dalam konsep birokrasi saat ini. Perubahan terhadap paradigma pegawai juga menjadi masalah tersendiri dalam pengembangan moral dan etika pegawai, sehingga kolaborasi masalah yang dalam birokrasi menjadi kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas birokrasi dengan partisipatif aktif, mulai dari pimpinan, pegawai, lembaga masyarakat dan masyarakat itu sendiri sebagai penyelaras tercapainya tujuan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi dan nipotisme.[30]

Dari fenomena di atas, tentu masih banyak para pemimpin yang berpijak pada prinsip amanah[31] dalam tanggung jawab seorang pemimpin serta bagaimana usahanya dalam menyelamatkan diri dari praktek kotor birokrasi. Dalam tingakatan pemimpin daerah (Wali Kota), di Surabaya ada Tri Rismaharani dan di Solo ada Joko Widodo sebagai Wali Kota sampai menjadi Gubernur DKI Jakarta dan di tahun 2014 diresmikan menjadi

---

[30] Hayat, Konsep Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi: Aktualisasi Pemimpin dalam Pelayanan Publik Menuju Good Governance, Universitas Islam Malang, *Jurnal Borneo Administrator,* V. 10, No. 1 (Malang, 2014), 62.

[31] Prinsip amanah yang dimaksudkan adalah sebagai sifat kejujuran yang harus dimiliki seorang pemimpin serta tanggung jawab pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Setiap tindakan dan perilaku pemimpin ditentukan oleh amanah yang diembannya dengan wewenang yang melekat pada simbol kepemimpinannya menjadikan pemimpin yang akuntabilitas dan integritas terhadap sebuah perbaikan dari organisasi dan kemajuan dari lembaga yang dipimpinnya. Amanah merupakan bagian yang menjadi kendali utama bagi seorang pemimpin dalam mengimplementasikan gagasan dan konseptualnya. Lihat, Hayat, Konsep Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi: Aktualisasi Pemimpin dalam Pelayanan Publik Menuju Good Governance, Universitas Islam Malang, *Jurnal Borneo Administrator*, V. 10, No. 1 (Malang, 2014), h. 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang Presiden.[32] Namun dalam hal penulisan tesis ini, Penulis tertarik untuk mengkaji kepemimpinan Bupati Bojonegoro Suyoto selama dua periode dalam memimpin Bojonegoro.

Penulis tertarik meneliti dakwah politik yang dilakukan oleh Suyoto karena telah terbukti selama dua periode memimpin Bojonegoro hampir tidak ada catatan hitam. Justru di bawah kepemimpinannya, Bojonegoro banyak mendapat pengharagaan, di antaranya Kabupaten Bojonegoro terpilih menjadi wakil Indonesia sebagai daerah percontohan pada Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program atau percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah percontohan mewakili Asia bersama kota Seoul, Korea Selatan, dan Tbilisi di Georgia.[33] Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), M. Hanan Rahmadi menjadikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai pilot project penyusunan grand design dan roadmap reformasi birokrasi.[34]

Selain itu, di ajang TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik yang digagas kemenPAN dan RB, Bojonegoro meraih tiga penghargaan sekaligus. Pemerintah Bojonegoro juga boyong empat kategori dalam TOP IT & TELCO Award 2017 yang diselenggarakan oleh ITECH di Balai Kartini

---

[32] M. Yusuf A.R, "Fenomena Kepemimpinan Politik Jokowi", *Jurnal GaneC Swara*, Vol. 7, No. 1 (Maret 2013), 26. Lihat juga di, Alberthiene Endah, *Jokowi:Memimpin Kota Menyentuh Jakarta* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), 2014.

[33] Kompas.Com, Bojonegoro Terpilih Jadi Pemerintah Daerah Terbuka Tingkat Dunia, 14 April 2016. Seperti yang tertulis dalam Tempo.Co, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terpilih menjadi salah satu dari lima belas daerah percontohan dunia untuk praktik pemerintah terbuka di tingkat daerah. Lihat, Tempo.Co, KTT Open Government di Paris, Indonesia Raih Tiga Prestasi, 10 Desember 2016.

[34] Tribunnews.Com, Bojonegoro Terpilih Jadi Pilot Pilot Project Reformasi Birokrasi, 8 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jakarta yang dihadiri oleh Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia. Di antara penghargaan tersebut adalah terkait pengembangan inovasi dan solusi di setiap instansi dalam meningkatkan pelayanan publik.[35]

Jika dibandingkan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro di era sebelum Suyoto, Bojonegoro terbilang memiliki banyak kasus. Seperti selama tahun 2008 tercatat delapan berkas korupsi di kejaksaan Negeri Bojonegoro dan lima kasus yang ditangani. Di antara kasus yang ditangani adalah kasus korupsi di Badan Kesbanglinmas Bojonegoro yang diduga terlibat kasus korupsi dana sosialisasi Pilkada Tahun 2017 yang besarnya mencapai kurang lebih Rp. 185,6 juta. Selain itu, tercatat ada dugaan korupsi proyek WSLIC dengan kerugian negara diperkirakan Rp. 250 juta, kasus pengadaan blanko KTP, kasus korupsi pos sekretariat DPRD Bojonegoro 2006/2007 yang merugikan negara Rp. 10,4 miliar, kasus korupsi mantan Bupati Bojonegoro sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial dan dana tunjangan pejabat struktural senilai Rp. 6,4 miliar, serta terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan untuk sosialisasi pembebasan lahan Blok Cepu Rp. 3,8 miliar.[36]

Dari data kasus birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro yang terjadi di era sebelum Suyoto, terlihat Suyoto mampu membawa Bojonegoro lebih baik, bersih dan terbuka. Bagi penulis Suyoto selain sebagai pemimpin politik ia juga sekaligus seorang da'i, berdasarkan dalam konteks pemikiran Hamka, meletakkan syarat seorang da'i harus memahami

[35] Jawa Pos Radar Bojonegoro, "Bojonegoro Boyong Empat Penghargaan", 02 November 2017.
[36] Kompas.Com, Setahun Lima Kali Kasus di Bojonegoro, 9 Desember 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu politik karena pendekatan dakwah harus disesuaikan dengan keadaan politik suatu negara. Dalam hal ini Amien Rais menganalisa bahwa karena politik adalah alat dakwah, maka aturan permainan yang mesti ditaati juga harus seiring dengan aturan permainan dakwah; keterbukaan, kejujuran, rasa tanggung jawab serta keberanian menyatakan benar sebagai benar dan yang batil sebagai batil, harus menjadi ciri-ciri politik yang berfungsi sebagai sarana dakwah. Aturan main tersebut sedikit banyak sudah dilakukan oleh Suyoto dalam dakwah politiknya.

Selain itu, Suyoto merupakan salah satu di antara para pemimpin daerah yang memiliki multi peran mencakup struktural dan kultural.[37] Pribadi sebagai struktur karena ia terikat dengan organisasi politik, di sisi lain ia adalah tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Memang, menjadi seorang politisi sekaligus tokoh agama memang selalu menarik untuk dikaji dalam konteks dakwah, kedua hal tersebut kerap kali dianggap sebagai dua peran yang sangat sulit untuk disatukan. Selain Suyoto sebagai seorang politisi ia juga menjadi tokoh agama, sehingga tidak jarang jika dirinya diundang dalam suatu acara untuk mengisi tausiyah atau pengajian dan bahkan ia juga sesekali diminta memberikan pidato kerohanian di acara Natal jemaah Katolik setempat.

[37] Dakwah struktural dan kultural merupakan dua konsep yang 'berlawanan' dari segi penekanannya. Permasalahannya adalah bagaimana jika karakter struktural dan kultural berkombinasi dalam wujud seorang da'i (pendakawah)? Pendakwah mau tidak mau, terkadang terjebak dari kuasa struktur dan sisi lainnya, juga merupakan tonggak kebudayaan. Struktur memberikan batasan dan aturan tertentu dalam melaksanakan misi dakwahnya. Di sisi lainnya dia menjadi bagian dari kebudayaan yang tidak bisa dilepaskan. Lihat, Farhan, "Bahasa Dakwah Struktural dan Kultural Da'i dalam Perspektif Dramaturgi" (Probolinggo: At-Turas, 2014), 170-171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suyoto dalam pandangan penulis, ia telah membuktikan mampu memainkan kedua peran tersebut secara baik.[38] Ia mampu mengintegrasikan antara peran pemuka agama (panutan masyarakat) yang salah satu tugasnya adalah sebagai sosok pengayom masyarakat dan politisi tugasnya dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan baik *(clean and good governance)*. Peran tersebut dipadukan dalam konsep dakwah politik di mana antara kepentingan dakwah dan politik bisa dilakukan oleh seorang figur yang tetap menjaga nilai-nilai luhur dakwah dan moralitas dalam berpolitik.[39] Kedua konsep tersebut secara tidak langsung akan termanisfestasi dalam bentuk-bentuk kebijakan yang tetap berpijak pada nilai-nilai dakwah islamiyah serta demi terwujudnya simtem pemerintahan yang maslahat dan memihak kepada umat.

Melihat fenomena yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk mendalami dakwah politik Bupati Bojonegoro Suyoto dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam di birokrasi pemerintahan Bojonegoro serta usahanya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik *(clean*

---

[38] Menurut penilaian penulis, kiprah Suyoto dalam memimpin Bojonegoro selama dua periode ini cukup bagus. Selain menjadikan Bojonegoro bebas dari kemiskinan ia juga mampu menjadikan pemimpin yang siap siaga dalam membentuk pemerintahan Bojonegoro yang lebih bersih dari praktek birokrasi kotor. Karena, sebelum Suyoto menjabat sebagai Bupati, ada mantan Bupati bojonegoro Santoso yang terlibat dalam kasus korupsi, yakni anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2006-2007 dan korupsi pembebasan lahan Cepu dan kasus-kasus tokoh lainnya. Lihat TribunNews.com, *Tersangka* Korupsi, Rumah Mewah Mantan Bupati Bojonegoro dilelang, Bojonegoro, Nopember 2013.

[39] Moralitas berpolitik elite politik yang nota bene tokoh-tokoh ormas sesungguhnya juga juru dakwah. Dengan demikian, sebagai juru dakwah, mereka hendaknya bisa menjadi teladan moralitas di tengah masyarakat. Setiap tindakan dan ucapan mereka lakukan akan menjadi panutan masyarakat. Perilaku yang ditunjukkan oleh para elite politik akan menjadi cermin bagi masyarakat. Kalau elite politik mampu menunjukkan perilaku yang baik, maka masyarakatpun tentu akan melakukan hal yang sama. Sebaliknya, manakala para elite politik itu menunjukkan perilaku yang buruk, maka masyarakat pun akan melakukan hal yang sama, dan bahkan lebih buruk lagi. Lihat, Zainuddin MZ, *Dakwah dan Politik "Da'i Berjuta Umat",* (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), cetekan pertama, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

and good governance), sehingga hal itulah yang menjadi fokus kajian penelitian ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam kaiatannya dakwah dan kekuasaan (politik) M. Dien Syamsudin mengemukakan bahwa politik dalam dakwah harus dipahami sebagai faktor instrumental untuk kontekstualisasi cita-cita sosial Islam ke dalam cita-cita nasional. Karenanya politik dapat diperankan dengan berbagai cara untuk pencapaian tujuan tersebut demi membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di bawah ridha Allah SWT.[40]

Dalam konteks keindonesiaan, negara yang yang dikenal sebagai negara demokrasi pancasila dalam sistem pemerintahan tentunya peran di birokrasi pemerintahan Bojonegoro cukup penting dalam mengawal arah kebijakan pemerintah dalam menciptakan kehidupan yang bermoral baik, tanpa mengesampingkan perbedaan agama yang ada di kalangan masyarakat khususnya di birokrasi tersebut.

Seorang tokoh agama (panutan masayarakat) yang menjadi pemimpin di birokrasi pemerintahan memiliki peran ganda, di samping membuat kebijakan yang adil ia juga harus membuat kebijakan yang sesuai dengan ajaran Islam. namun tidak hanya itu, mereka juga harus menjadi teladan yang baik bagi anggota masyarakat birokrasi yang dipimpinnya karena mengingat saat ini fenomena perilaku yang tidak amanah seperti korupsi, kolusi dan

[40] M. Dien Syamsudien, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama: Mengikhtiarakan Wawasan sosisal-politik Baru, dalam Abdurrahman Wahid, dkk,Muhammadiyah Nu: Reorientasi Wawasan Keislaman, Yunahar Ilyas, dkk. (ed), (Yogyakarta: LPPI UMY, LKPSM NU&PP Al-Muhsin, 1993), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nipotisme kerapkali menimpa para wakil atau pemimpin rakyat. Dan tentunya dengan terpilihnya pemimpin yang memiliki latar belakang (tokoh agama) memberikan harapan besar bagi masyarakat akan terciptanya birokrasi pemerintahan yang bersih dari sikap dan perilaku tidak terpuji para pejabatnya.

Penelitian yang berjudul *"Dakwah Politik Bupati Bojonegoro Suyoto"* ini bermula dari keinginan penulis untuk mengetahui jawaban secara konseptual mengenai dakwah politik yang diterapkan Bupati Bojonegoro di birokrasi pemerintahan Bojonegoro. Dalam tesis ini, sebagai penulis ingin menyajikan totalitas yang melekat pada diri Suyoto sehingga memungkinkan dapat menemukan berbagai metode, pendekatan, ataupun teknik dalam mendesain birokrasi yang religius tersebut.

Namun, kajian tentang dakwah politik dalam tesis ini berfokus pada peran Bupati Bojonegoro Suyoto dalam mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam di birokrasi pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, dilihat dari pendekatan struktural maupun kultural.[41] Perilaku, tindakan dan usahanya dalam membangun pemerintahan Bojonegoro agar bebas dari praktek birokrasi kotor juga merupakan fokus kajian dalam penelitian ini. Sehingga temuan pada penelitian ini diharapkan mampu menjadi pelengkap penelitian-

[41] Untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera dan religius, dakwah bisa menggunakan pendekatan struktural dan kultural atau pendekatan politik. Harus ada para politikus dalam legislatif yang berjuang membuat undang-undang yang menjamin kehidupan yang lebih islami. Dibutuhkan politikus dalam eksekutif yang menjalankan pemerintahan berdasarkan produk hukum tersebut. Bisa juga menggunakan pendekatan kultural atau sosial-budaya dengan membangun moral masyarakat melalui kultur mereka. Misalnya dengan menggunakan ekonomi masyarakat, memberikan pendidikan yang memadai untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan sebagainya. Lihat, Ali Aziz, *Ilmu Dakwah,* (Jakarta: Kencana, 2004), 297-298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian terdahulu yang hanya fokus mengkaji tentang politik sebagai profesi sekaligus alat dakwah yang sifatnya normatif dan realitas potret moral pemimpin (tokoh agama) di kancah politik pemerintahan.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang hendak dicari jawaban dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dakwah politik Bupati Bojonegoro Suyoto dalam membangun birokrasi pemerintahan Bojonegoro yang bersih dan baik?

D. Tujuan Penelitian

Dengan judul dakwah politik Bupati Bojonegoro, penelitian ini memiliki tujuan pokok yaitu:

1. Untuk memahami tentang dakwah politik Bupati Bojonegoro Suyoto dalam membangun birokrasi pemerintahan Bojonegoro yang bersih dan baik.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini secara umum sebagai konsep yang sangat aplikatif dan signifikan bagi siapa saja yang terlibat dalam proses komunikasi, khususnya dakwah di kancah politik.

Seiring perkembangan demokrasi Indonesia yang semakin dinamis dan partisipatif, semakin banyak pula penelitian yang mengkaji mengenai aspek komunikasi khususnya komunikasi yang dilakukan para pemangku-kepentingan di ranah politik dengan menggunakan dakwah sebagai alat kedekatan dengan masyarakat yang dipimpinnya, baik di tingkat lokal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun nasional. Oleh karena itu, tesis ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai salah satu pijakan penelitian dakwah terutama tentang dakwah politik. Dengan menjadikannya sebagai literatur yang secara khusus mendalami panggung politik serta perilaku para politisi yang tetap berpijak pada ruh ajaran Islam.

Dalam lingkup yang lebih luas lagi, temuan yang dicapai dalam tesis ini diharapkan dapat semakin mempertegas kesadaran masyarakat luas, bahwa politik bukanlah lembah hitam dan sistem pemerintahan yang kotor. Maka berbagai kemungkinan sistem pemerintahan yang baik dan maslahat akan tercipta di tangan seorang politisi yang mampu mengsinergikan antara kepentingan politik dan kepentingan dakwah atau dalam tesis ini di sebut konsep dakwah politik.

F. Kerangka Teoretik

1. Dakwah Politik

Guna melengkapi keperluan kajian, satu elemen yang sangat penting adalah definisi dan pentakrifan yang jelas terhadap obyek atau permasalahan yang hendak dikaji. Berdasarkan tajuk, maka definisi dakwah politik perlulah diberi penjelasan yang baik. Karena, dakwah politik merupakan dua elemen yang sangat sinonim dan saling berkaitan dalam usaha mengurus dan mengatur kemaslahatan umat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dakwah politik[42] sering disebut juga dengan dakwah struktural, yang mana dakwah struktural adalah sebagai sebuah pendekatan dalam menjalankan kewajiban dakwah. Dakwah struktural dipahami sebagai pendekatan yang formal dan struktural serta mengikuti sistem yang berlaku sesuai aturan dan norma yang ada dalam bidang tertentu.[43]

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Sulthon, dalam kata pengantar bukunya berpendapat bahwa sesuatu dapat dikategorikan sebagai dakwah struktural jika betul-betul berdakwah secara serius dan intensif mengupayakan Islam menjadi bentuk dan mempengaruhi dasar negara. Untuk itu kecenderungna dakwah ini seringkali mengambil bentuk dan masuk ke dalam kekuasaan, terlibat dalam proses eksekutif, yudikatif dan legislatif serta bentuk-bentuk struktur sosial kenegaraan lainnya.[44]

Hal senada diungkapkan oleh Rudy al Hana bahwa aktifitas dakwah struktural bergerak dengan memanfaatkan struktur sosial, politik maupun ekonomi. Para politik menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman

---

[42] kajian penting dalam dakwah politik adalah bagaimana dakwah dapat digunakan sebagai alat dalam berpolitik yang sesuai tuntunan ajaran agama. Dakwah politik dapat juga dikatakan sebagai usaha mengajak masyarakat untuk menumbuhkan iman dan perbaikan secara ekspansif, dilakukan dengan tidak sambil lalu dalam artian perlu adanya pengorganisasian degan baik dalam merefolusi pemerintahan birokrasi yang komplek akan terjadinya konflik dan praktek kotor. Sehingga yang menjadi hal terpenting di sini adalah seorang politisi yang mempunyai moralitas dan etika sesuai nilai-nilai ajaran Islam dalam menciptakan birokrasi pemerintahan yang islami secara substansial. Lebih jelasnya lihat. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia,* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), 127. Lihat Juga, A. Machfoed, *Filsafat Dakwah "Ilmu Dakwah dan Penerapannya"*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), 15. Lihat juga, Syamsul Bachhri Day, Hubungan Politik dan Dakwah, (Mediator, 2005), Vol. 6, No. 1, 10. Abdul Wahab Hallaf, Al-Siyasat al-Syariat, (Kairo, Daral Ansar, 1997), 4. Dan lihat juga, Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1999, Cet. ke 4, 23.

[43] Farhan*,* Bahasa Dakwah Struktural dan Kultural Da'i dalam Perspektif Dramaturgi*, At-Turas,* (Probolinggo,2014), 271.

[44] Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20
03), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perilaku mereka, serta penegakan ajaran Islam menjadi tanggung jawab negara dan kekuasaan.[45]

Berdasarkan uraian di atas, Politik yang fungsional terhadap tujuan dakwah adalah politik yang sepenuhnya mengindahkan nilai-nilai Islam.[46] Dakwah politik dapat dipahami suatu kegiatan dakwah yang implementasinya mengarah pada jalur politik melalui institusi negara atau partai politik. Sedangkan partai merupakan sebuah alat untuk memberikan saran dan kritik kepada pemerintah melalui dakwah politiknya.[47]

Selain itu, dakwah politik dapat juga dikatakan sebagai proses dakwah yang mengedepankan pada poros dan fungsi struktural di masyarakat.[48] Secara sederhana dakwah politik yang dimaksudkan dalam tesis ini adalah kegiatan dakwah yang menjadikan kekuasaan, birokrasi[49], kekuatan politik sebagai alat untuk memperjuangkan Islam,[50] baik yang dilakukan melalui pendekatan struktural maupun kultural.

---

[45] Rudi al-Hana, "Sinergi strategi Dakwah Kultural NU dan Muhammadiyah" *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4 No. 1, (Surabaya, 2007), 121.
[46] Syamsul Bachhri Day, *Hubungan Politik dan Dakwah,* (Mediator, 2005), Vol. 6, No. 1, 11.
[47] M. Anis Bachtiar, "Dakwah Kolaboratif: Model Alternatif Komunikasi Islam Kontemporer", *Jurnal Komunikasi Islam,* Vol 3, No. 1 (Surabaya: 2013), , 166.
[48] Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), 268.
[49] Birokrasi menurut Prajudi mempunyai tiga arti. *Pertama* birokrasi adalah organisasi sekelompok pejabat-pejabat sejenis tertentu yang bekerjasama secara ketat. *Kedua* birokrasi adalah sistem atau tata kerja kaku, impersonal, dan tidak boleh menyimpang dari peraturan yang berlaku. *Ketiga*, birokrasi adalah status jabatan yang terikat pada kesepakatan kerja, kerahasiaan dan kejujuran para organisasi. Lihat, Asep Muslim, *Reformasi Birokrasi*, (Jakarta: PT. Perca, 2008), 2.
[50] Muhammad Noer, *Dakwah untuk Umat; Makalah dalam Workshop Program Studi Sejenis Ditjen Pendidikan Islam Depag Ri*, 2007, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luchmann

Dua istilah dalam sosiologi pengetahuan Berger adalah kenyataan dan pengetahuan. Berger dan Luckmann mulai menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman kenyataan dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat didalam realitas-realitasyang diakui sebagai memiliki keberadaan *(Being)* yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.[51]

Menurut Berger dan Luckmann, terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas obyektif. Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui peoses intrnalisasi. Realitas subyektif yang dimilik masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkandiri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasiitulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan obyektivikasi dan memunculkan sebuah konstruksi realitas obyektif yang baru.[52] sedangkan realitas ooyektif dimaknai sebagai fakta sosial. Disamping itu realitas obyektif merupkan suatu kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan

[51] Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan* (Jakarta: LP3ES, 1190), 1.
[52] Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpola, yangkesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.

Berger dan Luckmann mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif,namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Pendek kata, Berger dan Luckmann mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.[53]

Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. Dengan demikian agama mengalami proses objektivasi, seperti ketika agama berada didalam teks

[53]Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa:Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*45 (Jakarta: Kencana, 2008), 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi kedalam diri individu,sebab agama telah diinterpretasikan oleh masya

rakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat.[54]

Berger dan Luckmann lebih mengedepankan pandangan dialektik ketika melihat hubungan antara manusia dan masyarakat; manusia menciptakan masyarakat demikian pula masyarakat menciptakan manusia yang dikenal dalam istilah eksternalisasi, obyektivikasi dan internalisasi. Cara kerja teori tersebut akan penulis paparkan dalam anlisis penelitian sebagai berikut;

1. Eksternalisasi

Ekternalisasi adalah dimana individu berusaha untuk beradaptasi dengan lingkunagnnya, dalam momen adaptasi tersebut sarana yang digunakan bisa berupa bahasa maupun tindakan. Pada momen ini terkadang, terkadang dijumpai orang yang mampu beradaptasi dan juga mereka yang tidak mampu beradaptasi. Penerimaan dan penolakan tergantung dari apakah individu tersebut mampu atau tidak beradaptasi dengan dunia sosio-kulturnya tersebut.

[54] Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan* (Jakarta: LP3ES, 1190), 33-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Objektivasi

Objektivasi adalah dimana individu akan berusaha untuk berinteraksi dengan dunia sosio-kulturnya. Di dalam objektivasi, realitas sosial tersebut seakan-akan berada di luar diri manusia. Ia menjadi realitas objektif, sehingga dirasa akan ada dua realitas yakni realitas diri yang subjektif dan realitas yang berada di luar diri yang objektif. Dua realitas tersebut membentuk jaringan intersubjektif melalui proses untuk membangun kesadaran menjadi tindakan sehingga keduanya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi. Dalam pelembagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelembagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.[55]

3. Internalisasi

Internalisasi adalah individu-individu sebagai kenyataan subyektif menafsirkan realitas sosio-kulturnya. Atau peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif kedalam struktur-struktur dunia subyektif. Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat obyektif dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif.

[55] Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Internalisasi ini berlangsung seumur hidup seorang individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap indvidu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder.[56]

Peneliti memilih teori konstruksi sosial atas realitas Peter Bergerdan Thomas Lukhmann karena pada dasarnya konsep yang dikemukakan dalam teori tersebut sangat relevan dengan realitas yang hendak dikaji oleh peneliti. Peneliti hendak melakukan pengkajian secara mendalam terhadap dakwah politik yang dibangun oleh Bupati Bojonegoro Suyoto di birokrasi pemerintahan Bojonegoro. Seperti yang dikatakan Berger, bahwa pada dasarnya realitas yang terdapat di dalam masyarakat adalah dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal penelitian ini realitas terbentuknya tatanan birokrasi pemerintahan oleh para anggotapolitisi dan Suyoto dibangun secara simultan sebagaimana digambarkan Berger melalui *triad* dialektikanya yaitu melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisai.

[56] Soaialisasi Primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer. Lihat, Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan* (Jakarta: LP3ES, 1190) 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengkaji hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Sejauh eksplorasi peneliti, belum ada penelitian yang membahas tema, "*Dakwah Politik Bupati Bojonegoro Suyoto.*" Namun, ada beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tema dakwah politik. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, Cahyadi Indrananto dalam tesisnya mengkaji tentang komunikasi politik yang berjudul tentang "*Pemimpin Daerah sebagai Agen: Dramaturgi dalam Komunikasi Politik Walikota Solo Joko Widodo*". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Jokowi memiliki sikap yang tidak selamanya konsisten dengan pemahaman dramaturgi, Jokowi melaksanakan berbagai strategi komunikasi politik untuk memitigasi ketidakseimbangan informasi di kota Solo.[57]

Kedua, Ali Hasan Siswanto dalam tesisnya meneliti tentang "*Moral Kiai Politik: Studi Relasi Kiai dan Politik di Jawa Timur*". Hasil penelitiannya mengatakan bahwa Implikasi moral perilaku kiai politik dijelaskan melalui tiga tipologi. *Pertama,* kiai makelar; kiai yang menganggap politik adalah media networking pesantren untuk mencapai kekuasaan dan material. *Kedua,* kiai pejabat; yang menganggap politik untuk

[57] Cahyadi Indrananto, *Pemimpin Daerah sebagai Agen: Dramaturgi dalam Komunikasi Politik Walikota Solo Joko Widodo,* Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai keuntungan individu. *Ketiga,*kiai terjerat kasus; kiai yang tidak mencerminkan bentuk kesadaran moral, ketuhan dan kemanusiaan.[58]

Ketiga, Raden Pandji Ahmad Faqih Zamany[59] melakukan penelitian tentang Dakwah Politik Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2014-2019. Hasil tesis ini menyimpulkan bahwa metode dakwah DPRD Jatim menggunakan tiga pilar utama, bil hikmah dan mujadalah serta mauidzah hasanah sebagai instrumennya. Dakwah juga dilakukan dengan memanfaatkan kebijakan -kebijakan dan peraturan daerah.

Keempat, Farhan,[60] yang mengkaji tentang bahasa dakwah struktural dan kultural da'i dalam perspektif dramturgi. Menjelaskan, bahwa dalam pendekatan struktural pesan dakwah Habib Hadi Al Habsy dilakukan dengan komunikasi verbal dan non verbal. Pesan verbal disampaikan dengan perkatan-perkataan yang baik *(qaulan ma'rufan* dan perkataan yang benar *(qaulan sadidan).* Sedangankan komunikasi non verbal dengan visual yang berupa pesan proksemik dan pesan kinesik. Dalam pendekatan kultural meliputi komunikasi verbal, pesan verbal disampaikan dengan perkataan yang sejuk dan lembut *(qaulan layyinan)*, perkataan yang benar *(qaulan sadidan),* dan perkataan yang baik *(qaulan ma'rufan).*

---

[58] Ali Hasan Siswanto, Moral Kiai Politik: Studi Relasi Kiai dan Politik di Jawa Timur (Thesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 68.
[59] Achmad Faqih Zamany, "Dakwah Politik: Telaah Aktivitas Dakwah Politik Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2014-2019, Surabaya" (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 7.
[60] Farhan, "Bahasa Dakwah Struktural dan Kultural Da'i dalam Perspektif Dramturgi", *Journal* (IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo, 2014). 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima, Sadi,[61] melakukan penelitian tentang *"Kiai dan Politik: Mengintip Motif Ulama dalam Pemilu 2009 Di Glenmore Kabupaten Banyuwangi"*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa, Motif politik Kiai di Kecamatan Glenmore dalam berpolitik didasari atas motif doktrin keagamaan, kekuasaan, sosial dan motif ekonomi yang didominasi adalah motif pragmatis. Pola tindakan berusaha dengan tidak melanggar aturan dan hukum.

Keenam, Toto Fachrudin yang dalam tesisnya mengkaji tentang komunikasi politik Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming. Hasil temuannya menyimpulkan bahwa, komunikasi politik yang dibangun oleh Bupati Mardani H. Maming dalam melaksanakan kepemimpinannya di Tanah Bumbu dibangun dalam suasana yang demokratis antara pemimpin dan rakyatnya. Hal tersebut tercermin dari bagaimana Bupati Mardani membuka akses informasi masyarakat Tanah Bumbu kepadanya secara langsung tanpa perantaraan birokrasi, dan melibatkan publik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Tanah Bumbu, serta mendekati pihak ketiga untuk diajaknya bersama-sama bekerja dalam pembangunan wilayah Tanah Bumbu. Sosok Mardani juga menjalankan komunikasi politik dalam pemerintahannya dengan berusaha cepat tanggap dan mencari solusi taktis atas permasalahan yang terjadi di wilayah Tanah Bumbu, tanpa hanya mengandalkan birokrasi semata.[62]

---

[61] Sadi, Kiai dan Politik: "Mengintip Motif Ulama dalam Pemilu 2009 Di Glenmore Kabupaten Banyuwangi".

[62] Toto Fachrudin, "komunikasi politik Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming, (Tesis ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga, Surabaya), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketujuh, penelitin yang dilakukan oleh Ulin Nuha,[63] tentang peran politik dalam proses politik di partai politik, mengkaji kasus peran KH. A. Haris Shodaqoh di Partai Persatuan Pembangunan. Menunjukkan bahwa Peran politik KH. Haris Shodaqoh dalam proses politik di parpol PPP saat ini, dari hasil penelitian dilapangan bahwa pada prinsipnya hanya satu hal yaitu, dalam konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dengan memberikan pesan moral, nasihat (*tausiyah*) kepada para pengurus harian partai PPP dan anggota DPRD, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dan peneliti menyimpulkan bahwa, ada tiga peran politik yang cukup penting yaitu, peran dalam proses pengambilan kebijakan partai, sosialisasi politik dan rekriutmen politik.

Kedelapan, dakwah dalam birokrasi yang dilakukan oleh Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Kurdi Mustofa, MM dalam bukunya *"Dakwah di Balik Kekuasaan",* menjelaskan bahwa dakwah politikmerupakan sebuah pentransferan nilai-nilai ajaran Islam dengan memanfaatkan profesi pekerjaan.[64] Alberthiene dalam bukunya "Jokowi: Memimpin Kota Menyentuh Jakarta. Buku ini mengulas tentang komunikasi politik serta kepribadian Joko Widodo secara totalitas.[65]

Kesembilan, Cahyo Suryanto dalam bentuk buku yang berjudul *"Resonansi Kepemimpinan Transformatif Kang Yoto".* Buku ini mengkaji

---

[63] Ulin Nuha, *Peran Politik dalam Proses Politik di Partai Politik: Kasus Peran KH. A. Haris Shodaqoh di Partai Persatuan Pembangunan.*
[64] Kurdi Mustofa, *Dakwah di Balik Kekuasaan*, (Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2012).
[65] Alberthiene Endah, *Jokowi:Memimpin Kota Menyentuh Jakarta.* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kepribadian Kang Yoto yang dinilai transformatif dalam memimpin dan membawa Bojonegoro lebih baik.[66]

Dari beberapa penelitian di atas, penulis belum mendapati penelitian yang berupaya memahami politik seorang pemimpin pemerintahan dengan memanfaatkan dakwah sebagai instrumen politik ataupun sebaliknya, guna membangun birokrasi pemerintahan yang baik sesuai ajaran Islam. kebanyakan dari sekian penelitian lebih fokus membahas keterlibatan (tokoh agam) di kancah politik, serta masih normatif bahasan tentang peran pemimpin dalam konteks dakwah politik di birokrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, dengan terlibatnya para tokoh agama, ustadz, atau kiai dalam struktur (birokrasi), dimungkinkan tesis ini dapat menambah inspirasi atau rujukan yang mana dakwah politik dalam prosesnya tetap dihubungkan dengan menjaga moral dan niali-nilai agama. Sehingga tokoh agama (panutan masyarakat) mampu menjadikan birokrasi pemerintahan yang *(clean and good governance)* dan tidak sebaliknya terjebak dalam lingkaran setan politik seperti praktek mediasi, manipulasi dan korupsi.

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[67] Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Metode penelitian dapat dilakukan dalam dua bentuk, kuantitatif atau kualitatif yang berlandaskan metode riset.

---

[66] Cahyo Suryanto, *Resonansi Kepemimpinan Transformatif Kang Yoto*, (Sleman: Grahatma Semesta, 2016).
[67] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena penelitian ini mengkaji tentang komunikasi maka perlu berlandasan pada ilmu komunikasi *(communication science and research methode)*.[68]

Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini mencangkup:

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Studi tentang dakwah politik Bupati Bojonegoro Suyoto ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa; pertama untuk mengungkapkan pengalaman individu secara holistik (utuh) dari sisi bahasa, perilaku dan pengalaman sosialnya.[69] Kedua, berusaha untuk memahami makna kehidupan yang disimbolkan dalam bentuk perilaku menurut masyarakat itu sendiri.[70] Ketiga, adanya keterlibatan peneliti dalam memperoleh informasi lapangan secara *genuine* dan utuh agar tidak terjadi distorsi dan kontaminasi data.[71] Keempat, penelitian kualitatif memeberikan peluang untuk memahami fenomena menurut *emic view* atau pandangan aktor setempat.[72] Pandangan pelaku terkait dengan isu-isu atau konsep dakwah dalam politik diharapkan bersifat *geniune* dan untuh.

Peneliti memandang bahwa metode kualitatif adalah metode yang sesuai bagi penelitian ini, karena penelitian berfokus pada proses, interaksi, subyek penelitian, dan perilaku yang ditampilkannya secara apa adanya

---

[68] Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 245.
[69] Jerome Kirk, Merc L, Miller, *Reability and Validity in Qualitative Research*, (Baverly Hills: SagePublication, 1986), 9.
[70] Stephen Cole, *The Sociological Method: An Introduction to The Science of Sociology*, (Chicago: Rand McNally Company, 1980), 79.
[71] Lexy J. Moleong*, Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), 4.
[72] Nur Syam*, Islam Pesisir*, (Jogjakarta: LkiS, 2005), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(verstehen),[73] termasuk di dalamnya mendeskripsikan bagaimana subyek tersebut berinteraksi dengan sekelilinganya.[74] Atas dasar ini pula, maka penelitian terhadap subyek penelitian dilandaskan pada tafsir dan nilai etis, dan bukan merupakan analisis formal terhadap data dan angka.[75]

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi.[76] Mengapa peneliti mengambil etnografi, karena sehubungan dengan subyek yang ada, peneliti ingin mempelajari arti atau makna dari setiap simbol, perilaku , bahasa, kebiasaan, cara hidup dan interaksi yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro Suyoto. Karena peneliti yang berada di lapangan berproses dan menghasilkan sebuah kesimpulan akhir dari sebuah penelitian.

Dalam perkembangannya, etnografi itu disebut sebagai deskriptif atau konvensional yang bersifat mendeskripsikan realitas.[77] Maka sebagai proses, peneliti melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap responden baik individu mapun kelompok, di mana dalam pengamatan tersebut peneliti terlibat langsung dalam keseharian hidup responden. Di sini peneliti meyakini

---

[73] Metode Penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondidi yang alamiah (natural setting). Lihat, Riduwan, *Metode dan Teknik Menyususn Tesis,* (Bandung: Alfabeta, 2013), 51.

[74] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,* (Jakarta: Erlangga, 2009), 24-25.

[75] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 147.

[76] Etnografi adalah riset yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana individu menggunakan budayanya untuk memaknai realitas. Riset ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan kebudayaan tertentu secara mendalam dari berbagai aspek seperti artefak-artefak budaya, pengalaman-pengalaman hidup, kepercayaan dan sistem nilai dari suatu masyarakat. Untuk itu, periset biasanya terjun langsung dalam waktu lama bergaul di tengah masyarakat yang diteliti. Periset melakukan wawancara mendalam, mengobservasi perilaku, menelusuri dokumen-dokumen dan artefak-artefak budaya serta menggelar diskusi kelompok. Lihat, Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi,* (Jakarta: Kencana, 2012), cet. 6. 67.

[77] Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi,* (Jakarta: Kencana, 2012), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlunya memfokuskan diri kepada kepada pendekatan etnografi, karena memberikan peluang bagi peneliti untuk melakukan penggalian fenomena sosial yang khusus secara lebih mendalam dan berkesempatan menangkap makna di balik budaya tertentu dari berbagai aspek tersebut. Adapun subyek penelitian dari penelitian ini adalah Bupati Bojonero Suyoto.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam setiap penelitian, data merupakan faktor penting yang akan menentukan pada bagaimana hasil penelitian dapat dipertanggung-jawabkan.[78] Untuk itu pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, dengan pengumpulan data maka upaya untuk menanalisanya dapat dilakukan. Pengumpulan data juga merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Tanpa adanya teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara *in depth interview* (mendalam) dan dokumentasi.[79] Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah :

a. Wawancara atau interview

[78] Uhar. Suhar Saputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, kualitatif dan tindakan)* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2012), 207

[79] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* dan R&D (Bandung: Alfabeta , 2008), 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari proses pengumpulan datanya, wawancara dapat disebut "seni menanyakan sesuatu dengan "alat" pertanyaan yang benar" (*The are of asking the right question*). Bagaimana merumuskan pertanyaan?, siapa yang harus ditanya?, siapa yang bertanya?, diman tempat bertanya?, kapan pertanyaan itu diungkapkan?, bagaimana mencatat setiap jawaban yang muncul?, semua itu merupakan bagian dari seni bertanya.[80] Wawancara atau interview[81] adalah percakapan dengan maksud tertentu. Yang mana percakapan itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[82]

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tak berstruktur (unstructured interview). Adapun wawancara pada penelitian ini ditujukan kepada Bupati Bojonegoro Suyoto dan beberapa informan yang terkait.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[83] Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini karena hal

---

[80] Asep Saiful Muhtadi, Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 161

[81] Sedangkan dalam bukunya Deddy Mulyana menyebutkan bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Lihat, Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),187

[82]Ibid, 187.

[83] Sugiono (Bandung: Alfabeta, 2008), 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sangat mendukung, yang mana keabsahan dan kevaliditasannya sudah diakui. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa gambar (foto-foto), tulisan (buletin), rekaman kegiatan dan buku panduan yang dipergunakan oleh Bupati Bojonegoro Suyoto..

c. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang didasarkan pada pemantauan atas kejadian, proses yang terjadi. observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur unsur yang tampak dalam suatu kejadian atau gejala gejala/ fenomena dalam objek penelitian.[84] Di dalam buku "*Memahami Penelitian Kualitatif*" Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Yang mana teknik pengumpulan data dengan observasi ini berusaha menyajikan data melalui fakta-fakta mengenai dunia kenyataan.[85]

Pada teknik observasi ini sejatinya adalah tidak hanya dengan menggunakan indra penglihatan saja, tapi dengan menggunakan seluruh alat indra.[86] Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap,[87] sehingga diharapkan dengan menggunakan teknik ini dapat memberikan hasil yang maksimal.

---

[84] Uhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian, (Kuantitatif, kualitatif dan tindakan)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 207
[85] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2008),164
[86] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 175
[87] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* (Jakarta: Rineka Cipta ,2006), 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung yang memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan dakwah politik Bupati Bojonegoro Suyoto.

3. Teknik analisis data

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisalah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.[88] Teknik analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.[89]

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model analisis Miles dan Huberman berupa *model interaktif*[90]. Model ini terdiri atas tiga kegiatan utama[91] yang jalin-menjalin sebelum, selama, dan sesudah proses

---

[88] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 346

[89] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta , 2008), 89.

[90] Miles HB, and A M Huberman, *Data Management and Analysis Method, dalam NK Denzin, and YS Lincoln, Handbook of Qualitative Research ,* (London: Sage Publication, 1994), 249. Lihat juga, Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,* (Jakarta: Erlangga, 2009), 184. Lihat juga, Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitaif; Analisis Data,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 2-3.

[91]*Pertama,* reduksi data yang dilakukan dengan merangkum dan mengfokuskan hal-hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan. *Kedua,* Penyajian data atau *Display.* Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian atau teks yang bersifat naratif, bagan dan dalam bentuk tabel. *Kedua,* penarikan kesimpulan itu sendiri. Lihat, Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif;*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan data, dan semuanya diperlakukan secara sejajar untuk membantu wawasan umum yang disebut analisis. Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu di*coding* dengan proses sebagai berikut:

a. *Open coding*. Tahap ini merupakan proses awal untuk mengenal dan memperoleh data sebanyak-banyaknya dari subyek penelitian. Tahap ini meliputi merinci data memeriksa, membandingkan, konseptualisasi dan mengkategorikan.
b. *Axial coding.* Setelah data diperoleh kemudian diorganisir berdasarkan kategorinya sehingga akan diketahui mana data inti dan mana data sekunder.
c. *Selective coding.* Tahap ini merupakan akhir analisis data, yang meliputi pengategorian data yang inti dan tidak untuk mencari konsepterhadap data-data yang ada.[92]

Coding seperti ini dipergunakan oleh peneliti setelah memperoleh data lapangan, baik hasil obsevasi maupun wawancara. *Coding* sangatlah penting dalam penelitian kualitatif guna memudahkan peneliti dalam menarasikan dan menganalisis data secara sistematis serta menemukan kembali data-data yang mengkin terlupakan dengan melihat catatan lapangan yang telah dibuat sebelumnya.

Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 10.

[92] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian,* (Bandung Pustaka Setia, 2008), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang menggambarkan; apa *(what)*, mengapa *(why)*, dan bagaimana *(how)* penelitian ini dijalankan. Dengan demikian penggunaan penelitian ini dapat memiliki gambaran detail sehingga memudahkan koreksi atau mendudukkan penelitian ini sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Bab ini berisi tentang maksud penelitian ini diadakan serta masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, serta nilai pentingnya dan arah penelitian. Bab pertama tersusun beberapa sub bab, yaitu latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan asumsi-asumsi berupa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Yang meliputi kajian teori, penjelasan konseptual tentang hal-hal yang berkaitan dengan dakwah politik pada penelitian ini.

Bab III berisi tentang penyajian data untuk menjawab rumusan masalah. Data inti maupun data untuk memvalidasi. Seperti halnya data tentang dakwah politik Bupati Bojonegoro di birokrasi pemerintahan Bojonegoro dan data lainnya yang dianggap penting dan berkaitan dengan judul penelitian tersebut.

Bab IV berisi analisis hasil penelitian. Analisis ini merupakan pembacaan data yang uraian menurut teori yang digunakan. Sehingga dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisa tersebut bisa diketahui dakwah politik Bupati Bojonegoro seperi apa saja dalam konteks menjadikan birokrasi pemerintahan Bojonegoro yang bersih dan baik menurut ajaran Islam.

Bab V penutup. Bab ini merupakan bab akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian. Dalam bab ini, secara general menjelaskan inti ataupun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN DAKWAH POLITIK

1. Urgensi Dakwah Politik

Konsep dakwah politik dalam Islam secara jelas diungkapkan dalam teks-teks Al-Qur'an yang menyebutkan sejumlah prinsip-prinsip politik berupa keadilan, musyawarah, toleransi, hak-hak dan kewajiban, *amar ma'ruf nahi munkar,* kejujuran, amanah, serta penegakan hukum. Selain itu konsep-konsep dan dasar-dasar politik dalam Islam juga dapat dilihat dari praktek Nabi Muhammad SAW dalam menyelenggarakan pemerintahan Islam, yaitu bagaimana ketika beliau menjalankan fungsi pemerintahan di Madinah.[1]

Posisi Nabi Muhammad SAW di Madinah, tidak hanya sebagai seorang Rasul yang menyampaikan risalah Illahi, malainkan juga memainkan peran ganda sebagai kepala negara, yang mengatur urusan kemasyarakatan. Pola kepemimpinan Nabi oleh para ahli politik dikategorikan sebagai bentuk *teo-demokratis*, yaitu suatu pola pemerintahan yang diterapkan berdasarkan asas musyawarah untuk meyikapi dan memutuskan persoalan-persoalan yang yang terjadi serta meyadarkan solusi berdasarkan ketetapan dari Allah, yaitu wahyu.[2]

---

[1] Ayi Sofyan , *Etika Politik islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 61.
[2] Abuddin Nata, Metodologi Studi islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintahan negara Madinah kemudian diteruskan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan *Khulafa Ar-Rasyidin*. Corak pemerintahan yang dipraktekkan di masa itu sedikit berbeda dengan Nabi, yaitu mengambil *aristokrat demokratik.* Meskipun terjadi banyak konflik politik di masa itu, namun secara konsistensi pemerintahan Islam pada masa *Khulafa Ar-Rasyidin* tetap menjaga warisan tradisi kepemimpinan Rasulullah SAW. Begitu juga pasca pemerintahan *Khulafa Ar-Rasyidin* pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Bani Umayyah dan Abbasiyah yang menunjukkan pasang surut dalam mengatur pemerintahan Islam. Sejarah mengungkapkan bahwa pemerintahan Islam tetap konsisten mengedepankan nilai-nilai moralitas.[3]

Namun jika melihat realitas saat ini, di kalangan masyarakat Islam pada umumnya kurang melihat hubungan politik dengan agama, malah kebanyakan mereka memisahkan secara tegas keduanya. Hal tersebut antara lain disebabkan karena pemahaman yang tidak utuh terhadap ajaran Islam. dalam kaitan ini, menarik mengikuti pandangan Kuntowijoyo. Ia mengatakan bahwa Islam dimaknai dan dipahami sebagai persoalan individual dan melupakan kalau Islam sebenarnya agama sosial. padahal Islam menekankan kesadaran melakukan aksi bersama untuk mewujudkan aksi kebaikan. Lebih lanjut Kuntowijoyo secara tegas menyatakan pentingnya kesadaran komunitas dan bekerjasama untuk

[3] Sofyan, *Etika Politik*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan kemaslahatan. Untuk mewujudkan hal itu adalah melalui aktivitas politik dalam wadah sebuah pemerintahan negara.[4]

Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan politik dan agama sebagai proses perbaikan dan pengaturan pemerintahan dapat disebut juga sebagai dakwah politik yang mana prosesnya adalah mengedepankan pada poros dan fungsi struktural di masyarakat.[5] Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Sulthon, dalam kata pengantar bukunya berpendapat bahwa sesuatu dapat dikategorikan sebagai dakwah struktural jika betul-betul berdakwah secara serius dan intensif mengupayakan Islam menjadi bentuk dan mempengaruhi dasar negara. Untuk itu kecenderungna dakwah ini seringkali mengambil bentuk dan masuk ke dalam kekuasaan, terlibat dalam proses eksekutif, yudikatif dan legislatif serta bentuk-bentuk struktur sosial kenegaraan lainnya.[6]

Selain di atas, Menurut Khairul Azmi Muhammad, politik Islam adalah poltik dakwah.[7] Ia adalah poltik yang mempunyai adab kesopanan, budi bahasa, yang tinggi, akhlak mulia serta keluhuran budi pekerti. Politik Islam diperjuangkan bukan karena Islamnya.[8] Al-Mawardi seorang tokoh terkemuka Islam dalam bidang sains politik, juga menekankan urgensi kuasa politik digunakan untuk memartabtkan agama. Ungkapan *Hirasat*

---

[4] Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), 27.
[5] Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), 268.
[6] Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20 03), 30.
[7] Khairul Azmi Mohammad, Kepemimpinan Politik dalam Islam: Satu Analisis Awal dalam Konteks Malaysia, dalam *Islam, Politik dan Kerajaan,* ed. Khairul Azmi, Mohammad (Johor: Pejabat Ketua Penerangan dan Penyelidikan Kerajaan Negeri Johor, 2003), 36-37.
[8] *Ibid*., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

AL-din Sultaniyyah ditujukan kepada orang yang berkuasa. Al-Mawardi juga menjelaskan bahwa *imamah* adalah untuk menggantikan *nubuwwah* bagi mengawasi agama dan mengawasi siasah dunia yang berkaitan dengannya.[9]

Sayyid Qutub juga menjelaskan pentingnya tugas ahli politik Islam dibandingkan dengan ahli politik yang bukan Islam. ini karena tugas mereka bukan hanya memastikan rakyat mendapat hak dan pembelaan sewajarnya tetapi yang lebih penting ialah mengajak rakyat kembali kepada kebenaran. Islam disampaikan dan dijelaskan kepada rakyat seterusnya mengajak mereka ke arah menghayati cara hidup Islam.[10] Dalam perkembangan lain, Sayyid Qutb juga menegaskan bahwa politik dan dakwah bagi umat Islam tidak boleh dipisahkan. Ini karena politik hanya wasilah kepada tugas yang lebih besar yaitu mengajak manusia kepada Allah SWT dan menegakkan sistem Islam dalam semua aspek kehidupan.[11]

Dari penjelasan di atas, eksistensi dakwah politik dalam Islam dapat dikatakan menduduki posisi yang strategis. Dakwah berfungsi sebagai upaya rekonstruksi masyarakat muslim sesuai dengan cita-cita sosial Islam. Sosialisasi Islam melalui jalur politik diharapkan akan

---

[9] Al-Mawardi, Ali Ibn Muhammad, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,t.t), 5. Juga Lihat, Mohd Nasran Mohammad, Teori Politik Al-Mawardi Mengenai Khalifah, dalam *Dakwah dan Etika Politik di Malaysia,* ed. Zulkiple Abd. Ghani (Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd, 2005), 56-57.

[10] Amir Husin Mohd Nor, *Etika Politik Menurut Pandangan Sayyid Qutb* dalam *Dakwah dan Etika Politik di Malaysia,* ed. Zulkiple Abd. Ghani (Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd, 2005), 75-76.

[11] *Ibid.,* 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungkinkan proses internalisasi nilai-nilai sehingga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan khusunya untuk membentuk tatanan birokrasi pemerintahan yang baik (*good governance).*

Sejarah mencatat bahwa Islam pernah berhasil membangun peradaban besar yang diakui oleh dunia dan Islam menjadi kekuatan dunia tidak terlepas dari pengaruh dakwah dan politik. Peradaban Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW. sampai saat ini tidak dapat dipisahkan dari dua hal tersebut. Dapat dikatakan bahwa maju dan mundurnya masyarakat Islam sangat dipengaruhi oleh kuat tidaknya dakwah dan politik Islam. kan tetapi, dalam perjalanan sejarah Islam, persoalan dakwah dan politik telah menjadi perhatian serius. Sebahagian Ulama menganggap bahwa dakwah dan politik tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Islam, sedangkan yang lain berpandangan bahwa dakwah dan politik adalah hal sangat berlawanan dan tidak boleh dicampur-adukkan satu dengan yang lainnya.[12]

Perbedaan pandangan tersebut masih sering kali terjadi di tengah masyarakat hingga saat ini. Pendapat, pikiran dan prasangka negatif ditujukan khusunya kepada politik yang dianggap sesuatu yang dianggap tidak banyak memberikan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. Pada sisi lain dakwah diposisikan sebagai kegiatan suci yang merupakan warisan para Nabi dan tidak boleh bercampur dengan politik. Sehingga

[12] Abd. Ghafar Don, *Integrasi Dkwah dan Politik,* dalam Zulkiple Abd. Ghani dan Mohd, Syukri Yeoh Abdullah (ed), *Dakwah dan Etika Politik di Malaysia* (Kuala Lumpur: Utusan Publication dan Distributors Sdn Bhd, 2005), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tepat jika Hasan Al Banna mengungkapkan bahwa sedikit sekali orang berbicara tentang politik dan Islam, kecuali ia memisahkan antara keduanya dan diletakkan keduanya secara independen. Keduanya tidak mungkin bersatu dan dipertemukan. Pada sisi lain sebahagian organisasi Islam yang bergerak dalam aktivitas dakwah dengan tegas mencantumkan bahwa organisasi tersebut tidak berpolitik. Namun, dalam prakteknya selalu bersentuhan dan berdimensi politik.[13]

Fenomena di atas menunjukkan bahwa tidak sedikit masyarakat yang kurang memahami urgensi hubungan fungsional antara dakwah dan politik dalam ranah keagamaan. Umumnya masyarakat menganggap bahwa dakwah tidak boleh dicampuri dengan oleh politik, dan politik tidak boleh mengatasnamakan dakwah. Diskursus tersebut terkesan bahwa politik merupakan sebuah sesuatu yang kotor, penuh kemunafikan, tipu muslihat, kelicikan, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Pemahaman seperti itu adalah sesuatu yang wajar karena didasarkan pada pengalaman yang ada. Secara realitas pentas politik memang selalu diwarnai dengan tontonan yang bersifat negatif.[14]

Dalam konteks itu, menarik sekali mengikuti jalan pikiran Ibn Khaldun (1332-1406). Menurut beliau pemerintah akan lebih berwibawa jika pelaksanaan kekuasaan yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai agama. Bahkan hal tersebut akan bertahan apabila dalam pelaksanaannya

[13] Taufiq Yusuf Al-Wa'iy, *Pemikiran Politik Kontemporer Al-Ikhwan Al-Muslimun: Studi Analitis, Observatif, Dokumentatif,* (Solo: Era Intermedia, 2003), 39.
[14] M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta,* (Bandung: Mizan, 1991), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti nilai-nilai kebenaran, karena hati manusia hanya dapat disatupadukan dengan pertolongan Allah SWT.[15]

2. Sinergitas Politik dan Dakwah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat memeberikan gambaran bahwa politik mempunyai tempat yang istimewa dalam Islam. Islam sebagai ajaran universal dengan jelas dan tegas tidak memisahkan masalah keduniaan dan keagamaan dengan politik. Bahkan politik dianggap sebagai wasilah atau jalan untuk memperjuangkan agama dan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Hal ini juga senada dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan Al Mawardi, politik harus digunakan untuk tujuan dan kepentingan agama atau dan dakwah.

Sementara itu, M. Quraih Shihab berpandangan bahwa agama sangat menekankan perlunya kehadiran pemerintahan demi menata kehidupan masyarakat. Bagi Quraish Shihab ketentraman dan stabilitas di tengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mutlak dan hal tersebut tidak dapat terwujud tanpa adanya peraturan yang mengikat dan dilaksanakan oleh sebuah institusi yang memiliki kekuatan dan legitimasi oleh masyarakat yaitu negara. Bagi Shihab, negara adalah sebuah institusi yang dijalankan berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan hadits. Kedua hal itu dalam pandangan Quraish Shihab sebagian prinsip umum yang telah diletakkan Islam tentang pentingnya suatu pemerintahan.

[15] Charles Issawi, An Arab Philosophy of History (Terj.) A. Ali Mukti (Jakarta: Tintamas, 1976), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks Indonesia yang memiliki kemajemukan dalam agama, lebih lanjut Quraish Shihab secara tegas tidak sepakat dengan kelompok yang mengintegrasikan antara agama dan negara, dalam arti bahwa segala sesuatu harus diatur secara formalistik simbolis melalui pendekatan penafsiran agama. Quraish juga tidak sepakat dengan kelompok yang sekularis yang memisahkan secara tegas agama dari kehidupan sosial politik.

Bagi Quraish Shihab, kewajiban negara adalah menerapkan nilai-nilai agama dalam rangka menata kehidupan masyarakat sebagaimana Nabi Muhammad membangun negara Madinah. Universalitas nilai-nilai agama harus mampu memajukan dan memperkukuh integritas, kesatuan dan persatuan masyarakat Indonesia majemuk, suku, agama, dan ras. Hal yang utama bukanlah formalisasi ajaran agama kedalam kehidupan sosial politik, melainkan bagaimana nilai-nilai agama dapat terinternalisasikan dalam kehidupan riil bernegara, seperti keadilan, musyawarah, toleransi, terpenuhi hak dan kewajiban, kejujuran, serta penegakan hukum dan sebagainya.

Seperti apa yang telah dilakukan Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya yangtidak terlepas dari praktek-praktek politik untuk melaksanakan yang makruf dan mencegah yang mungkar.[16] Hal ini menunjukkan bahwa fungsi politik dalam penyebaran agama menjadi

[16] Nabi Muhammad SAW. merupakan seorang ahli politik, khususnya pada penggalan Madinah. Pada diri beliau bersepadu kompetensi sebagai agamawan dan negarawan. Nabi seorang ahli politik yang berpandangan jauh dan membawa risalah dengan akhlak yang luhur. Lihat, Muhammad Husayn Haykal, *Hayatu Muhammad* (Al-Qahirah: Daral Ma'arif, 1972), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

relevan dan penting dipraktekkan. Agama dan politik memiliki kaitan yang sukar dipisahkan. Sebab hidup di dunia tidak hanya untuk kepentingan dunia semata, tapi dunia harus mampu membawa setiap setiap muslim untuk kebahagiaan di akhirat.[17]

Politik *(siyasah)* pada umumnya bermaksud sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan dan cara menggunakannya. Kekuasaan terwujud apabila terdapat lembaga, yaitu negara sebagai wadah untuk menjalankan kekuasaan. Politik dalam tradisi Islam mempunyai hubungan yang erat dengan manajemen pemerintahan dalam mengusrus kepentingan masyarakat dan membawa mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan.[18]

Jadi sebenarnya tujuan politik sejalan dengan dakwah. Namun dalam prakteknya, politik terkadang menggunakan dan memperalatkan agama bagi kepentingan politik. Hakikatnya, menurut konsep Islam, politiklah yang sepatutnya menjadi alat untuk mengembangkan dan mensukseskan dakwah. Menurut Ali Sodiqin bahwa strategi menyampaikan dakwah tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun kekuatan politik Umat Islam dan antara kekuatan politik dan penyebaran agama menyatu dan bersinergi.[19]

---

[17] Ali Abd al Mu'ti Muhammad, *Al Fikr al-Siyasi fi al-Islam* (Iskandariyah: Dar al-Jami'ah 1978), 39.
[18] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1999), 24.
[19] Ali Sodiqin, Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008). 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun perlu diperhatikan, menjadikan dakwah sebagai alat politik adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Dakwah harus diposisikan pada dimensi yang bebas dan tidak monopoli atau subsosial daripada lembaga atau kekuatan politik tertentu. Sebaliknya, dakwah harus menjadi bagian dari berbagai pihak yaitu negara, organisasi, lembaga dan partai politik dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran sejarah bahwa dakwah lebih tua usianya daripada politik dan dakwah sifatnya lebih universal.

B. KOMUNIKASI POLITIK

1. Komunikator Politik

Komunikasi dan politik pada hakikatnya berpatu dan bertemu pada dua tititik yaitu : (1) *Pembicaraan, dan (2), pengaruh atau mempengaruhi. Politik adalah komunikasi, karena sebagian besar kegiatan politik dilakukan dengan pembicaraan sebagai salah satu bentuk komunikasi.* sebaliknya komunikasi adalah politik, karena hampir semua politik bertujuan mempengaruhi sebagai salah satu dimensi politik. Justru itu dapat didefinisikan bahwa komunikasi politik adalah pembicaraan yang bertujuan untuk mempengaruhi dalam kehidupan bernegara.[20]

Komunikasi politik telah mengalami perkembangan yang cukup pesat baik di Amerika maupun di Eropa Barat.[21] Sehingga cukup banyak pernyataan para ahli yang menunjukkan kedekatan komunikasi dengan

[20] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 8
[21] Hasrullah, *Megawati dalam Tangkapan Pers* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik. Sebagaimana ditulis Nasution,[22] dengan mengambil pendapat dari Garnoor misalnya, mengatakan bahwa "tanpa komunikasi, tidak akan ada usaha bersama, dan dengan demikian tidak akan akan politik." Pernyataan lain datang dari Pye, "bahwa tanpa suatu jaringan (komunikasi) yang mampu memperbesar *(enlarging)* dan melipatgandakan *(magnifying)* ucapan-ucapan dan pilihan-pilihan individual, maka di situ tidak akan ada suatu politik yang dapat merentangkan suatu bangsa.

Michael Rush dan Philip Althoff[23] mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Menurut Maran[24] proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan.

Komunikasi politik merupakan semua proses penyampaian informasi termasuk fakta, pendapat-pendapat, keyakinan dan seterusnya, pertukaran dan pencarian tentang itu semua yang dilakukan oleh partisipan dalam konteks kegiatan politik yang lebih bersifat melembaga.[25]

---

[22] Zulkarimein Nasution, *Komunikasi Politik Suatu Pengantar,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) 23. Menurut Mueller, merumuskan komunikasi politik merupakan infra-struktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran. Rumusan Golnoor tersebut sejalan dengan pendekatan Almond dan Powell (dalam Nasution, 1990, 24), yang menempatkan komunikasi sebagai suatu fungsi politik bersama-sama dengan fungsi lainnya (artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen) yang terdapat dalam suatu sistem politik.
[23] Rafael R. Maran, *Pengantar Sosiologi Politik,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 158.
[24] *Ibid.,* 159.
[25] Pawito, *Komunikasi Politik,* (Yogyakarta: Jalasutra Prakoso, 2009), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hampir boleh dikatakan anatara sarjana satu dengan yang lain selalu berbeda dalam memberikan definisi komunikasi politik. Intinya komunikasi politik dapat diartikan sebagai suatu aktivitas komunikasi yang mempunyai konsekuensi atau akibat politik, aktual potensial,terhadap fungsi sistem politik. Konsekuensi inilah yang membedakan antara komunikasi politik dan komunikasi sosial. Suatu komunikasi yang tampaknya pesan atau isinya bukan pusan politik, namun secara potensial dan aktual dapat berakibat atau mempunyai konsekuensi pada salah satu fungsi sistem politik, maka itu adalah komunikasi politik.[26]

Perkembangan lebih jauh dari disiplin ilmu komunikasi politik, seprti pandangan dari studi mendalam Nimmo, mengungkapkan sebagai berikut: *Political communication as a field of inquiry which focuses on research and theorty building of schulars from many disciplines. The disciplines, over the year, have included mass communication, speech communication, political science, journalism, psychology, sociology, and other as well."*[27] Dari pandangan di atas terungkap, bahwa disiplin ilmu yang digunakan dalam komunikasi politik sangat multi disipliner sifatnya, sehingga dalam pengkajian yang dinamis tentunya membutuhkan paradigma yang luas berbagai displin ilmu.[28]

---

[26] Henry Subiakto dan Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi,* (Jakarta: Kencana, 2012), 20.

[27] Dan Nimmo, Political Communication and Public Opinion in America". Dalam *Komunikasi PolitikKhalayak dan Efek,* (Terj. Tjun Surjaman), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Nimmo[29], salah satu ciri komunikasi ialah bahwa orang jarang dapat menghindari dan keturutsertaan. Hanya dihadiri dan diperhitungkan oleh seorang lain pun mempunyai nilai pesan. Dalam arti yang paling umum kita semua adalah komunikator, begitu pula siapapun yang dalam *setting* politik adalah komunikator politik.

a. Politikus sebagai komunikator politik

Politikus sebagai komunikator berarti orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintahan harus dan memang berkomunikasi tentang politik, tak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karier, dan tidak mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Pekerjaan mereka adalah aspek utama dari kegiatan ini. Meskipun politikus melayani beraneka tujuan dengan berkomunikasi, ada dua yang menonjol. Daniel Karz[30] menunjukkan bahwa pemimpin politik mengerahkan pengaruhnya ke dua arah: "mempengaruhi alokasi ganjaran dan mengubah struktur sosial yang ada atau mencegah perubahan demikian".

Dalam kewenangannya yang pertama politikus itu berkomunikasi sebagai *wakil* suatu kelompok atau langganan; pesan-pesan politikus itu mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik; artinya, komunikator politik mewakili kepentingan kelompok. Sebaliknya, politikus yang bertindak sebagai *ideolog* tidak begitu terpusat perhatianya kepada mendesakan tuntutan

[29] Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media,* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993), 28.
[30] Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media,,* 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang langganan; ia lebih menyibukkan dirinya untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi, dan bahkan mendukung perubahan revolusioner. Ideolog itu terutama berkomunikasi untuk membelokkan mereka kepada suatu tujuan, bukan mewakili kepentingan mereka dalam gelanggang tawar-menawar dan mencari kompromi. Karz membedakan wakil partisan dan ideolog; tetapi bila dipandang sebagai komunikator politik, perbedaan itu hanya dalam derajatnya, bukan dalam jenisnya. Kedua tipe politikus itu mempengaruhi orang lain, yakni mereka bertindak dengan tujuan mempengaruhi opini orang lain.[31]

Banyak jenis politikus yang bertindak sebagai komunikator politik, sama dengan banyaknya politikus, tetapi untuk mudahnya dapat diklasifikasikan mereka sebagai (1) di dalam atau di luar jabatan pemerintahan, (2) berpandangan nasional atau subnasional, dan (3) berurusan dengan masalah berganda atau masalah berganda atau masalah tunggal.[32]

b. Profesional sebagai komunikator politik

Komunikator profesional adalah peranan sosial yang relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama: munculnya media massa yang memintasi batas-batas rasial, etnis, pekerjaan, wilayah, dan kelas untuk meningkatkan kesadaran identitas nasional dan perkembangan serta-

[31] Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media,* 31
[32] Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media,* 32-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merta media khusus (seperti majalah untuk khalyak khusus, stasiun radio dan sebagainya) yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Baik media massa maupun media khusus mengandalkan pembentukan dan pengelolaan lambang-lambang dan khalayak khusus.[33]

Termasuk sebagai Komunikator profesional adalah orang yang mengendalikan keterampilan yang khas dalam mengelola simbol-simbol dan yang memanfaatkan keterampilan ini untuk menempa mata rantai yang menghubungkan orang-orang yang jelas perbedaanya atau kelompok-kelompok yang dibedakan. Seorang komunikator profesional, kata James Carey, adalah seorang makelar simbol, orang yang menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah-istilah komunitas bahasa yang berbeda tetapi menarik dan dapat dimengerti. Komunikator profesional menghubungkan golongan elit dalam organisasi atau komunitas mana pun dengan khalayak umum: secara horizontal ia menghubungkan dua komunitas bahasa yang dibedakan pada tingkat struktur sosial yang sama.[34]

Maka komunikator profesional adalah manipulator dan makelar simbol yang menghubungkan para pemimpin satu sama lain dan dengan para pengikut. Akan tetapi, yang sangat membedakan karakteristrik komunikatir profesional menurut Care, adalah bahwa

[33] Ibid., 33.
[34] *Ibid*., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesan yang dihasilkannya tidak memiliki hubungan yang pasti dengan pikiran dan tanggapannya sendiri. Komunikator profisional beroperasi di bawah desakan atau tuntutan yang di satu pihak, dibebankan oleh khalayak akhir dan dipihak lain oleh sumber asal.[35]

Bahwa tidak ada hubungan yang pasti antara pandangan profesional itu dengan penampilannya tidak berarti bahwa semua profesional memisahkan opini pribadinya dari pekerjaan mereka penulis editorial, kolumnis, dan komentator menyuarakan perhatian istemewa terhadapnya oleh Carey ialah kelas profesional yang menerjemahkan dan menginterpretasikan pesan dari satu komunitas bahasa (langganan) itu dengan pandangan, gagasan, atau pikiran pribadi mereka.[36]

Para profesional tersebut menjual keahliannya dalam memanipulasi, menjual, menghubungkan, dan menginterpretasikan kepada para politikus dan yang lain. Sebagian menjalankan keahliannya itu tanpa memperhatikan kesukaan atau ketaksukaanya kepada langganan maupun kepada khalayak. Yang lain, seperti konsultan kampanye politik yang berpengaruh, Joseph Napolitan, hanya bekerja untuk para politikus dari partai politik atau pandangan ideologis tertentu.[37]

Bagi *pros* atau singkatan profesional, tidak seperti bagi *pols* atau singkatan politikus, profesinya adalah komunikasi, bukan politik. Dari

[35] Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media,* 34.
[36]*Ibid.,* 34
[37]*Ibid.,* 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang telah dijelaskan, dapat menunjukkan dua tipe profesional sebagai komunikator politik. Seperti dalam hal politikus yang menjadi wakil partisan dan atau ideolog, perbedaanya adalah pada tekanan, bukan pada jenis. Satu perangkat profesional mencakup para *jurnalis*, yang lain meliputi para *promotor*.[38]

c. Aktivis sebagai komunikator politik

Menurut Doob apa yang disebut aktivis adalah mereka yang terlibat baik dalam politik maupun komunikasi dan memiliki keahlian tentang itu, tetapi mereka tidak menggantungkan nafkahnya pada kedua bidang itu. Mereka ini misalnya juru bicara kelompok kepentingan, pemuka pendapat *(opinion leader)*, dan mahasiswa. Para aktivis ini tidak jarang justru sangat berpengaruh terhadap pandangan politik jaringan sosialnya, seperti yang dilaporkan oleh penelitian Lazarsfeld dan teman-teman yang menemukan bahwa para pemuka pendapat mempunyai peran yang sangat penting dalam perubahan sikap.[39]

Di indonesia, aktivis identik dengan dengan mahasiswa atau juga dengan mereka yang bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pascareformasi peran kalangan aktivis tampak semakin menonjol. Mereka tidak saja aktif melakukan pengawasan terhadap berbagai institusi dengan berbagai cara, termasuk dengan demo, unjuk rasa mewakili publik, tetapi para aktivis sekarang juga banyak menjadi

[38]*Ibid.,* 34
[39] Henry Subiakto dan Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi,* (Jakarta: Kencana, 2012), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narasumber media, dan pembicara seminar.Aktivis yang khususnya dari LSM banyak yang menjadi tokoh yang terkenal karena sering tampil di media, bahkan tak sedikit yang akhirnya berubah menjadi politisi karena memiliki modal politik populer di masyarakat.[40]

2. Strategi Komunikasi Politik

Hakikat strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Karena pada kenyataannya keberadaan pemimpin politik sangat dibutuhklan dalam setiap aktivitas kegiatan komunikasi politik. Ketika komunikasi politik berlangsung, justru yang berpengaruh bukan saja pesan politik, melainkan terutama siapa tokoh politik (politikus) atau tokoh aktivis dan profesional dan dari lembaga yang menyampaikan pesan politik tersebut.[41]

Menurut Anwar Arifin, strategi komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Justru itu, keberadaan pemimpin politik sangat dibutuhkan di setiap aktivitas kegiatan politik. Setelah itu, merawat ketokohan, memantapkan kelembagaan politik, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus merupakan keputusan strategis yang tepat bagi komunikator politik.[42]

---

[40] *Ibid*., 29.
[41] Ardial, 2010, 73.
[42] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik, Filsafat, Teori, Tujuan, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika komunikasi politik berlangsung, justru yang berpengaruh bukan saja pesan politik, melainkan terutama siapa tokoh politik (politikus) atau tokoh aktivis dan profesional dan dari lembaga mana yang menyampaikan pesan politik itu. Dengan kata lain, ketokohan seorang komunikator politik dan lembaga politik yang mendukungnya sangat menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi politik dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

a. Keberadaan pemimpin politik

Salah satu tipe aktor politik yang memiliki pengaruh dalam proses politik adalah pemimpin politik dan pemerintahan. Dalam masyarakat terdapat *stratifikasi* kekuasaan yang dimiliki. Yang memiliki kekuasaan disebut (elit pemimpin), dan yang tidak memiliki kekuasaan, dan karena itu mematuhi pemilik kekuasaan disebut massa rakyat.

Kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak sebaliknya. Mirip dengan kekuasaan, kepemimpinan merupakan hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan yang teridir atas banyak jenis sumber pengaruh, kempemimpinan lebih menekankan pada kemampuan menggunakan persuasi untuk mempengaruhi pengikut. Selain itu kepemimpinan merupakan upaya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan tujuan yang menjadi kepentingan bersama pemimpin maupun para pengikut.[43]

Pemimpin politik juga berbeda dengan kepala instansi pemerintahan karena yang terakhir ini lebih menggunakan kewenangan dalam mempengaruhi bawahan tidak seperti kepala instansi yang cenderung menggunakan hubungan-hubungan formal dan inpersonal dalam menggerakkan bawahannya, pemimpin politik lebih menggunakan hubungan-hubungan informal dan personal dalam menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya dapat dinyatakan, pemimpin adalah pihak pembuat sejarah atau peristiwa-peristiwa penting yang menciptakan pemimpin. Realitas tertentu lebih kompleks daripada jawaban yang diberikan dengan kedua pandangan tersebut melihat sejarah sebagai produk perbuatan pemimpin yang luar biasa mungkin lebih muda daripada melihat sejarah sebagi produk berbagai faktor sosial, ekonomi, politik. Namun tepat kalau dikatan sejarah merupakan hasil interaksi anatara faktor tersebut dan hal ini lebih sukar untuk memahaminya.[44]

b. Merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan

Langkah kedua dalam strategi komunikasi politik adalah merawat ketokohan dan memantapkan kelembagan. Artimya, ketokohan politikus dan kemantapan lembaga politiknya dalam masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam berkomunikasi

[43] Ardial,*Komunikasi Politik,* (Jakarta Barat: PT Indeks, 2010),73
[44]*Ibid,* 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode, dan memilih media politik yang tepat.[45]

Ketokohan adalah orang yang memiliki kreadibilitas, daya tarik, dan kekuasaan, menurut Rahmat menyebutkannya *ethos.* Dengan kata lain ketokohan adalah *ethos,* yaitu gabungan antara kredibilitas, atraksi dan kekuasaan. Dimensi ethos yang paling relevan disini ialah kredibilitas, yaitu keahlian komunkator (pemimpin) atau kepercayaan kita kepada beliau. Apabila pemimpin memiliki tiga hal yang ini (kredibilitas, raksi, dan kekuasaan), maka ketokohannya dapat disebut juga sebagai tokoh utama pemimpin politik.

Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa pemberi suara dalam pemilihan umum cenderung menjatuhkan pilihannya kepahlawan politik, yaitu kandidat yang sesuai dengan citra jabatan ideal baginya. Citra jabatan ideal yang dimaksud itu ialah politikus yang memilki ketokohan, karena mempunyai sifat-sifat utama seperti kecakapan, kedewasaan, kejujuran, keberanian, dan sebagainya. Hal ini merupakan sifat-sifat kepahlawanan politik.

Dengan demikian pahlawan politi memilki daya tarik tersendiri, yang dalam proses komunikasi politik untuk mempengaruhi khalayak, terutama calon pemilih. Tokoh politik yang disebut sebagai

[45]*Ibid*, hal. 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pahlawan politik pada dasarnya adalah pemimpin formal atau informal, yang mendapat kepercayaan dari publik atau khalayak.[46]

c. Menciptakan kebersamaan

Langkah strategi yang ketiga yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi politik adalah menciptakan kebersamaan antara politikus dengan khalayak (rakyat) dengan cara mengenal khalayal (rakyat) dan menyusun pesan yang *homofilis.* Hal itu dibutuhkan agar komunikator politik dapat melakukan empati. Komunikasi akan lebih efektif pada kondisi homofili daripada heterofili. Suasana *homofilis* yang harus diciptakan adalah persamaan bahasa (simbol komunikasi), persamaan busana, persamaan kepentingan dengan khalayak, terutama mengenai pesan politik, metode, dan media politik.

Namun, yang sangat penting adalah siapa tokoh yang melakukan komunikasi kepada khalayak. Artinya, politikus atau aktivis telah memiliki banyak persamaan dengan khalayaknya. Homiofili merupakan salah satu syarat membangun dan merawat ketikohan bagi politikus, aktivis, dan professional sebagai komunikator politik. Untuk menciptakan homofili dan melakukan empati melalui persamaan kepentingan tersebut, komunikator politik harus terlebih dahulu mengenal, mengerti, dan memahami daya tangkal dan daya serap khalayak, baik bersifat psikologis maupun bersifat sosio-budaya.

[46]*Ibid*, Hal. 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini memerlukan berbagai aktivitas seperti penjajakan dan survey penelitian.[47]

C. BIROKRASI PEMERINTAHAN

1. Kinerja dan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan

Pemerintah dengan seluruh jajarannya yang secara populer dikenal dengan istilah birokrasi, memegang peranan yang dominan, untuk tidak mengatakan menentukan, dalam mengambil langkah-langkah guna mewujudkan proses administrasi negara sebagai wahana mencapai tujuan nasional. Dominannya posisi dan peran birokrasi pemerintah dalam ke-hidupan suatu masyarakat bangsa menuntut agar birokrasi tersebut mampu mengemban misi, menyelenggarakan fungsi dan menjalankan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dengan tingkat efisiensi, efektivitas yang sen'nggi mungkin dibarengi dengan orientasi pelayanan, bukan orientasi kekuasaan, dan menampilkan perilaku yang fungsional.[48]

Peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya-upaya perwujudan ke arah *goodgovernance* dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasipenyelenggaraan negara dan bersamaan dengan itu

[47] Ardial,*Komunikasi Politik,* (Jakarta Barat: PT Indeks, 2010), 84-85
[48]Sondang P.Siagian, *Patologi Birokrasi: Analisis Administrasi dan Terapinya,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 5-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan upaya pembenahan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terwujud *goodgoverment.*[49]

Sebagaimana diuraikan di depan bahwa bahasan tentang birokrasi yang dimaksud adalah birokrasi pemerintah, sedangkan kinerja atau performance yang dimaksud adalah kinerja individu, kelompok dan institusi. Kinerja individu dapat dilihat dari keterampilannya, kecakapan praktisnya, kompetensinya, pengetahuannya, informasinya, kebijakannya, kreativitasnya, moralitasnya dan Iain-lain. Kinerja kelompok dilihat dari aspek kerja samanya, keutuhannya, kedisiplinannya, legalitasnya dan Iain-lain. Sedangkan kinerja institusi dapat dilihat dari hubungannya dengan institusi lain, fleksibilitasnya, adaptabilitasnya, pemecahan konflik dan Iain-lain.

Selanjutnya Lembaga Administrasi Negara (LAN), merumuskan bahwa yang dimaksud dengan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.[12]

Negara pada hakekatnya sebagai suatu organisasi. Dalam pengertian-nya sebagai suatu organisasi, maka didalamnya terkandung adanya aktivitas penyelenggaraan atau dengan kata lain kegiatan administrasi. Administrasi lekat sebagai sebuah piranti lunak dari

[49] Anonimus, *Acuntabilitas dan Good Governance,* (Jakarta: Lembaga Admisnistrasi Lembaga dan Badan Pengawasan Pembangunan 2000), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan bermacam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.[50]

Mesin administrasi pemerintah dijalankan di atas aturan dan hukum. Tanpa aturan atau hukum administrasi pemerintah tidak mampu me-nunjukkan kinerja yang efektif dan bersih. Jika administrasi publik dikerjakan di luar tatanan aturan formal, maka administrasi pemerintah tidak lagi bisa menjamin terselenggaranya kinerja yang bersih. Dengan hukum dan peraruran administrasi, pemerintah melakukan impersonalitas terhadap bermacam-macam kepentingan orang-orang yang diatur dan dilayani.[51]

Kegiatan tersebut dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan negara. Keberhasil-an dalam mencapai tujuan tersebut akan sangat tergantung pada fungsi, peran, kemampuan dan kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.Menurut Denhard, sebagaimana dikutip Tamin, kinerja birokrasi memiliki acuan tugas:

a) Komitmen terhadap nilai-nilai sosial politik yang telah disepakati bersama *(publicly defined societal values)* dan tujuan publik *(publicpurpose).*
b) Implementasi nilai-nilai sosial politik yang berdasarkan etika dalam tatanan manajemen publik *(provide an ethical basis of public management),*

[50] Faisal Tamin, *Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Administrasi Negara,* (Jakarta: Belantika, 2004), 35.
[51] Miftah Thoha, *Pembangunan Organisasi, Proses Diagnose dan Intervensi,* 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Realisasi nilai-nilai sosial politik *(exercising social political values).*

d) Penekananpada pekerjaan kebijakan publik dalam rangka pelaksana-an mandat pemerintah *(emphasis on public policy in carrying out mandateof government).*

e) Keterlibatan dalam pelayanan publik *(involvement overall quality of publicservices).*

f) Bekerja dalam rangka penanganan kepentingan umum *(operate in publicinterest)*.[52]

Dalam pelaksanaannya kinerja birokrasi pemerintah tersebut diperlukan organisasi pemerintah yang solid dan kinerja tinggi. Demikian juga termasuk aparatur negaranya masing-masing mau tidak mau harus mampu berlari dengan lompatan berkecepatan tinggi secara terukur, rasional dan realitis dalam keseluruhan kreatifitas dan inovasinya.

Dengan demikian kinerja birokrasi yang semula sebagai pusat kekuasaan *(the only power center)* konstilasinya berubah menjadi kekuasaan ada ditangan rakyat. Dengan demikian jika kegiatan birokrasi pemerintah tidak lagi cocok dengan keinginan rakyat, atau melanggar aspirasi rakyat, maka birokrasi harus mau mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Jika akuntabilitas ini benar-benar dikerjakan oleh birokrasi pemerintah, maka transparansi, keterbukaan, dan kejujuran akan diperlihatkan oleh kinerja birokrasi pemerintah.[53]

---

[52] Faisal Tamin, *Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Administrasi Negara,* 65-65.
[53] Miftah Thoha, *Pembangunan Organisasi, Proses Diagnose dan Intervensi,* 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat sekarang ini, perlunya akuntabilitas semakin mencuat dengan tingginya tuntutan untuk menciptakan suatu penyelenggaraan kepemerintahan yang baik *(good governance).* Guna melaksanakan *goodgovernance* tersebut, pemerintah yang didukung oleh aparatur negara ataubirokrat profesional karir, yaitu Pegawai Negeri Sipil, yang harus netral, kompeten, sejahtera, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada negara, pemerintah dan masyarakat, serta bersatu padu *(solidarity and solidity),* bermental baik, berwibawa, kuat, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu memperbaiki dirinya dalam memberikan pelayanan kepada negara dan masyarakatnya.[54]

Pelayanan yang dimaksudkan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain, atau suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan oleh orang lain. Hal ini mengandung pengertian bahwa di samping melaksanakan pemberian pelayanan, maka termasuk juga pelayanan dalam penanganan terhadap berbagai keluhan dan pengaduan orang lain dan masyarakat. Dengan demikian predikat yang diberikan masyarakat terhadap pengertian birokrasi yang negatif tidak tepat, apabila kinerja birokrasi tersebut melakukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik *(good governance).*

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik, terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, kinerja aparatur negara perlu

[54] Masyhudi, *Kinerja Birokrasi Pemerintah dalam Pelayanan Kepada Publik,* Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol VI, No. 1, Juni 2005, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditingkatkan melalui pembinaan aparatur yang etis, bermoral, berdisiplin, profesional, produktif dan bertanggung jawab.[32] Selain dari pada itu pembinaan juga diarahkan bagi terciptanya aparatur yang mempunyai mentalitas dan sensitivitas yang tinggi pada lingkup kerjanya.

Selain yang disebutkan di atas, Era sekarang yang dihadapi oleh birokrasi pemerintahan bukan lagi hanya tantangan tetapi sudah meningkat menjadi tuntutan yang sifat pekerjaannyapun juga sudah berubah, dulunya jalur struktural dan hirarki mutlak dilaksanakan secara ketat, tetapi sekarang harus adaptif, fleksibel, bersifat mendadak dan cepat.Tantangan dan tuntutan yang dihadapi birokrasi di depan adalah meliputi:

a) Perubahan sosial yang terjadi begitu cepat di sekitar kita.
b) Kemajuan tehnologi dan informasi dalam management organisasi perkantoran.
c) Kemajuan sosial ekonomi yang meluas sehingga sangat membutuhkan peran birokrasi handal dan mumpuni.
d) *Expectancy* measyarakat yang semakin tinggi, karena terjadinya ledakanwawasan intelektual edukasi mereka serta pengaruh konsumsi global.
e) Meningkatnya daya kritis dari iklim demokrasi, desentralisasi dan *goodgovernance* yang kita anut bersama, sehingga tidak toleran lagi padaketerbatasan, ketidakmampuan, apalagi penyelewenangan birokrasi, dan sebagainya.[55]

[55] Faisal Tamin, *Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Administrasi Negara,* 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan yang demikian itu tentu harus dapat direspon oleh birokrasi aparatur negara dengan melaksanakan pelayanan yang prima tersebut. Pelayanan prima (excellent service) adalah pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Dalam prakteknya pemberian pelayanan tersebut adalah bagaimana harus membantu, menyediakan, menyiapkan, mengurus, memenuhi apa yang diperlukan oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu birokrasi aparatur negara sebagai abdi negara, yang memang tugas utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam memberikan pelayanan diperlukan adanya perubahan pola pikir sesuai dengan perkembangan dinamika dan tuntutan masyarakat sekarang. Perubahan-perubahan kinerja birokrasi aparatur negara terutama dalam pemberian pelayanan kepada publik atau masyarakat pada umumnya tersebut adalah:

a) Merubah sikap mental dari keadaan yang suka dilayani menjadi lebih suka melayani.
b) Memberikan pelayanan secara humanis baik internal maupun eksternal.
c) Memaharni tugas dan fungsinya, agar pelayanan prima berjalan dengan baik.
d) Merasa memiliki dan mencintai pekerjaannya dalam pengabdiannya kepada masyarakat.[56]

[56] Masyhudi, *Kinerja Birokrasi Pemerintah dalam Pelayanan Kepada Publik,* 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Mematuhi dan menjalankan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku[57]

2. *Good Governance* Sebagai Tujuan Reformasi Birokrasi

Arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsonal dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.[58] Selain itu kerja pemerintah dapat disebut *good governance* jika sudah melaksanakan transparansi, akuntabilitas, punya daya tanggap yang tinggi terhadap tuntunan masyarakat, menegakkan hukum, profesional, dan yang paling penting bebas KKN.[59]

Menurut Horby[60] istilah *good governance* memfokuskan diri pada tindakan, fakta atau tingkah laku *governing*, yakni mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam suatu negara.

---

[57] Fudloli, *Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,* (Jakarta: Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Depag RI, 2004), 31.

[58] J. Kunjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara,* (Bandung: Alumni, 1979), 33-34. Dalam Mashun Mukromin Ahmad, *Reformasi Birokrasi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Batang (Kepemimpinan Yoyok Riyo Sudibyo, Periode 2012-2017),* Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 15. OCED dan World Bank mensinonimkan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi, dan pasar yang efisien, pengindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legaland political framework* bagi tumbuhnya kewirswastaan. Lihat, Mardiasmo, *Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah,* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 23.

[59] Sarundjang, *Babak Baru Sistem Pemerintah Daerah,* (Jakarta: Kata hasta Pustaka, 2005), 273.

[60] Martin Jimung, *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 2005), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu, *good governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku kehidupan keseharian.

Agus Dwiyanto[61] menjelaskan beberapa prinsip yang harus diterapkan demi mewujudkan *good governance*, dalam hal ini penulis menggunakan tiga prinsip utama *good governance*, yatu:

1. Transparansi

   Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan di mana segalaaspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh pengguna dan *stake holders* yang mebutuhkan. Karena itu, setidaknya ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik. Indikator pertama adalah mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator kedua dari transparansi menunjuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stake holders* yang lain. Dan yang ketiga adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.[62]

2. Partisipasi

   Dalam hal pelayanan publik, prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan *good governance*, ini juga sejalan dengan pandangan

[61] 2008), 102.
[62] Agus Dwiyanto, *Mewujudkan good governance Melayani Publik,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru yang berkembang di dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan *(custumer)* melainkan sebagai warga negara yang memiliki negara dan sekaligus pemerintahan yang ada di dalamnya *(owner)*. Pergesereran paradigma ini mengisyaratkan bahwa masyarakat sejak awal harus dilibatkan dalam merumuskan berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik, misalnya mengenai jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, cara terbaik untuk menyelenggarakan pelayanan publik, mekanisme untuk mengawasi untuk mengawasi proses pelayanan, dan yang tak kalah pentingnya adalah mekanisme untuk mengevaluasi pelayanan.

3. Akuntabilitas

Untuk menciptakan *good governance* yang salah satunya ditunjukkan dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran di antara pegawai pemerintah mengenai pentingnya mengubah citra pelayanan publik sangat diperlukan. Akuntabilitas, *(accountability)* adalah suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa *good governance* adalah proses penyelenggaran pemerintahan melalui kekuasaan negara dalam pelaksanaan *public good and service* yang disebut dengan tatanan pemerintahan yang baik, yaitu *governance*. Pemerintahan yang baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai pengertian sebagai proses dalam pengambilan keputusan terhadap *equality, poverty,* dan *quality to live* serta memberikan pengertian terhadap proses keputusan dalam formulasi kebijakan.[63]

Pengertian di atas memberikan pemahaman, bahwa *good governance* merupakan sebuah konstruksi yang dibangun atas dasar reformasi birokrasi pemerintahan. Penyelenggaraan negara dengan pembangunan *good governance* melalui proses pelayanan publik dan perbaikan terhadap organisasi birokrasi. Hanya saja, dalam perkembangan pelayanan dewasa ini, konsep *good governance* belum sepenuhnya dipahami secara spesifik dan substantif dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi. Paradigma yang keliru dari penyelenggara negara, termasuk pemahaman pemimpin dalam prinsip-prinsip *good governance* yang belum diterapkan secara maksimal dalam penerapan implementasi kebijakan. Sehingga, tujuan secara substantif masih belum dirasakan oleh elemen *stakeholder* dalam organisasi birokasi.[64]

D. TEORI KONSTRUKSI SOSIAL: MEMAHAMI DAKWAH POLITIK SUYOTO

Dua istilah dalam sosiologi pengetahuan Berger adalah kenyataan dan pengetahuan. Berger dan Luckmann mulai menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman kenyataan dan pengetahuan. Realitas diartikan

---

[63] Tedi Sudrajat, *Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara,* Jurnal Dinamika Hukum, vol. 9 (2) Mei 2009, 120-121

[64] Hayat, *Konsep Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi: Aktualisasi Pemimpin dalam Pelayanan Publik Menuju Good Governance*, Universiatas Malang, Jurnal Borneo Administrator, Vol 10, No. 10, 2014, 77-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai suatu kualitas yang terdapat didalam realitas-realitasyang diakui sebagai memiliki keberadaan *(Being)* yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.[65]

Menurut Berger dan Luckmann, terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas obyektif. Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui peoses intrnalisasi. Realitas subyektif yang dimilik masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkandiri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasiitulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan obyektivikasi dan memunculkan sebuah konstruksi realitas obyektif yang baru.[66] sedangkan realitas ooyektif dimaknai sebagai fakta sosial. Disamping itu realitas obyektif merupkan suatu kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yangkesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.

Berger dan Luckmann mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif,namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang

[65] Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190), 1.
[66] Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Pendek kata, Berger dan Luckmann mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.[67]

Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. Dengan demikian, agama mengalami proses objektivasi, seperti ketika agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi kedalam diri individu,sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat.[68]

Ketika msyarakat dipandang sebagai sebuah kenyataan ganda, objektif dan subjektif maka ia berproses melalui tiga momen dialektis, yakni

---

[67] Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa:Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*45, (Jakarta: Kencana, 2008), 14-15.

[68] Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190), 33-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri.

Masyarakat yang hidup dalam konteks sosial tertentu, melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Dengan proses interaksi, masyarakat memiliki dimensi kenyataan sosial ganda yang bisa saling membangun, namun sebaliknya juga bisa saling meruntuhkan. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi, dan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis.

Berger dan Luckmann lebih mengedepankan pandangan dialektik ketika melihat hubungan antara manusia dan masyarakat; manusia menciptakan masyarakat demikian pula masyarakat menciptakan manusia yang dikenal dalam istilah eksternalisasi, obyektivikasi dan internalisasi. Cara kerja teori tersebut akan penulis paparkan dalam anlisis penelitian sebagai berikut;

1. Eksternalisasi

   Ekternalisasi adalah dimana individu berusaha untuk beradaptasi dengan lingkunagnnya, dalam momen adaptasi tersebut sarana yang digunakan bisa berupa bahasa maupun tindakan. Pada momen ini terkadang, terkadang dijumpai orang yang mampu beradaptasi dan juga mereka yang tidak mampu beradaptasi. Penerimaan dan penolakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung dari apakah individu tersebut mampu atau tidak beradaptasi dengan dunia sosio-kulturnya tersebut.

Dalam penelitian ini, proses sosial yang terjadi dari interaksi antara Bupati Bojonegoro Suyoto dan anggota politik birokrasi pemerintahan Bojonegoro menjadi sorotan objek penelitian ini. Interaksi antara Suyoto dan masyarakat dipandang sebagai proses eksternalisasi dalam konstruksi birokrasi pemerintahan. Masing-masing dari kedua elemen masyarakat (Suyoto dan anggota yang dipimpinnya) saling mengekspresikan diri masing-masing dalam wadah interaksi sosial. Intensitas hubungan ini berkonsekuensi semakin kayanya informasi tentang nilai-nilai ajaran Islam tentang konsep birokrasi pemerintahan yang bersih dan baik dalam anggota politik birokrasi tersebut. Proses inilah yang dalam teori Berger dan Luckmann disebut sebagai proses eksternalisasi.

2. Objektivasi

Objektivasi adalah dimana individu akan berusaha untuk berinteraksi dengan dunia sosio-kulturnya. Di dalam objektivasi, realitas sosial tersebut seakan-akan berada di luar diri manusia. Ia menjadi realitas objektif, sehingga dirasa akan ada dua realitas yakni realitas diri yang subjektif dan realitas yang berada di luar diri yang objektif. Dua realitas tersebut membentuk jaringan intersubjektif melalui proses untuk membangun kesadaran menjadi tindakan sehingga keduanya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan dan legitimasi. Dalam pelembagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelembagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.[69]

Dalam penelitian ini, sebagai gambaran proses objektivasi bahwa, Bupati Bojonegoro Suyoto memiliki sejumlah konsep dakwah politik yang kemudian terkumpul menjadi teori untuk mewujudkan konstruksi (anggota politik) birokrasi pemerintah Bojonegoro. Teori terebut, selalu diupayakan untuk ditransformasikan pada anggota birokrasi. Transformasi nilai-nilai yang diupayakan, baik yang berupa ucapan maupun tindakan dari Suyoto ini kemudian menjadi sebuah kenyataan obyektif. Secara perlahan dan alamiah, nilai-nilai yang ditanamkan tersebut benar-benar menjadi sebuah kenyataan obyektif. Proses inilah yang kemudian disebut sebagai obyektifikasi.

3. Internalisasi

Internalisasi adalah individu-individu sebagai kenyataan subyektif menafsirkan realitas sosio-kulturnya. Atau peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif kedalam struktur-struktur dunia subyektif. Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat obyektif dan kemudian

[69] Nur Syam, *Islam Pesisir,* (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan direalisasikan secara subyektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup seorang individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap indvidu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder.[70]

Dalam penelitian ini, proses kontruksi yang terakhir adalah internalisasi yakni, nilai-nilai dan bentuk apa saja yang telah menjadi kenyataan obyektif dalam anggota politik birokrasi benar-benar menjadi referensi utama. Dalam konteks membangun birokrasi pemerintahan Bojonegoro yang bersih dan baik ini, konfigurasi Bupati di tengah dinamika kehidupan sosial politik birokrasi benar-benar penting

Peneliti memilih teori konstruksi sosial atas realitas Peter Bergerdan Thomas Lukhmann karena pada dasarnya konsep yang dikemukakan dalam teori tersebut sangat relevan dengan realitas yang hendak dikaji oleh peneliti. Peneliti hendak melakukan pengkajian secara mendalam terhadap dakwah politik yang dibangun oleh Bupati Bojonegoro Suyoto di birokrasi pemerintahan Bojonegoro. Seperti yang dikatakan Berger, bahwa pada dasarnya realitas yang terdapat di dalam masyarakat adalah dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal

[70] Soaialisasi Primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer. Lihat, Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190) 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini realitas terbentuknya tatanan birokrasi pemerintahan oleh para anggotapolitisi dan Suyoto dibangun secara simultan sebagaimana digambarkan Berger melalui *triad* dialektikanya yaitu melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DAKWAH POLITIK SUYOTO

A. BOJONEGORO : LOKASI DAKWAH POLITIK SUYOTO

1. Profil Bojonegoro

Dinamika sosial, ekonomi, budaya dan politik Kabupaten Bojonegoro sangat terkait dengan keberadaan Bengawan Solo, sungai terpanjang di pulai Jawa. Bojongoro yang dibelah oleh sungai besar ini sehingga dibedakan menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Utara dan Selatan serta dua daerah Jipang Hulu (sekarang Jipang Hulu yang berada di bawah pemerintahan desa Ngelo Kec. Margomulyo wilayah bagian barat Kabupaten Bojonegoro) dan Jipang Hilir yang dikelilingi Gunung Kendang dan Gunung Pandan. Jalur sungai tersebut menyebabkan Bojonegoro menjadi rebutan pada jaman kerajaan hingga jaman kolonialisme.[1]

Pergantian nama Bojonegoro menjadi saksi atas berbagai kepentingan para penguasa tersebut. Pada Masa Majapahit bernama Matahun, di masa Demak bernama Jipang dan zaman Mataram bernama Rajekwesi. Akibat perang Diponegoro Rajekwesi rusak parah dan dibangun kembali serta diubah namanya menjadi Bojonegoro hingga sekarang. Daerah ini merupakan penghasil kayu jati. Pada zaman prasejarah, peradaban manusia zaman batu teridentifikasi di kawasan ini. Hal ini dari penemuan 47 kuburan Batu diperbatasan Blora – Tuban – Bojonegoro, sekarang masuk wilayah

[1] Suyanto, (Ed), "Indeks Kebahagiaan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro" (Universitas Surabaya, Desember 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara Kedawen dan Senori Tuban ditemukan 47 kuburan batu. Mereka diyakini sebagai sekelompok orang yang disebut Kalang yang hidupnya di tengah lebatnya hutan dan berlindung di gua-gua. Dan kemungkinan mereka termasuk dari rumpun Malaya-Polynesian awal yang hidup pada masa megalitikum suatu zaman yang menhasilkan bangunan-bangunan batu besar yang berkembang setelah zaman kehidupan bercocok tanam meluas.[2]

Pada awal perkembangannya, Bojonegoro dipengaruhi oleh Kerajaan Majapahit, yang merupakan Kerajaan Hindu. Prinsip hidup yang masih tertanam sejak zaman Majapahit adalah *"sepi ing pamrih, rame ing gawe"*. Pada zaman Majapahit, Bengawan Solo berperan sebagai jalur transportasi dan perdagangan yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bojonegoro merupakan salah satu tempat persinggahan. Salah satu buktinya adalah penemuan kapal karam di Bengawan Solo, tepatnya di Desa Ngeraho, Kalitidu. Di kapal dengan panjang sekitar 22 meter dan lebar 5 meter tersebut ditemukan uang logam dengan huruf China, bertuliskan pada tahun 1810.

Civilization di Bojonegoro mengalami titik perubahan pada saat kemunculan kerajaan Demak, dengan pengaruh Islamnya. Bojonegoro masuk wilayah kerajaan Demak dengan penguasa pertamanya Raden Patah Senapati Jinbun Adipati Bintoro. Raden Patah mengangkat putranya Raden Sekar Kusuma yang dikenal dengan Pangeran Seda Lepen menjadi Adipati di Jipang. Pusat Kadipaten Jipang adalah Blora Selatan antara Cepu dan kota Blora sekarang. Bengawan Solo menjadi saksi atas suksesi Kerajaan Demak

[2] *Ibid*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada 1552., ketika Raden Patah lengser dari kekuasaan. Saat itu Bojonegoro masuk Kerajaan Demak dipegang oleh Pangeran Sekar, adik Raden Patah. Perebutan kekuasaan ini menyebabkan Pangeran Sekar terbunuh di tepi bengawan Solo, sehingga disebut Bengawan Sedo Lepen (meninggal di sungai). Bengawan Solo pun menjadi saksi perebutan kekuasaan antara Mataram dan Pajang, yaitu antara Sultan Hadiwijaya dan Aria Penangsang.

Di zaman kolonial, sungai Bengawan Solo menjadi ajang perebutan kekuasaan. Sebelumnya ada dua aliran yang bertemu di Bajarrejo. Untuk menguasai jalur sungai tersebut, Belanda menutup jalur sungai di sebelah selatan kota yang melewati Klangon. Saat itu, aktivitas ekonomi mulai bergesar dari kawasan Klangon merupakah pusat pemerintahan Kabupaten Jipang, digantikan kawasan utara yang sudah disiapkan, termasuk kawasan Pecinan di Jl. Hayam Wuruk, kawasan Kampung Arab di Kauman atau Masjid Darussalam. Barak-barak militer waktu itu bertempat di kawasan Polres. Pusat Pemerintahan Belanda saat itu terdapat Jl. Basuki Rahmat, saat ini dipakai Satlantas.[3]

Hari jadi Kabupaten Bojonegoro ditetapkan pada tanggal 20 Oktober, pada 1677, terjadi penyerahan kekuasaan oleh Amangkurat, Raja Mataram, kepada VOC Belanda. Wilayah Bojonegoro kemudian ditetapkan sebagai Kabupaten dengan Wedana Bupati I yang berkedudukan di Jipang mulai 20 Oktober 1677. Selanjutnya, pusat pemerintahan Kabupaten Jipang

[3] Suyanto, (Ed), *Indeks Kebahagiaan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro,* 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipindah dari Padangan ke Desa Rajekwesi, 10 km di sebelah selatan Kota Bojonegoro.[4]

Sejarah Bojonegoro pun tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan ladang minyak. Keberadaan minyak di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur berawal dari ditemukannya sumur minyak oleh Adrian Stoop, seorang sarjana pertambangan lulusan Sekolah Tinggi Teknik Delft Belanda pada tahun 1893 di Ledok, Desa Wonocolo Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro yang berbatasan dengan Cepu, Jawa Tengah. Pada tahun yang sama, Adrian membangun kilang minyak di Cepu, daerah Ledok itu berada. Untuk memperkuat kilang minyaknya tersebut, Adrian Stoop menggandeng perusahaan Dordtsche Petroleum Maatschappij (DPM) yang berdiri pada 1906. DPM adalah perusahaan asing pertama di Indonesia yang mengelola minyak dan sekaligus sebagai titik awal pertambangan minyak di Jawa. Pada 1912, perusahaan ini diambil alih Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM), yang merupakan anak perusahaan Royal Dutch Shell.

Pada zaman kemerdekaan, terjadi nasionalisasi, BPM berubah menjadi PTMRI, Permigan, Pusdik Migas, PPTMGB Lemigas, PPT Migas, terakhir menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan Minyak Bumi dan Gas (Pusdiklat Migas). Saat ini Pusdiklat Migas telah berubah menjadi satu-satunya lembaga pendidikan tentang minyak di Indonesia, yaitu Akademi Minyak dan Gas (AKAMIGAS). Perubahan drastis dari tambang migas yang pertama kali menghasilkan minyak di pulau Jawa menjadi AKAMIGAS

[4]*Ibid,* 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan menipisnya cadangan-cadangan minyak di ladang minyak Cepu. Dengan me nipisnya ladang minyak tersebut., mengakibatkan ongkos produksi lebih besar dibandingkan keuntungan yang doperoleh. Oleh karena itu, alat-alat berat yang dulu dipakai untuk eksploitasi minyak saat ini hanya digunakan sebagai alat peraga pendidikan di AKAMIGAS.

Pada tahun 1987, berdasarkan SK Menteri Perambangan dan Energi No. 0177/K/1987 tanggal 5 Maret 1987, Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) seluas 973 km yang semula dikelola oleh PPT Migas diserahkan kepada Pertamina UEP III lapangan Cepu. Wilayah tersebut terletak di 4 Kabupaten, yaitu Grobogan, Blora, Bojonegoro dan Tuban. Dua kabupaten terakhir berada di Jawa Timur.

Melalui penyerahan WKP ini, sejumlah lapangan minyak, yaitu Kawengan, Lapangan Ledok, Desa Wonocolo Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro dan Nglobo/Semanggi yang terdiri dari 519 sumur minyak berpindah ke tangan Pertamina UEP III. Kebijakan pemerintah tersebut bersumber pada Undang-Undang No. 44 tahun 1960 jo UU No. 88 tahun 1971. Dalam UU tersebut ditetapkan bahwa kuasa pertambangan minyak dan gas di Indonesia diberikan kepada Pertamina sebagai satu-satunya BUMN yang mengelola Migas. Pertamnia UEP III Cepu sendiri mengebor ladang minyak pertama kali pada tahun 1989 di Desa Jepon. Kec. Randublatung Kab. Blora Jawa Tengah.[5]

[5] Suyanto, (Ed), *Indeks Kebahagiaan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro,* 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Geografis

Secara geografis, Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi 6 59' sampai dengan 7 37' Lintang Selatan dan 111 5' sampai dengan 112 09' Bujur Timur. Secara administrasi, Kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, jarak tempuh dari Ibukota Provinsi Surabaya sejauh 110 km. Luas Kabupaten Bojonegoro mencapai 2,307.[6]

Secara administratif, Kabupaten Bojonegoro terbagi dalam 28 kecamatan, 419 desa dan 11 kelurahan. Gayam merupakan kecamatan baru pada 2012. Pemekaran tersebut dilakukan karena jumlah desanya cukup banyak, yaitu 12 desa. Selain itu, beberapa desa yang ada di kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tercatat memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlahnya melebihi rata-rata dibanding desa lainnya. Pasalnya, tingginya alokasi tersebut salah satunya karena di desa-desa itu berdekatan langsung dengan lapangan minyak Banyuurip, Blok Cepu.

Bojonegoro dikelilingi bukit-bukit kapur dan hutan jati yang sangat luas, serta dilewati oleh Sungai Bengawan Solo. Dulu hutan Bojonegoro penuh dengan pohon jati besar-besar. Keberadaan hujan jati ditengarai sudah ada sejak abad ke-16. Orang sampai takut lewat hutan itu di malam hari. Tidak mengherankan, Bojonegoro dulu sempat dijuluki sebagai kota mati karena sangat sepi. Pada zaman kolonial, hutan jati tersebut digunakan sebagai pemasok kayu untuk pembuatan kapal. Selanjutnya, hutan jati

[6] Suyanto, (Ed), *Indeks Kebahagiaan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro,* Universitas Surabaya, Desember 2014, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dikelola oelh Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. Pada 2012, luas hutan dan luas sawah cukup berimbang.[7]

Sebagian besar tanah di Bojonegoro adalah jenis Gurasol (38). Tanah ini terdapat di daerah yang mempunyai curah hujan antara 1000-2000 mm/tahun. Bahan induk bervariasi yaitu marl, batu, liat, tuff vulkanik dan bantuan aluvium yang berliat dan berkembang pada wilayah berombak, bergelombang, yang umumnya pada daerah dengan ketinggian dari permukaan laut kurang dari 200 m. warna tanah adalah kelabu sampai hitam kandungan liatnya cukup tinggi. Vegetasi yang dominan adalah savana dan hutan daratan rendah. Vegetasi penutup tegalan ini yaitu pohon pisang, pepaya dan rerumputan. Sebagian besar tanah di daerah ini banyak mengandung kapur sehingga kurang begitu subur.

Permukaan tanah di Kabupaten Bojonegoro rata-rata relatif rendah, yaitu berada pada ketinggian antara 25 m – 500 m dari permukaan laut dengan kemiringan rata-rata mencapai kurang dari 2%, serta dengan curah hujan di wilayah ini umumnya tidak merata yaitu berkisar di antara 1.500 mm – 2.500 mm pertahun. Jenis tanah di Kabupaten Bojonegoro pada umumnya berupa Grumusol, yaitu tanah dari material halus berlempung yang berasal dari batu kapur dan batuan lempung. Suhu udara rata-rata 27, 80 C dengan rentang antara 24,20-31,4 C, kecepatan angin rata-rata 19% menyebabkan Bojonegoro terkenal akan produksi tembakau jenis virginia.[8]

---

[7] Suyanto, (Ed), *Indeks Kebahagiaan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro,* 12.
[8] *Ibid,* 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kawasan Bojonegoro yang mempunyai luas 2.307 km terbelah oleh Sungai Bengawan Solo. Bagian utara merupakan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang cukup subur untuk pertanian namun rawan terhadap banjir. Bagian selatan merupakan rangkaian Pegunungan Kendeng, yang kaya melanda DAS Sungai Bengawan Solo pada 2013 menempatkan Bojonegoro sebagai kawasan yang paling parah. Tercatat 11.942 rumah, 11 Taman Kanak-kanak, 29 Sekolah Dasar, 6 masjid, 74 mushola 120.940 jalan, dan 3.820 hektar sawah terendam banjir. Sedangkan hewan ternak yang dievaluasi 2.523 sapi dan 1.499 kambing. Sementara korban tewas dari Bojonegoro mencapai empat orang dari 11 orang seluruh korban banjir DAS Bengawan Solo, Bojonegoro pernah menyandang julukan kota mati pada tahun 2007. Hal ini karena sebagian besar kota Bojonegoro tenggelam, di pusat kota Bojonegoro ketinggian air mencapai 1 meter dan baru surut kembali setelah 2 pekan sehingga tidak aktivitas di seluruh penjuru kota.[9]

Kekeringan yang melanda Bojonegoro terjadi pada September 2013. Saat itu, jumlah wilayah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 27 Desa di 11 Kecamatan. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meluas selama musim kemarau. Pada tahun 2012 tercatat ada sebanyak 64 desa yang tersebar di 17 Kecamatan. Sebanyak 16 Kecamatan yang mengalami krisis air dan kekeringan, yaitu di Kecamatan Temayang, Sugihwaras, Kedungadem, Sukosewu, Tambakrejo, Balen, Kasiman, Ngasem, Baureno, Trucuk, Kepohbaru, Dander, Ngraho, Bubuan, Malo dan

[9]*Ibid,* 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tambakrejo. Sebagian besar, daerah yang mengalami krisis air dan kekeringan lokasinya jauh dari sungai Bengawan Solo.

3. Demografis

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada suatu wilayah dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kecenderungan penyebaran penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu sehingga menyebabkan pola penyebaran bervareasi. Kepadatan penduduk yang tinggi pada umumnya dapat dijumpai pada daerah-daerah yang mempunyai aktivitas tinggi, adanya sarana transportasi yang memadai dan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya kepadatan penduduk yang rendah pada umumnya terdapat pada daerah-daerah yang aktivitas ekonomi yang relatif masih rendah dan keadaan sarana transportasi yang masih sulit.[10]

Jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan tiap tahunnya., namun laju pertumbuhan penduduk pelan-pelan mengalami pelambatan, yaitu 1,64 persen di tahun 1990 dan terus melambat hingga terakhir menjadi 0,37 persen di tahun 2010. Pada akhir menjadi 0,37 persen di tahun 2010. Pada akhir 2012 mencapai 1.472.000 jiwa. Jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Kecamatan Ngambon sebesar 13.329 orang.[11]

Jumlah penduduk usia produktif di kabupaten ini cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari tingginya angkatan kerja, yaitu penduduk dengan usia

[10] Buku Profil Kabupaten Bojonegoro, 2012, 21.
[11] Suyanto, (Ed), *Indeks Kebahagiaan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro,* Universitas Surabaya, Desember 2014, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15-64 tahun, baik yang sudah bekerja maupun yang tidak bekerja. Pada 2012, jumlah angkatan kerja mencapai 752 ribu atau 51% dari total populasi. Dari angka tersebut terlihat bahwa Bojonegoro mempunyai sumber daya manusia yang cukup besar.

Sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan. Tahun 2012 jumlah penduduk Bojonegoro yang tinggal di perkotaan diperkirakan mencapai 99.526 jiwa. Tahun sebelumnya penduduk kota sebesar 96.072 jiwa atau meningkat 3.454 jiwa. Dengan kata lain penduduk yang tinggal di kota 6,5%, sedangkan penduduk yang tinggal di desa sebanyak 93,5%. Oleh karena itu keberadaan sektor pertanian sangat penting bagi masyarakat Bojonegoro.[12]

[12] *Ibid,* 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah Rumah Tangga, Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bojonegoro 2011.

NO	KECAMATAN	JUMLAH RT	JUMLAH PENDUDUK	LUAS (Km)	KWPADATAN PENDUDUK /Km
1	Margomulyo	7 294	24 854	139,68	178
2	Ngraho	13 756	50 940	71,48	713
3	Tambakrejo	18 294	63 204	209,52	302
4	Ngmabon	3 859	12 943	48,65	266
5	Sekar	8 782	29 936	130,24	230
6	Bubulan	4 675	16 300	84,73	192
7	Gondang	8 274	27 533	107,01	257
8	Temayang	11 552	39 986	124,67	321
9	Sugihwaras	15 065	51 298	87,15	589
10	Kedungadem	25 328	90 253	145,15	622
11	Kepohbaru	19 067	71 525	79,64	898
12	Baureno	22 512	87 180	66,37	1 314
13	Kanor	18 589	63 944	59,78	1 070
14	Sumberrejo	23 105	76 888	76,58	1 004
15	Balen	20 463	70 988	60,52	1 173
16	Sukosewu	13 508	46 411	47,48	977
17	Kapas	16 053	55 329	46,38	1 193
18	Bojonegoro	26 454	95 652	25,71	3 720
19	Trucuk	12 498	43 729	36,71	1 191
20	Dander	24 712	90 448	118,36	764
21	Ngasem	24 403	83 027	180,20	461
22	Kalitidu	20 094	71 088	83,01	856
23	Malo	9 540	34 746	65,41	531
24	Purwosari	9 145	32 706	62,32	525
25	Padangan	13 258	49 389	42,00	1 176
26	Kasiman	9 259	34 375	51,80	664
27	Kedewan	3 929	14 641	56,51	259

4. Postur Aparatur Pemerintah (PNS)

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara sebagai abdi masyarakat atau pelayan publik, sedangkan funsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sumber daya manusia yang memadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semakin tinggi pendidikan yang memiliki diharapkan memunculkan PNS yang kompeten dan memiliki integritas tinggi. Sebanyak 59,22 persen PNS di lingkup Pemda Bojonegoro berpendidikan sarjana, dan 23,78 persen masih berpendidikan SMA kebawah. Tabel 2.2.1 menunjukkan bahwa dari 12.202 PNS di Pemkab Bojonegoro, sebanyak 41,35 persen adalah PNS golongan IV, 31,56 persen kategori golongan III, 24,37 persen masih golongan II, dan sisanya 2,71 persen adalah I.[13]

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja. Secara lengkap peraturan daerah tersebut adalah :

a) Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah;
b) Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekda dan Sekwan;
c) Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah dengan 4 staf ahli, 3 asisten dan 10 bagian, yaitu:
    1. Staf Ahli Bidang Pembangunan
    2. Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM

[13] Buku Profil Kabupaten Bojonegoro, 2012, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
4. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
5. Asisten 1 Bidang Pemerintahan
6. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan
7. Asisten 3 bidang Administrasi dan Umum
8. Bagian Perlengkapan
9. Bagian Umum
10. Bagian Pemerintahan
11. Bagian Administrasi Perekonomian
12. Bagian Administrasi Pembangunan
13. Bagian Administrasi Keuangan
14. Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal
15. Bagian Sumber Daya Alam (SDA)
16. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
17. Bagian Humas dan Protokol

2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:
    1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
    2. Inspektorat
    3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)
    4. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
    5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakat (Bakesbangpol)
7. Badan Lingkungan Hidup (BLH)
8. Badan Perijinan
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
10. RSUD Sosodoro Djatikoesoemo
11. RSUD Sumberrejo
12. RSUD Padangan

4. Dinas yang terdiri dari:
    1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
    2. Dinas Perhubungan
    3. Dinas Pariwisata
    4. Dinas Komunikasi dan Informasi
    5. Dinas Pertanian
    6. Dinas Pendidikan
    7. Dinas Peternakan dan Perikanan
    8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
    9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
    10. Dinas Kopersi dan UMKM
    11. Dinas Kebersihan dan Pertanaman
    12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    13. Dinas Pekerjaan Umum
    14. Dinas Kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16. Dinas Pengairan

5. Kantor yang terdiri dari:
   1. Kantor Arsip dan Perpustakaan
   2. Kantor Ketahanan Pangan
   3. Kantor Satpol PP

5. Profil DPRD/Legislatif

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, posisi DPRD ditempatkan sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Sesuai dengan fungsinya, selama kurun waktu tiga tahun (2009-2011), DPRD telah meluncurkan 53 peraturan daerah (bersama Bupati), 60 surat keputusan pimpinan DPRD. Selama kurun waktu tersebut pula DPRD telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 73 tahun dan sebanyak 25 aduan diteruskan ke Bupati.[14]

Tabel Jumlah Anggota DPRD Tahun 2011

NO	PARPOL	JUMLAH
1	PPP	3
2	GOLKAR	7
3	PDI	-

[14] DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam Buku Profil Kabupaten Bojonegoro, Tahun 2019, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	ABRI	-
5	PDI-P	5
6	PKB	5
7	PAN	7
8	PBB	-
9	DEMOKRAT	6
10	PKS	4
11	KARYA PEDULI BANGSA	1
12	REFORMASI	2
13	PKNU	3
14	HANURA	2
15	PNBK	2
16	PKPI	1
17	PARTAI PELOPOR	1
18	GERINDRA	1
TOTAL		50

6. Profil Suyoto

Suyoto atau yang akrab dipanggil Kang Yoto, terlahir dari keluarga yang bercondong pada Muhammadiyah. Fakta tersebut sempat menjadi rintangan kecil ketika Kang Yoto harus berkampanye melawan rival-rivalnya yang mendeklarasikan diri sebagai Nahdlatul Ulama (NU). Seorang warga Muhammadiyah berhasil memenangkan pilkada daerah yang mayoritas warganya merupakan jamaah NU. Tidak tanggung-tanggung, Kang Yoto bahkan terpilih hingga dua periode. Faktor apa yang membuatnya bisa meraih suara di Bojonegoro menjadi manarik untuk dikaji lebih dalam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kang Yoto mengenyam kuliah Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Malang dan melanjutkan studi S2-nya di UMM mengambil jurusan Sosiologi. Walaupun lebih sering berkegiatan di lingkungan Muhammadiyah, Kang Yoto juga aktif di beberapa pengajian NU. Ia dekat dengan beberapa kiai-kiai NU tempat ia mengaji. Kang Yoto menikahi putri seorang kiai NU ketika ia masih menempuh semester 5 di IAIN. Fakta bahwa isterinya ialah putri tokoh besar NU seringkali ia jual untuk membuktikan kadar ke-NU-annya selama kampanye. Selain itu, Kang Yoto juga mempunyai kedekatan personal dengan beberapa kiai NU. Relasi tersebut ia gunakan untuk membangun citra bahwa dirinya seorang "Muhammadiyah-NU". Dengan harapan, para loyalis NU di Bojonegoro menjadi tidak ragu untuk memilihnya sebagai bupati.

Dalam karirnya, Kang Yoto memang lebih banyak berkecimpung di Muhammadiyah. Ia yang lulusan IAIN, selama beberapa tahun menjadi staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Malang. Setelah itu Kang Yoto mendapat tawaran untuk memimpin di Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) yang saat itu kondisinya sangat memprihatinkan. Pada masa awal ia menjabat sebagai rektor di UMG, Kang Yoto banyak berkorban termasuk merelakan gajinya dipotong demi membayar gaji dosen dan karyawan lainnya. Akan tetapi, pada periode 2000 – 2004 kepemimpinan kang Yoto, UMG berhasil tumbuh menjadi salah satu universitas swasta yang layak diperhitungkan.

Nama Suyoto baru muncul di Pilkada 2007. Kang Yoto berpasangan dengan Setyo Hartono yang seorang mantan anggota Tentara Nasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia (TNI). Pasangan tersebut berhasil mendapat suara terbanyak sebesar 279.296 dari jumlah total suara 747.118.[15] Walaupun kemenangan sudah di depan mata, jalan yang mereka lalui untuk menuju kursi kekuasaan tertinggi di Bojonegoro harus tersendat. Hal itu disebabkan adanya kasus yang menyeret sang calon wakil Bupati, terkait masalah perizinannya yang dinilai tidak jelas mengingat saat itu ia masih aktif sebagai Letnan Kolonel di Depertemen Pertahanan (Dephan).[16] Kasus tersebut terimplikasi pada keterlambatan pengesahan mereka. Kasus itupun akhirnya ditutup dan Setyo Hartono tetap mendampingi Kang Yoto.[17] Pasangan tersebut baru disahkan menjadi Bupati dan wakil Bupati Bojonegoro pada 12 Maret 2008.[18]

Kemenangan Kang Yoto dapat dikatakan sebuah kejutan mengingat Suyoto adalah nama yang benar-benar baru di lingkungan Bojonegoro. kharisma seorang Suyoto yang berpadu dengan strategi kampanye yang jitu menjadi kunci utama dalam memenangkan Pilkada Bojonegoro 2007. Padahal salah satu pesaing Kang yoto saat itu ialah calon petahana, yakni HM. Santoso sebagai terdakwa dan dijatuhi vonis 10 tahun penjara pada

---

[15] Dalam, *Pasangan Suyoto-Setyo Hartono Menangi Pilkada Bojonegoro,* Tempo, 17 Desember 2007, diakses pada tanggal 22 Desember 2015, pukul 10.12.

[16] Dalam, *Cawabup Setyo Hartono Diduga Mangkir Dinas,* DetikNews, 12 Desember 2007, diakses apada tanggal 7 Maret 2016, pukul 19.38.

[17] Mayjen TNI Bambang Suranto mengemukakan bahwa sesuai keputusan yang dikeluarkan oleh KPUD, pencalonan Setyo Hartono sebagai calon wakil bupati sudah sah dan sesuai prosedur. Skandal yang terjadi sebelumnya itu berawal dari kecurigaan atas pelanggaran dinas yang dilakukan oleh Letkol Setyo Hartono yang masih aktif di Dephan. Akan tetapi, menurut Bambang, Setyo sudah mengantongi izin cuti dari atasannya, tetapi cutinya melebihi batas waktu sehingga menimbulkan polemik. Dalam *Pangdam V:Letkol Setyo Hartono Sudah Memenuhi Syarat,* Suara Surabaya, 12 Desember 2007, diakses pada 7 Maret 2016, pukul 19.53.

[18] Dalam, *Was-was Banjir di Tengah Acara Pelantikan Bupati Baru*, Tempo, 11 Maret 2008, diakses pada 16 Januari, 2016, pukul 15.40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2014 lalu.[19] Suyoto memiliki rumus berpolitik tersendiri dalam menempatkan diri di Bojonegoro, membuatnya ia sebagai orang baru di Bojonegoro serta ia yang notabenya dari kelurga Muhammadiyah tidak membuat lantas masyarakat kurang antipati kepadanya. Justru yang terjadi sebaliknya. Berikut pemaparan Suyoto tentang resep atau rumus berpolitik untuk menjadi sosok pemimpin yang menarik.

> Saya menemukan rumus berpolitik di Bojonegoro. saya menggunakan politik cinta. Apa itu politik cinta? Cinta itu kata Imam Al-Asfari adalah "kecenderungan hati pada sesuatu karena sesuatu itu menarik". Jadi hukum daya tarik itu sudah universal. Bukan karena saya yang hebat, hukum yang diciptakan Allah ini yang hebat. Hukumnya mengatakan; siapa yang *tawadhu'* itu menarik. Ini kan hukum, hati kita semua suka orang yang *tawadhu',* hati kita suka orang bersih, hati kita suka orang yang peduli, hati kita suka dengan siapapun orang yang adil, itu semua kan hukum. Nah saya tinggal berusaha untuk menjalankan. Saya itu fokus sebab bukan akibat. Saya menjalani yang menurut sunnatullah akan dicintai orang lain dan orang kalau cinta dia akan merelakan apapun.
>
> Manfaat itu wilayah rasional, kalau kita mau bermanfaat itu kan rasional. Cari rumusan yang bermanfaat untuk publik itu apa? Kita memperbaiki hal-hal yang bisa untuk publik. Namanya rasional, tapi bagaimana menarik ? Yang menarik itu perilaku hidup kita, bukan batin kita. Walaupun itu menarik tapi kok sombong. Akhirnya, orang ynag mendengarkan hukumnya belum tentu senang hati kecilnya. Apalagi orang yang tidak suka, langsung tidak ada respek dan itu sebenarnya ilmu dakwah, begitupun juga kalau jadi da'i ataupun pemimpin publik.[20]

Dengan sosok figur yang dinilai mempunyai kredibilitas dan konsep politiknya yang menarik menjadi salah satu faktor di tahun 2007 Kang Yoto

[19] Dalam, *Eks Bupati Bojonegoro HM Santoso Total dihukum 10 Tahun Penjara,* Lensa Indonesia, 30 Januari 2014, diakses pada tanggal 22 Desember 2015, pukul 11.04.
[20] Bojonegoro, *Wawancara*, 17 Mei 2018, Pukul: 12.15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diangkat oleh partai-partai kecil, seperti PAN, PPP, dan PNBK, untuk maju di Pilkada[21].

Hal itu berhasil mengoceh berbagai prediksi yang menebak kemenangan pasangan calon lain yang lebih populer dari Kang Yoto. Banyak bermunculan tulisan-tulisan yang mengulas tentang Pilkada Bojonegoro 2007 dari bermacam perspektif. Tulisan-tulisan tersebut banyak yang tersebar di mesin pencari dan dapat dengan mudah diakses. Ali Sahab misalnya,ia menulis ulasan tentang kemenangan Kang Yoto ia kaitkan dengan konsep perilaku pemilih, yang kemudian ia sebarkan melalui website pribadinya.[22] Ali sihab dalam tulisannya memaparkan keunikannya hasil Pilkada Bojonegoro 2007, dan faktor-faktor yang membuat Kang Yoto menang. Faktor tepenting dalam kemenangannya menurut Ali Sihab ialah strategi kampanye yang efektif dan efisien dalam hal teknis maupun materil oleh Tim Sukses Kang Yoto.

[21] Dalam, *Perilaku Memilih Masyarakat Bojonegoro dalam Pilkada: Kenapa Harus Toto,* 13 Februari 2012, diakses pada 22 Desember 2015, pukul 13.00.
[22]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Bojonegoro di Mata Suyoto

Kepekaan pemimpin dalam proses membangun kepemimpinannya menjadi langkah konkrit dalam sebuah perubahan yang lebih baik. Perubahan menjadi sebuah *mind site*yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam pengelolaan dan pengembangan suatu pemerintahan daerah menjadi lebih baik. Artinya, lingkungan sekitar menjadi pembelajaran terbaik bagi pemimpin untuk mengetahui, memahami, meneliti, dan mengaplikasikan apa yang seharusnya dilakukan . Hal tersebutdilakukan oleh Suyoto sebagaimana yang diamati peneliti sebagai berikut:

> Pada awal pencalonan Bupati, sebenarnya tidak terlalu sulit bagi saya dalam menetapkan visi misi Bojonegoro. Sebab, bagi saya kepemimpinan haruslah mampu menangkap apa yang menjadi harapan rakyat. Saat itu, posisi Bojonegoro termasuk minus. Ada lima hal yang mendasar yang harus diselesaikan, yaitu: *pertama,* pembangunan jalan-jalan yang 80-90% dalam kondisinya rusak. *Kedua,* infrastruktur pertanian. Pada zaman Pak Harto, infrastruktur pertanian lumayan bagus, tapi di era reformasi infrastruktur pertanian terabaikan.; misalnya, kebutuhan pupuk, pengairan, manajemen pengairan, irigasi dan sebagainya, semua terabaiakan.
> *Ketiga,* layanan kesehatan. Saya melihat banyak sekali orang yang tidak mendapat layanan kesehatan dengan baik. Selain itu kesadaran untuk membangun bidang kesehatan sebagai kebutuhan bersama juga kurang, terutama bagi mereka yang miskin. Persoalan kesehatan ini bila dibiarkan menurut saya bisa menyebabkan jurang kemiskinan semakin menganga.*Keempat,* persoalan layanan pendidikan, khususnya bagaimana akses dan kualitas pendidikan. Dan, yang *kelima,* adalah bagaimana membawa pemerintah itu hadir di tengah masyarakat, kemuadian masyarakat percaya bahwa pemerintah itu tidak korup. Dengan "hadir", pemerintah bisa memberikan layanan di luar yang empat tadi itu, memberikan layanan administrasi yang baik, *connect* atau sambung dengan rakyat. Di sini pemerintah benar-benar menjadi bagian dari upaya rakyat menyelesaikan masalahnya, kelima hal itu merupakan kebutuhan dasar kehidupan rakyat yang langsung menyentuh rasa keadilan.[23]

[23] Bojonegoro, *Wawancara*, 27 Mei 2018, Pukul: 12.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, jika kelima hal tersebut diabaikan akan berdampak besar terhadap produktivitas rakyat, dan bisa memicu konflik-konflik yang tidak produktif. Dalam perspektif HAM, hal-hal itulah yang menyebabkan terjadinya radikalisme dan diskriminasi di Bojonegoro. ketidakpercayaan itu pula telah menyuburkan pemanfaatan agama dan politik identitas untuk saling mengukuhkan posisi, menyerang dan menjatuhkan antar pihak. Dapat diyakini, jika kebutuhan dasar tidak diselesaikan dengan baik, maka pada level tertentu akan sulit melakukan apa pun di Bojonegoro ini.

Selain itu, hal serius yang dihadapi Suyoto diawal ia memimpin Bojonegoro adalah keterbatasan anggaran yang tersedia di pemerintah Kabupaten Bojonegoro, menjadi faktor penghambat bagi Suyoto. Karena saat itu juga Bojonegoro termasuk daerah termiskin di Jawa Timur. Hal itu tentu membuat Suyoto tidak bisa bergerak dan bekerja dengan leluasa, sehingga banyak hal atau program yang tidak berjalan dengan semestinya. Seperti yang dituturkan oleh Suyoto sebagai berikut;

> Dengan posisi keuangan yang sangat minim bahkan minus waktu itu, maka praktis di periode dua tahun pertama saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan hutang 350 Milyar saya harus menandatangani hutang Bank Jatim, *rescheduling* dan lain-lain. Anggaran pada waktu itu hanya ada sekitar 850 atau 900 Milyar. Nyaris kita tidak bisa berbuat banyak. Yang bisa diberikan adalah telinga, hati, mata dan waktu saya untuk rakyat. Maka, kemudian saya memilih untuk menggelar "Dialog Publik", memberikan layanan pada rakyat sebatas apa yang kita miliki dan kemudian menjelaskan posisi kita maupun kesulitan yang kita hadapi.[24]

[24] Bojonegoro, *Wawancara*, 27 Mei 2018, Pukul: 13.25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dalam internal birokrasi, saya waktu itu ingin meyakinkan bahwa kita masih punya peluang kalau mau memimpin dengan baik. Maka saya memilih memberikan "amnesti politik", dan kemudian menyatukan hati birokrasi Bojonegoro, belajar untuk menjadi lebih baik, dan betul-betul membawa birokrasi ini menjadi bagian untuk solusi bagi rakyat. Saya juga menetapkan kebijakan anggaran, utamanya anggaran prioritas, di mana seluruh anggaran itu mayoritas untuk menyelesaikan keempat permasalahan di Bojonegoro yang sudah saya sampaikan di awal tadi.
>
> Saya sering berkelakar bahwa untuk menjadi Bupati Bojonegoro periode pertama itu sangat mudah, tidak sulit sebenarnya. Untuk menjadi politisi itu gampang sekali, asal ngomong jalannya rusak, teriak banyak korup, teriak irigasi rusak, pupuk susah, itu sudah dianggap menjadi simbol "kepahlawanan" di Bojonegoro.[25]

Berdasarkan penuturan Suyoto di atas, kunci keberhasilan pada awal pemerintahannya adalah mensinergikan seluruh kekuatan, dan fokus pada masalah untuk mengatasi lima persoalan prioritas. Dua hal inilah yang menjadi pondasi pembangunan Bojonegoro di tahap berikutnya. Sinergi antara kekuatan dan fokus pada program prioritas merupakan titik pijak dan landas pacu yang saling terkait. Suyoto tidak masuk yang kedua jika yang pertama belum terselesaikan.

Selain itu, ketika suasana penuh prasangka dan konflik dan ketidakpercayaan antar kelompok masih besar. Maka, yang terjadi adalah penistaan antar satu dengan yang lain. Hal ini akan menjadikan sulit untuk melangkah maju. Dapat dibayangkan, persoalan jalan yang sesungguhnya adalah karena anggaran yang minus, dan belum menemukan teknis yang tepat untuk membangun jalan di Bojonegoro. Tiba-tiba ada pihak yang mengatakan itu urusan NU-Muhammadiyah, orang tiba-tiba mengatakan itu urusan

[25] Bojonegoro, *Wawancara*, 27 Mei 2018, Pukul: 13.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama. Padahal, persoalan yang hakiki adalah bagaimana mengelola anggaran itu secara tepat untuk mengatasi kelima persoalan.

Di samping permasalahan di atas, masalah politik aliran juga menjadi persoalan agak serius pada diri Suyoto. Perasaan pesimistik sempat ada di benak dan pikirannya. Lebih-lebih pada kawannya Pak Yoto, karena setelah membaca data yang ada, Muhammadiyah itu sangat kecil di Bojonegoro. Namun karena strategi Suyoto dalam merumuskan permasalahan-permasalan hingga sampai ke proses solusi dan penanganannya menjadikan rakyat simpati dengan figur ketokohannya. Di mana banyak orang sedang lelah membahas tentang politik aliran, politik identitas, maupun soal implementasi reformasi, maka suyoto tetap fokus dengan permasalahan Bojonegoro melalui program-program matangnya serta masyarakat diajak terlibat langsung dalam mencari solusi masalah yang dihadapi saat itu. Berikut ini penuturan Suyoto;

> Saya pasti punya rasa pesimis ketika maju di Pilkada, tapi yang lebih pesimis adalah kawan-kawan saya. Karena begitu membaca data bahwa, Muhammadiyah di Bojonegoro itu kecil, tidak mungkin diterima di masyarakat NU. Tapi bagaimanapun, bagi saya politik aliran itu kalah dengan pragmatisme. Pragmatisme adalah sesuatu yang menurut saya nyata dihadapi oleh rakyat. Dan kebetulan saya mendapatkan momentum di Bojonegoro. pada saat orang lelah dengan politik aliran, reformasi, di mana orang-orang bicara aliran-aliran. Reformasi sudah berjalan hampir 10 tahunan, nyatanya belum banyak dampak yang ditimbulkan. Justru itulah rakyat sangat menginginkan dampaknya, dan rakyat punya hak memilih dengan DPR. Maka kemudian saya menawarkan solusi pragmatis praktis untuk masalah Bojonegoro yang waktu itu, masalah utamanya adalah jalan. Masalah utamanya adalah pengairan, orang tidak bisa makan, orang tidak bisa berobat, tidak bisa sekolah, kemudian pemerintah dianggap absen dan nipu rakyat. Masalah-masalah seperti itulah yang saya berikan jawabannya. Kemudian polese saya kan, orang sakit saya carikan solusinya, sehingga orang tidak mampu pun bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> berobat, saya bikin anak-anak yang sekolah dengan beasiswa. Ketika ada PNPM, RASKIN, RASTRA, saya ikut *shering* sehingga rakyat benar-benar tahu kebutuhan dasarnya. Pemerintah saya buat hadir untuk memberikan solusi, hand phone saya buka, dialog publik saya buka, supaya pemerintah dianggap tidak membohongi rakyat, maka betul-betul saya buka semuanya.
>
> Sebenarnya birokrasi itu didesain adalah loyal kepada politik, tapi dia tidak boleh berpolitik. Itulah profesionalisme dan netralitas. Saya mendapatkan mandat dari rakyat maka saya bicaranya adalah selalu *output* dan *outcome.* Rakyat menginginkan begini, *polesing*-nya begini, anggarannya begini, kalian harus laksanakan, kalian harus terbuka, kalian dibayar, hak-hak kalian diberikan, tapi rakyat juga menginginkan seperti itu. Saya memposisikan kaki saya adalah di rakyat, mungkin hanya 35% kaki saya berada di birokrasi. Tapi intinya kaki saya lebih banyak berada di rakyat.[26]

B. PENDEKATAN DAKWAH POLITIK SUYOTO

1. Awal Mulai Belajar Dakwah Politik

Suyoto baru belajar berpolitik praktis ketika ia menjelang masuk kuliah S2, setelah dipelajari menurutnya politik dan dakwah memiliki hubungan yang sangat dekat. Suyoto dalam usia sangat muda sudah terlibat dalam organisasi-organisasi dakwah Muhammadiyah. Bahkan Suyoto juga aktif berceramah, menulis dan sejenisnya. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai rektor, dari situ cukup terlihat pengalaman Suyoto dalam konteks dakwah politik.

Dalam perjalanan sejarah Islam, persoalan dakwah dan politik telah menjadi perhatian serius. Sebagian Ulama menganggap bahwa dakwah dan politik tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Islam, sedangkan yang lain berpandangan bahwa dakwah dan politik adalah hal sangat

[26] Bojonegoro, *Wawancara*, 17 Mei 2018, Pukul: 12.45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlawanan dan tidak boleh dicampur-adukkan satu dengan yang lainnya. Namun, dalam persoalan beda pemahaman itu menurut Suyoto, hampir tidak bisa politik itu dilepaskan dari dakwah dan dakwah juga akhirnya tidak mungkin bisa lepas dengan politik. Karena tujuan politik baginya diberi makna sebagai bagian dari keberislaman dan keberagamaan yang substantif. Berikut ini pemaparan Suyoto mulai awal belajar dakwah politik dan pemahamannya tentang urgensi dakwah politik.

> Sebenarnya politik praktis, saya baru belajar sebagai ilmu itu ya saat saya menjelang kuliah S2. Tapi setelah saya mempelajari justru saya tahu bahwa dakwah dengan politik itu sangat dekat. Karena, sasaran dakwah sebenarnya adalah terciptanya individu, keluarga, masyarakat yang baik. Politik sebenarnya juga sasaran utamanya adalah menciptakan masyarakat yang baik, yang pasti akhirnya adalah menyangkut keluarga dan *public pollese* dan itu lewat kultural, ajakan dan kultural politik lewat polese. Tapi hampir tidak bisa politik itu dilepaskan dari dakwah dan dakwah juga akhirnya tidak mungkin bisa lepas dengan politik.
>
> Ketika saya menjadi pendakwah, saya ingat waktu saya masih muda. Ringkasnya begini, saya waktu top-topnya jadi pendakwah, pendakwah itu topnya kan cermah, nulis. Saat itu saya sudah nulis buku, ceramah kesana kemari, saya sudah terlibat di organisasi-organisasi pemuda Muhammadiyah. Bahkan saya pernah menjadi rektor. Bagi saya semua itu adalah instrumen dakwah. Ketika saya top-topnya misalnya, untuk memajukan pendidikan, saya harus mencari duit, kalau saya mau menolong orang tidak mampu, maka saya harus menggerakkan amal. Lalu saya lihat, kenapa kita berdakwah mau, politik kok tidak. Bukankah lewat politik, kekuasaan, kita bisa membuat aturan, kita bisa mengalokasikan anggaran dan bisa mendayagunakan *resource.*Di situlah kemudian tujuan politik diberi makna, diberi *value* sebagai bagian dari keberislaman dan keberagamaan. Tentu keagamaan bukan keagamaan yang simbolik tapi keagamaan-keagamaan yang substantif tentang makna keadilan, makna kasih sayang, makna hidup berkemajuan, bersih, saling toleran dan menghargai. Bagi saya tulah esensi dari pada dakwah dan itulah esensi dari pada politik keberagamaan.[27]

[27] Bojonegoro, *Wawancara*, 17 Mei 2018, Pukul: 12.50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di tengah-tengah peneliti melakukan wawancara, tiba-tiba HP Suyoto bunyi, dan bagi peneliti, ia cukup membuktikan contoh kecil sikap kepedulian, solidaritas dan toleransi dengan sesama. Terdengar ia sedang berbincang dengan rekannya yang kebetulan beragama non muslim. Dan saat itu juga sedang merayakan Hari Nyepi. Berikut kutipan singkat Suyoto dalam teleponnya.

> "Pak Nyoman, Salamat Nyepi ya, Selamat Hari Raya, semoga Sang Hyang Widi memberkati, salam untuk keluarga semuanya. Pokoknya kita selagi masih bisa bantu rakyat ya dibantu dengan cara kita masing-masing. Semoga kita selalu bisa memberi manfaat untuk rakyat dan sesama."

Dalam mewujudkan prinsip toleransi, Suyoto membuat kebijakan-kebijakan atau aturan yang sifatnya tidak kaku, dan eksklusif. Selagi aturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang yang ada maka aturan itu dibuat guna mengangkat hak-hak rakyat yang memiliki difat keberagaman dan keberadilan. Seperti yang dituturkan oleh Bpk Kuswiyanto, Kepala Badan Kesejahteraan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Bojonegoro;

> Pak Yoto pernah membuat Peraturan Bupati (Perbup) tentang sekolah inklufi. Sekolah inklusif ini salah satu tujuannya adalah ingin meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam bersekolah. Contohnya seperti ketika ada anak perempuan yang hamil di luar nikah maka anak ini tidak serta merta langsung dikeluarkan dari sekolah tapi masih ada kesempat untuk siswi dalam memperbaiki keadaan untuk bisa berubah lebih baik lagi. Karena ini juga menyangkut hak asasi, siswa masih mempunyai hak untuk sekolah dan memperbaiki masalah yang bersangkutan.[28]

[28] Bojonegoro, *Wawancara*, 8 Maret 2018, Pukul: 08.39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Suyoto dalam Melayani Masyarakat

Bagi Suyoto, hal utama untuk melayani adalah bagaimana bisa hadir *(presenting)* dan terhubung *(connecting)* dengan sepenuh pikiran dan hati, khususnya terkait permasalahan yang dihadapi oleh warga. Berdasarkan semangat itu, pada tahun 2008 Suyoto mengawali pemerintahannya dengan beberapa cara, di antaranya;

> *Pertama* dengan membuka ruang untuk nyambung itu dengan membagikan *Contack Person*nya. Dengan cara itu, rakyat bisa menyampaikan usulan, umpan balik dan permasalahan via SMS. Yang *kedua*, Suyoto hadir hadir keliling untuk menjumpai warga yang tersebar di 27 Kecamatan, 420 Desa dan 7 Kelurahan, dengan melihat urgensi permasalahan maupun isu yang perlu untuk segera ditangani.
>
> *Ketiga,*secara fungsional berkomunikasi melalui Perangkat Desa, Kades, Lurah dan Camat itu. Sedangkan cara yang *keempat,* adalah dengan membuka dialog publik setiap hari Jum'at. Dialog Publik pada hari Jum'at itu sebenarnya dalam rangka memberikan ruang kepada masyarakat untuk berbicara secara langsung dengan saya dan seluruh jajaran pemerintah.

Di luar keempat cara tersebut, Suyoto juga mengembangkan forum dialog dan komunikasi tematik baik melalui media maupun secara langsung *(face to face).* Beberapa dialog dan komunikasi tematik itu seperti tema pertanian, tema ekonomi, sosial, lingkungan dan sebagainya. Selain itu, Suyoto juga menggunakan media sosial dan teknologi informasi untuk menyapa, menanggapi dan menjalin relasi dengan semua kalangan.

> Terkait pemanfaatan media sosial untuk penjangkauan dan melibatkan warga, awalnya saya menggunakan *facebook*, tapi ternyata *facebook* ini kurang efektif untuk menjangkau kalangan akar rumput di wilayah pedesaan. Solusi yang dilakukan Suyoto adalah mengintegrasikan antara SMS, *facebook¸* dan radio. Proses integrasi inilah yang menjadi landasan dari pengembangan sistem *online* ini. Apresiasi, layanan, dan pengaduan dikelola menjadi input

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dalam aplikasi LAPOR UKP4, dan melalui sistem inilah saya beserta masyarakat bisa lebih responsif dalam menjangkau aspirasi serta melibatkan seluruh warga dalam penyelenggaraan pembangunan. Belakangan ini, dengan adanya WA *(Whats App)* input dari warga menjadi lebih cepat lagi. Untuk itu, juga telah dikembangkan group WA, yang keanggotaannya terdiri dari seluruh Muspida, SKPD, sampai Camat, SKPD punya group WA dengan *stakeholder*-nya, tingkat Camat maupun Kepala Desa juga punya media ini. Jadi kalau ada keluhan, permasalahan, tanggapan dan aspirasi warga, bisa ditanggapi dengan cara di-*upload* dalam *group* WA. Dengan cara itu, tidak lebih dari 10 menit semua pengguna dari layanan tersebut mampu mendapatkan data yang akurat tentang apa yang terjadi di lapangan termasuk *evidence*-nya (foto, video, dan data pendukung lainnya). Pada kasus di mana diperlukan komunikasi dan respon cepat-tepat seperti ketika terjadi banjir misalnya, maka *group* menjadi sangat penting.[29]

Selain memanfaatkan media tersebut, Suyoto juga menggunakan Blackbarry untuk menyampaikan buah permenungan, dukungan, refleksi, sapaan serta kristalisasi dari pikiran dan perasaan Suyoto. Semuanya itu ditulis dalam bentuk puisi, prosa atau kompilasi atas berbagai informasi yang kemudian oleh Suyoto di-*broadcast* kepada semua kontak. Buah permenungan, sapaan, refleksi ini diperlukan agar semua orang khusunya warga Bojonegoro tidak kehilangan "roh dan *spirit"* dari setiap aktivitas yang dilakukan. Media sosial lain juga digunakan oleh Suyoto untuk disemenisasi dan sosialisasi adalah Youtube. Dan dari media ini juga masyarakat bisa mendengarkan dari banyak pemikir maupun pemimpin dunia.

Pada intinya, semua cara tersebut ditempuh dalam rangka menjangkau-merangkul semua pemangku kepentingan pembangunan. Agar masukan, aspirasi, keluhan, harapan dari warga tidak sekedar ditampung tanpa tindak lanjut. Selain itu yang tidak kalah penting adalah Suyoto

[29] Bojonegoro, *Wawancara*, 27 Mei 2018, Pukul: 13.15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan IT modern untuk mengolah berbagai masukan masyarakat itu menjadi keputusan politik dan manajemen pembangunan. Aplikasi IT ini diperlukan untuk memastikan agar masukan tersebut dapat dipilih secara tepat dan kemudia diterjemahkan dalam sistem perencanaan dan penyelenggaraan program-program pembangunan. Dengan cara ini, masyarakat juga dapat mengotrol, memantau dan mengevaluasi setiap keputusan politik dan manajemen pemerintah daerah. Seperti yang ungkapan oleh Suyoto;

> Bahwa, IT dan medsos adalah instrumen, maka saya selalu memanfaatkan berdasarkan bobot masalahnya. Misal, kalau SMS aduan yang diterima sudah direspon oleh staf saya dan tidak ada aduan lagi, maka biasanya permasalahan itu selesai. Tetapi, kalau ada SMS yang sama muncul lagi, pasti ada yang tidak beres. Dalam kasus semacam inilah, saya akan menggunakan cara lain yang lebih tepat untuk menjawab, menanggapi, menyelesaikan permaslahan tersebut. Contohnya, pada saat ekplorasi blok Cepu, di mana berbagai aspirasi muncul dari masyarakat, maka tidak cukup dengan SMS. Saya sendiri yang datang langsung untuk mendengarkan dan menindaklanjuti bersama seluruh jajaran terkait.[30]

Untuk mendengarkan pikiran-pikiran dan berkomunikasi dengan warga sebenarnya ada levelnya. Di situlah Suyoto juga membuat jaring aspirasi warga. Tetapi tidak semua SMS warga serius, bahkan kadang ada yang sekedar iseng. Untuk itulah, maka Suyoto perlulah memilah manakah SMS yang perlu klarifikasi, mana SMS yang betul-betul pengaduan atau bahkan ejekan yang jika benar dapat diangkat menjadi jawaban dalam proses perencanaan pembangunan. Guna menata proses tersebut maka Suyoto menerbitkan PerBup tentang manajemen inovasi berbasis publik.

Selain itu, Suyoto memanfaatkan medsos bukan saja sebagai instrumen kedekatan dengan rakyat tapi juga sebagai alat untuk menjawab

[30] Bojonegoro, *Wawancara*, 27 Mei 2018, Pukul: 13.35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala persoalan lokal di Bojonegoro. Dengan medsos Suyoto juga mampu memonitor berbagai persoalan yang di Bojonegoro karena dirasa memiliki permasalahan yang tidak sama dengan daerah sekitarnya, seperti masalah kemiskinan, pendidikan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan itu, perlulah Suyoto memiliki jawaban yang bersifat lokal dan kontekstual, seperti yang disampaikan Suyoto kepada Peneliti;

> Pemanfaatan medsos dan IT selain menjaga keterhubungan dan kehadiran saya di tengah-tengah warga, juga bermanfaat untuk menjaga keterhubungan dengan isu-isu nasional maupun global. Apalagi sejak awal saya menjadi Bupati, saya meyakini bahwa persoalan Bojonegoro itu adalah persoalan global, persoalan global adalah persoalan Bojonegoro, hanya cara menjawabnya saja yang bersifat lokal. Persoalan ini tidak akan bisa selesai jika tidak dijawab dengan persoalan lokal. Maka persoalan Indonesia, begitu juga persoalan nasional. Dunia dan regional. Berdasarkan sudut pandang seperti itulah maka visi-misi kepemimpinan Suyoto sesungguhnya merefleksikan jawaban atas berbagai permasalahan nasional dan global seperti *global warming*, energi, pangan, kemiskinan dan ketidakadilan.[31]

Karena isu-isu global di atas juga merupakan masalah Bojonegoro, maka Suyoto merancang jawaban-jawaban yang bersifat lokal namun tetap dalam satu tarikan nafas dengan isu-isu global. Untuk itu, Suyoto sendiri terus berusaha membaca berbagai dinamika isu global tersebut. Belakangan ini Suyoto juga melakukan *shering,* belajar tentang krisis ataupun isu-isu global dari para Ahli belahan dunia yang nantinya oleh Suyoto direfleksikan dalam konteks nasional dan selanjutnya dalam konteks Bojonegoro. Berikut penjelasan dari Suyoto;

> Saya pernah mendapat tulisan dari para *expertise* dari *The Schumacher Center for a New Economic*. Dari mereka kontak dan

[31] Bojonegoro, *Wawancara*, 27 Mei 2018, Pukul: 13.50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *sharing* itulah saya mendapat *update* tentang krisis di Eropa maupun krisis di belahan dunia. Pandangan-pandangan langsung dari para ahli tersebut kemudian saya refleksikan untuk konteks Asia, konteks Indonesia dan konteks Bojonegoro. dari sini bisa tergambarkan, bagaimana melalui Bojonegoro dapat memberikan jawaban yang nyata atas isu-isu nasional dan global. Dalam konteks inilah IT dan medsos sangat diperlukan untuk memposisikan diri sebagai masyarakat sebagai bagian dari warga global.[32]

3. Menanamkan Unsur *Value* Terhadap Para Birokrat

Pemimpin yang cerdas dan profesional merupakan semuah media bagi seorang pemimpin untuk mengaktualisasikan nilai-nilai intelektualitasnya dan emosionalnya terhadap realitas pemerintah di dalamnya. Hal semacam ini sebagai implikasi dari nilai-nilai kebaikan dan perubahan yang berkemajuan dalam sebuah organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi.

Kepekaan pemimpin dalam proses membangun kepemimpinannya maupun mental para anggota yang dipimpinnya menjadi langkah konkrit dalam sebuah perubahan yang lebih baik. Perubahan menjadi sebuah *mind site* yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam pengelolaan dan pengembangan sebuah organisasi menjadi lebih baik. Dalam konteks melakukan perubahan birokrasi yang berkemajuan pasti membutuhkan bangunan konsep maupun strategi yang matang. Matang dalam artian segala cara yang telah diupayakan dalam perubahan tersebut sejalan dengan harapan, kemauan, manfaat, budaya dan sosial serta problem yang dimiliki para birokrat yang dipimpinnya. Berikut penuturan Suyoto mengenai strategi dalam menanamkan unsur *value* dan membangun karakter personal birokrat;

[32] Bojonegoro, *Wawancara*, 27 Mei 2018, Pukul: 13.55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para anggota birokrat saya ingatkan, jika mereka nakal pasti akan diberikan sanksi, akan diperiksa BPK dan akan dihukum. Jadi saya tidak khawatir, sedikit banyak saya juga pernah punya pengalaman adaptasi seperti dulu pernah menjadi DPR,walaupun cuman sebentar, pernah menjadi rektor. Rektor itu kan sebenarnya adalah *leader* atau birokrat kampus.

Saya itu sejak pertama kan selalu memasukkan unsur *value*. Di mana manusia saya sentuh, kita ini dari mana, untuk apa, lalu bagaimana kita menjadikan diri kita ini bermakna, bersyukurlah kita mendapatkan peran-peran birokrasi, ini adalah kesempatan kita beramal sholeh. Itukan *value*, memberikan kerangka aksiologi kalau dalam ilmu filsafat. Maka tidak salah jika orang lain menilai dan merasakan bahwa pemkab Bojonegoro itu seperti pesantren. Itulah yang saya maksudkan dengan memasukkan unsur-unsur *value*, *spirit* dalam semua prosesnya dan jangan sampai dia kering.

Saya ini kan tahu, bahwa problem di Bojonegoro ini termasuk permasalahan di birokrasi pemerintah, kalau saya lihat itu transformasi ada tujuh level. Pertama, *believe sistem.Believe sistem* berarti pancasila, keagamaan ini harus diturunkan menjadi niat, niat diturunkan menjadi misi. Begitu menjadi visi, maka itulah pemerintahan. Tapi bagaimanapun visi itu sebenarnya lahir dari sesuatu yang tidak kelihatan yaitu namanya *believe sistem iman.* Iman kebangsaan itu pancasila, iman keagamaan juga, lalu niat nantinya muncul berupa visi. Seperti contoh, bagaimana menjadikan Bojonegoro yang sejahtera, yang damai, hidup berkemajuan dan pembangunan yang berkelanjutan yang bahagia. Itu semua kan visi namanya. Lalu, muncullah yang namanya strategi, strategi itu adalah wilayah yang lebih banyak ke akal. Karena itu, penting bagaimana membuat strategi, jika masalahnya ini solusisnya apa, inilah *strategic*. Itulah yang dinamakan juga *management resourcing.*Baru kemudian strategi diamankan menjadi *government* atau aturan. Biasanya orang bicara itu berhentinya di aturan. Lalu POAC, atau pengaturan, pengelolaan, bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan visi dan itu dibutuh dikontrol. Lalu ada yang tidak kelihatan di level bawahnya lagi namanya *"culture".* Budaya inilah yang kemudian juga saya sentuh. Karena kalau budaya itu akarnya katanya dari *value*. Kenapa sih orang itu banyak meminta, banyak ngrasani. Maka saya buatlah mulai *believe sistem,* niat, *culture* dan kemudian saya bikinkan yang namanya 'Al-Fatihah Code'. Mereka para birokrat saya ajak pergi ke hutan, saya ajak refleksi. Dan pelatihan 'Al-Fatihah Code' ini saya sampaikan ke seluruh birokrat.

Memang Bupati Kang Yoto sangat peduli dengan *building* atau pembangunan. Oleh karena itu, ia butul-betul melaksanakan pembangunan budaya kerja di instansi pemerintahan. Kang Yoto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> melakukan pembangunan diri atau pengembangan karakter pada para birokrat dan itulah yang menjadi instrumen ia dalam membentuk kualitas dan stabilitas kerja.
>
> Wujudnya sekarang adalah di sekolah-sekolah diadakan pendidikan kejujuran, kemudian ada ikrar jujur dan sebagainya. Lalu, di PNS diadakan pendidikan pembangunan karakter melalui outbon serta di dalamnya itu ada penanaman wawasan jalan sukses melalui Al-Fatihah. Itulah yang dilakukan Kang Yoto dalam membentuk karakter personal para pegawai.[33]

Dari penuturan Suyoto dan Zainuddin di atas dapat dipahami bahwa problem di Bojonegoro adalah di birokrasi pemerintah. Dalam melakukan perubahan transformatif Suyoto memili langkah-langkah di antaranya ada *believe sistem.* Menurutnya, *Believe sistem* berarti pancasila, Iman kebangsaan itu pancasila, iman keagamaan juga, lalu niat nantinya muncul berupa visi. Lalu langkah selanjutnya adalah strategi yang baru kemudian strategi dijalankan menjadi *government* atau aturan. Karena, biasanya orang bicara itu berhentinya di aturan.

Langkah selanjutnya adalah POAC, atau pengaturan, pengelolaan, bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan visi dan itu dibutuh dikontrol. Lalu ada yang tidak kelihatan di level bawahnya lagi namanya *"culture".* Budaya inilah yang kemudian Suyoto sentuh. Maka dibuatlah semua mulai *believe sistem,* niat, *culture* dan kemudian lahir jugayang namanya 'Jalan Sukses Al-Fatihah' atau sebuah instrumen Suyoto dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan dan merubah *mind site* para birokrat yang salah.

[33] Bojonegoro, *Wawancara*, 17 Mei 2018, Pukul: 13.15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Merubah *Mindset* Para Birokrat

Pemimpin yang ideal perlu dan bahkan harus mempunyai keinginan dalam sebuah perubahan atas paradigma budaya yang berkembang di dalam birokrasi. Gebrakan perubahan harus lantang disuarakan oleh seorang pemimpin untuk untuk perubahan yang lebih baik., praktek-praktek yang menyimpang menjadi tantangan yang harus terus dibenahi dan dikelola sesuai dengan tujuan dan harapan pemerintah dan rakyat.

Dalam konteks dakwah politik di birokrasi pemerintah Bojonegoro, Suyoto sekaligus sebagai *leader* mempunyai kran besar untuk menjadi pejuang pemberantasan terhadap pola-pola yang sudah mengakar, *mind site* yang salah, karakter dan mental yang mengarah kepada kemungkaran, sehingga kedepannya tidak lagi mewariskan sebuah kultur birokrasi yang kotor. Bagi Suyoto tidaklah sulit dalam memberantas budaya birokrasi yang kurang baik karena memang Suyoto sudah mempelajari, mempunyai pengalaman dan menemukan problem budaya yang dinilai kurang pantas untuk dibiarkan. Di antara cara yang telah dilakukan Suyoto adalah selalu memotivasi dan memberikan pelatihan "Jalan Sukses Alfatihah" kepada para birokrat.

> Tidak ada istilah sulit jika ingin membenahi aturan-aturan lama yang memang batil dan tidak benar. Aturannya dirubah ya dirubah. Makanya itu, *keliru* besar jika santri itu tidak mau berpolitik. Wong sebetulnya kita itu punya kesempatan untuk menolong rakyat lewat kekuasaan itu luarbiasa. Makanya, sekarang mana ada cerita kalau dulu kita membuat beasiswa, mana ada cerita membangun jalan sampai ke pelosok-pelosok desa. Terkait budaya lama birokrasi yang dianggap batil, maka lawan kita disebut kebatilan itu sebenarnya sudah tidak terlalu batil lagi sekarang, tidak kelihatan, ini soal keadilan partisipatif yang tidak kena. Sehingga motif kebatilannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> benar-benar halus, sampai tidak kelihatan. Dan benar kalau ngomong Undang-undang, peraturan itu nanti bisa didesain sedemikian rupa, nanti proyeknya kita garap sesuai keinginan golongan kita, maka di situlah kenapa ada moral, keberpihakan, nah, inilah pentingnya santri ikut hadir di situ.[34]

Bagi Suyoto, tidak ada kata sulit jika ingin membenahi aturan-atuan yang salah. Jika aturannya salah dan perlu dirubah segera saja dirubah. Namun, dalam pola-pola budaya batil yang mengakar belakangan ini motifnya sudah sangat halus. Cara pemberantasannya juga perlu cara yang halus pula. Seperti halnya jika berbicara mengenai Undang-undang dan peraturan itu memang dapat didesain sedemikian rupa, kemudian proyeknya dapat dikerjakan sesuai keinginan golongan tertentu, maka di sinilah sangat penting diperlukan yang namanya moralitas dan keberpihakan. Menurutnya, di posisi seperti itu, santri sangatlah perlu dihadirkan.

5. Mewujudkan Budaya Keterbukaan

Suyoto juga bercerita pengalamannya saat menggelar dialog publik bersama warga Bojobegoro setiap hari jum'at di pendopo Kabupaten. Pada awalnya dialog tersebut menjadi forum sumpah serapah, orang marah-marah, berdebat saling menghujat. Baru delapan bulan kemudian dialog publik itu baru terwujud menjadi dialog yang bermakna bukan untuk marah-marah dalam mempertahankan kepentingan dan egonya sendiri.

Dalam membudayakan sistem keterbukaan para birokrat dengan dialog interaktif setiap hari jum'at, Suyoto juga mendesain sistem operasional berbasis IT yang transparan. Bahkan dapat dikatan telanjang karena sistem

[34] Bojonegoro, *Wawancara*, 17 Mei 2018, Pukul: 13.20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diterapkan oleh Suyoto sangat terbuka . Sehingga semua rakyat mampu memonitor program-program, rencana pembangunan serta anggaran dana daerah di wibesite Pemkab. Semua ini dilakukan agar tidak ada kesalah pahaman atau kecurigaan rakyat kepada pemerintah Bojonegoro. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bpk. Zainuddin, selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai berikut:

> Dalam mewujudkan budaya keterbukaan, Kang Yoto mengadakan dialog publik yang dilakukan setiap hari jum'at siang. Dialog publik ini orientasinya adalah untuk memberdayakan masyarakat. Artinya, betul-betul problem dan programnya itu mendapat masukan dari masyarakat serta masalahnya nanti langsung mendapat masukan dari Bupati. Kalau ada masalah langsung diberi petunjuk, solusi dan bahkan diberikan fasilitas untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, dalam forum dialog publik, kita pegawai dan masyarakat langsung tahu permasalahan-permasalahan dan keluhan-keluhan yang muncul di tengah masyarakat yang kemudian program untuk memecahkannya kita tuangkan dalam agenda program yang segera kita kerjakan dan program kita ini bukan program *arang-arang* (program yang jarang-jarang). Ketiga, di samping dialog publik kita ada pendidikan karakter, jadi kita terbuka sekali, tidak ada yang disembunyikan. Karena setiap masalah dan tanggung jawab kita nanti akan dipertanggung jawabkan. Seperti itu yang sering Kang Yoto sampaikan dalam mengingatkan kita.[35]

Dalam program dialog interaktif di atas masyarakat bisa langsung mengeluh, mengadu, mengkritik serta mendapat respon langsung dari Bupati. Sehingga pemerintah mampu membuat solusi dan pemecahan masalah dengan sumbangan buah pikiran, masukan dari rakyat serta kesepakatan bersama. Sebelum dilaksanakannya dialog jum'at siang, pada jum'at pagi Suyoto juga mengajak para birokrat untuk kumpul bersama khususnya di Pendopo Daerah serta me-*review* tiap dinas dalam melakukan tanggung jawab

[35] Bojonegoro, *Wawancara*, 7 Juni 2018, Pukul: 10.40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja yang sudah diprogram sebelumnya, apa sudah dikerjakan atau belum. Beikut ini penuturan dari Bpk. Zainuddin;

> Kemudian selain diadakan forum dialog publik setiap hari jum'at siang, kita di samping itu ada review program yang diadakan setiap hari jum'at pagi. Jadi dinas-dinas itu dikumpulkan untuk direview, program-programnya sudah dilaksanakan apa belum? Jadwalnya kapan? Jika sudah dilaksanakan apa peluang hambatannya.[36]

6. Mengadakan Pengajian Kebangsaan

Suyoto juga mengadakan pendidikan kebangsaan yang pesertanya adalah tiap-tiap dinas atau masing-masing pegawai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan masyarakat setempat yang kebetulan telah terjadwal menjadi tempat pengajian. Program pengajian ini dilaksanakan dengan mendatangkan Kiai atau Ustadz lokal Bojonegoro sendiri. Sengaja tidak mendatangkan di luar Bojonegoro demi memanfaatkan SDM yang ada di dalam lokal.

Di tengah berlangsungnya acara ada sesi tanya jawab, sehingga hal ini menarik antusias masyarakat yang ingin langsung mencurahkan aspirasinya kepada para pegawai birokrat yang dinilai terlibat langsung dengan pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Di samping itu program ini menjadikan kedekatan antara para dinas kepegawaian dan masyarakat setempat untuk lebih solid dan nantinya tidak ada sikap saling menyalahkan dan mencurigai. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Wahyu,salah seorang pegawai di bagian BAKESBANGPOL;

> Di tahun 2018 ini program pengajian kita ada di beberapa kecamatan yakni Kec. Temayang dan Kec. Malo. Acara ini sekaligus sebagai

[36] Bojonegoro, *Wawancara*, 7 Juni 2018, Pukul: 10.25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> pendidikan politik menjelang Pemilukada serentak dengan mengundang beberapa Kiai dan aparat di antaranya; Bp. KH. Imam Sadeli dari Desa Palem, Kec. Purwosari, Bp. KH. Agus Salim dari Ponpes Al-Quzi Dander Bojonegoro, Bp. KH. Kusnan dari Desa Sumberrejo Bojonegoro, KAPOLRES Bojonegoro dan DANDIM 0813 Bojonegoro. Adapun maksud dan tujuan di adakan pengajian kebangsaan ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait program-program pemerintah, khususnya di tahun 2018 ini adalah bagaimana tahapan-tahapan Pemilukada 2018, mendorong partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan pembangunan, sebagai sarana komunikasi politik.[37]

7. Membangun Karakter Para Birokrat Berbasis Jalan Sukses Al-Fatihah

Menjadi seorang pemimpin dalam pemerintahan sudah barang tentu harus belajar dari setiap keadaan sebelum dan sesudah adanya setiap perubahan dalam birokrasi. Pemimpin sebagai inspirator dan motivator dituntut untuk mengetahui konsep birokrasi ke depan dengan berbagai pengalaman, model dan inovasi yang ada.

Dalam konteks kepemimpinan Bojonegoro, Suyoto di tahun pertamanya menjabat sebagai Bupati, ia membuat program di antaranya adalah para birokrat diajak outbond dan refleksi ke hutan. Hamun, hasil yang didapat masih jauh dengan harapan. Untuk mengikuti program ini tidak sedikit para birokrat yang merasa ada unsur keterpaksaan. Dengan berbagai alasan seperti outbond ini durasi pelaksanaannya panjang, kemudian materi yang didapatkan itu sulit untuk diimplementasikan, dan juga biayanya yang cukup mahal. Karena tidak efektif, akhirnya Pak Yoto dan segenap Tim penggagas kegiatan tersebut mencari model-model baru, karena waktu itu dilakukan survei ternyata ada tujuh karakter pegawai ataupun masyarakat Bojonegoro yang disebut dengan tujuh setan.

[37] Bojonegoro, *Wawancara*, 5 April 2018, Pukul: 09.38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari situ maka lahirlah konsep Al-Fatihah atau yang disebut "Jalan Sukses Melalui Al-Fatihah". Dalam pelaksanaan konsep Al-Fatihah sebagai inovasi baru untuk membangun karakter para birokrat yang menyimpang,dengan segala bentuk usaha dan upaya yang telah dilakukan oleh Suyoto dan Tim,hasilnya dinilai jauh lebih efektif dari cara yang sebelumnya. Seperti yang disampaikanoleh Bapak Roli Abdul Rahaman;

> Al-Fatihah imbrionya memang dari Pak Yoto. Historisnya, ketika Pak Yoto menjabat sebagai Bupati, di tahun pertamanya ia membuat program di antaranya adalah para birokrat diajak outbond, tapi hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan. Tidak sedikit para birokrat merasa ada unsur terpaksa, outbond ini jamnya panjang, kemudian materi yang didapatkan itu sulit untuk diinternalisasikan, dan juga biayanya yang cukup mahal. Karena tidak efektif, akhirnya Pak Yoto dan segenap penggagas kegiatan tersebut mencari model-model baru, karena waktu itu kita melakukan survei ada tujuh karakter pegawai ataupun masyarakat Bojonegoro yang disebut dengan tujuh setan. Tujuh setan itu adalah tidak mau bekerja keras, inginnya instan, bekerja dengan tergesa-gesa, suka membicarakan kejelekan orang lain, suka iri, dengki, dan mementingkan egonya sendiri.
>
> Dari ketujuh karakter tersebut kami menemukan lagi ada dua karakter yang sering muncul, yakni karakter suka menyalahkan orang lain, dan karakter sombong. Dari situlah maka lahirlah konsep Al-Fatihah atau yang dinamai "Jalan Sukses Melalui Al-Fatihah".
>
> Dengan diadakan training "Jalan Sukses Melalui Al-Fatihah" ini ternyata ada respon bagus, tumbuh rasa kepercayaan diri, ada perubahan *mind site* yang sebelumnya salah, dan keinginan berubah untuk menjadi yang lebih baik. Hampir keseluruhan birokrat diikutkan training ini, mulai dari pegawai Pemkab sampai tingkat kelurahan. Kegiatan ini berjalan optimal selama tiga tahun, di tahun 2010 – 2013, dalam tiap seminggunya bisa diadakan dua sampai tiga kali training demi menjangkau keseluruhan pegawai. Waktu kegiatannya berdurasi 5 jam, dari jam 08.00 s/d 13.00 dengan tiga poin materi yakni; smart spiritual, smart emotional, dan jalan sukses Al-Fatihah. Selama tiga tahun berjalan itu, tercatat ada kurang lebih 385 angkatan training. Dengan jumlahnya yang cukup besar, sayabisa mengatakan beberapa ribu orang, maka diambilkanlah anggaran kegiatan ini dari dana daerah atau APBD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dengan menggunakan metode jalan sukses melalui Al-Fatihah sebagai pembentukan karakter, yang saya pahami, kita alami di situ adalah betul-betul hidup ini sebagai wujud pengakuan akan kasih sayang, akan kekuasaan, pengaturan, penentuan dari Gusti Allah. Kita benar-benar diminta supaya dalam diri ini harus bersih dan murni karena ada misi kasih sayang. Maka, yang di luar kasih sayang itu harus disingkirkan seperti, *ngrasani wong* (membicarakan keburukan orang), tergesa-gesa dalam bekerja, inginnya instandan tidak mau berproses, tidak mau mementingkan kepentingan orang banyak. Jadi yang kotor-kotor seperti ini harus dibinasakan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, jadi karena kita mendapat kasih sayang dari Gusti Allah maka kita harus memberikan kasih sayang itu untuk sesama.[38]

Seperti yang dijelaskan di atas, hampir keseluruhan birokrat diikutkan training "Jalan Sukses Melalui Al-Fatihah, mulai dari pegawai Pemkab sampai tingkat kelurahan. Kegiatan ini berjalan optimal selama tiga tahun, di tahun 2010 – 2013, dalam tiap seminggunya bisa diadakan dua sampai tiga kali training demi menjangkau keseluruhan pegawai. Pelatihan ini terdiri dari tiga poin materi yakni; smart spiritual, smart emotional, dan jalan sukses Al-Fatihah itu sendiri.

Dengan diadakan training "Jalan Sukses Melalui Al-Fatihah"selama tiga tahun berjalan, secara periodik dinilai pelatihan tersebut cukup membuahkan hasil. Yang sudah dirasakan oleh para birokrat adalah tumbuhnya rasa kepercayaan diri dan terpenting ada perubahan karakter yang sebelumnya salah, seperti sifat tidak mau berproses, ingin instan, mebicarakan keburukan orang lain, iri, dengki, sombong, dan suka menyalahkan orang lain. Hasil yang terlihat dari diadakannya training " Jalan Sukses Melalui Al-Fatihah" adalah keinginan para birokrat untuk berubah

[38] Bojonegoro, *Wawancara*, 7 Juni 2018, Pukul: 11.48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi yang lebih baik. Berikut ini transkrip singkat yang digunakan untuk pelatihan "Jalan Sukses Melalui Al-Fatihah".

EPISTEMOLOGI

SUCCESS ROAD AL-FATIHAH (JSA)

1. Al-Fatihah sebagai ummul Qur'an, paling banyak dibaca oleh ummat Islam baik sebagai bacaan dalam sholat ataupun sebagai bacaan di luar sholat yang dikaitkan dengan berbagai momentum ataupun hajat kehidupan manusia.
2. Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa, Al-Fatihah baru ditempatkan sebatas sebagai bacaan saja, namun dari sisi arti ataupun makna belum difahami dan belum dihayati secara mendalam serta belum membentuk paradigma bagi sebagian besar ummat Islam.
3. Al-Fatihah belum dijadikan inspirasi dan motivasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Padahal sesungguhnya Al-Fatihah itu kaya sekali akan ide dan memiliki spirit sempurna yang dapat memandu setiap muslim untuk menemukan serta meraih sukses (*falah*) dalam kehidupan dunia akhirat.
4. Sebagian besar masyarakat Bojonegoro adalah muslim, mereka telah terbiasa menjadikan Al-Fatihah sebagai bacaan dalam berbagai momentum kehidupan. Namun faktanya masyarakat Bojonegoro masih dalam posisi tertinggal dalam berbagai bidang kehidupan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Untuk membangun masyarakat Bojonegoro dibutuhkan energi dan anggaran yang besar bahkan tidak terhingga hitungannya. Karena itu proses pembentukan karakter masyarakat melalui training jalan sukses Al-Fatihah diharapkan dapat menjadi alternatif solusi yang cukup efektif, efisien untuk merubah pola dan gaya hidup masyarakat Bojonegoro agar menjadi masyarakat yang optimis, cerdas, kreatif, inovatif, efektif dan mandiri dalam mewujudkan masa depan sukses.

SELF MANAJEMEN JALAN SUKSES AL-FATIHAH

Pendahuluan

Kesuksesan merupakan hak asasi (dasar) setiap individu, ia muncul bersamaan ketika manusia dilahirkan oleh ibunya. Hal itu dapat dilihat dari proses pembuahan yang dialami manusia dimana ketika terjadi peristiwa pembuahan hanya satu sperma diantara sekian ribu sperma yang berhasil membuahi ovum yang kelak akan menjadi seorang manusia.

Dari peristiwa tersebut tergambar bahwa manusia pada awal kejadiannya dibekali spirit dan pengalaman sukses oleh Allah Swt, sehingga sukses merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada semua orang, tidak didasarkan pada strata sosial, ras ataupun kekuasaan.

Apabila sukses itu hanya menjadi haknya orang kaya, maka orang miskin tidak akan pernah sukses, kalau kesuksesan itu hanya menjadi haknya orang yang kuat fisiknya, maka orang yang lemah tidak akan pernah sukses, dan seterusnya. Apabila yang terjadi demikian, maka iklim sosial yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

normal dan roda kehidupan yang harmornis tidak akan pernah tercipta dimuka bumi ini.

Sebenarnya kesuksesan itu sangat identik dengan keselamatan, kekuasaan, kekayaan, kesehatan, keamanan, ketenangan, dan kesejahteraan. Karenanya orang yang telah dengan selamat melewati cobaan dan kejahatan yang dilaluinya, berarti sukses; orang yang telah berhasil meraih kedudukan tertentu yang diinginkan disebut sukses; orang yang telah berhasil meraih kekayaan dan mampu memberdayakan juga disebut sukses.

Orang yang sehat dan jarang sakit, tidak memiliki penyakit yang kronis dan mampu menjaga kesehatannya disebut sukses; orang yang hidup tenang dan aman dari berbagai ancaman yang menyengsarakan disebut sukses; orang yang sejahtera dan tidak sengsara hidupnya juga disebut sukses begitu seterusnya tali temali sukses akan terangkai dalam seluruh aspek kehidupan.

Sukses Dalam Perspektif Islam

Sukses dalam perspektif Islam tidak semata-mata hanya seperti yang disebutkan di atas. Sukses dalam Islam selain bisa mencakup itu semua, juga mencakup kelanggengan (tidak bersifat temporer), kesudahan atau *finish* sesuatu dengan *save and happy ending*. Mengingat tugas dan misi eksistensi manusia dalam kehidupan ini adalah sebagai khalifah Allah {wakil Allah di muka bumi dengan menciptakan kemakmuran yang bersifat material dan spiritual (ibadah), maka ukuran sukses adalah ketika manusia telah mampu melaksanakan tugasnya sebagai khlalifatullah dengan mematuhi pedoman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Al-Qur'an) yang ditetapkan Allah yang diturunkan kepada manusia untuk dipedomani secara benar dalam menjalani hidupnya.

Kesuksesan manusia dalam perspetif Islam tidaklah semata-mata (atau tidak) didasarkan pada material *(material standar)*, namun didasarkan pada norma-norma yang terkandung dalam pedoman hidup manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai khalifatullah, mengabdi hanya kepada-Nya *(immaterial standar).*

Adapun contohnya yaitu dengan kosisten mendirikan shalat 5 waktu kemudian mengimplementasikan konsep *'sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain'*. Ketika manusia mampu melakukan penghambaan dengan baik dan istiqamah (konsisten) serta mampu mempertahankan kebaikan itu hingga usai eksistensi dirinya (di dunia), maka sangat layak orang tersebut bisa dikatakan sukses dalam menjalani kehidupan.

Inilah yang disebut kesuksesan yang sebenarnya yang membuahkan kebahagiaan. Allah berfirman: *"sesungguhnya orang-orang yang mengatakan (meyakini) Tuhan kita adalah Allah, kemudian mereka berkonsisten dalam perkataan mereka, maka para Malaikat sama turun kepada mereka dengan memberikan kabar gembira janganlah kamu khawatir (takut) ataupun susah ..."*.

Mengenai indikator kesuksesan dalam Islam, Allah memberikan rambu-rambu melalui firmanNya: 1)Alif laam miin. 2)Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, 3)mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka. 4)dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelummu serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.5) mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Dengan demikian, maka disinilah letak kebahagiaan dan kesuksesan. Tidak bersifat parsial (setengah-setengah) yaitu pada ukuran materialistik semata tetapi berifat integral (*penuh*) yaitu pada ukuran materi dan immateri. Kebahagiaan merupakan refleksi sebuah kesuksesan, dengan kata lain kesuksesan membuahkan kebahagiaan, yang dengan sengaja (adil) diletakkan oleh Allah pada hati dan (diikuti dengan) anggota badan yang taqwa, yakni anggota badan yang merefleksikan ketaatan kepada Tuhannya..

Maka, ketika telah jelas bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat, sedangkan Al-fatihah merupakan bentuk ringkas dari Al-Qur'an, maka Al-Fatihah inilah ringkasan jalan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga sangat menarik untuk ditelaah dan dijabarkan lebih fungsional pada ranah yang berbeda; *ranah kognitif* (konsep pengetahuan yang dimunculkan), *ranah afektif* (sikap yang merupakan pilihan dalam aplikasi dari ayat-ayat Al-Fatihah tersebut) dan *ranah psikhomotorik* (aksi berupa tindakan nyata sebagai implementasi dari ayat-ayat Al-Fatihah yang mengarah kepada kesuksesan yang lengkap dan sempurna).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JALAN SUKSES PERTAMA: BISMILAHIRRAHMANIRRAHIN

Lafadz basmalah dapat menjadi input kognisi (pengetahuan) dan menyadarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah mengusahakan tindakan dan karya yang terbaik (ihsan). Karya yang yang dikerjakan dengan cara dan aturan yang benar dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah Swt. Sehingga karya tersebut berimplikasi pada kemaslahatan bagi diri sendiri dan membuahkan manfaat bagi orang lain di sekitarnya, sehingga timbul rasa kasih sayang antar sesama.

Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fiqihiyah bahwa; mengawali dan mendasarkan segala aktivitas dan karya yang tidak baik (negatif), merusak, tidak mencerminkan rasa kasih sayang adalah tidak diperkenankan. Sehingga seseorang yang mendasarkan hidupnya dengan Basmalah, maka seluruh perbuatannya akan mengarah kepada kebaikan,menarik dan bermanfaat, karena ia menjadikan Allah sebagai sandaran seluruh niat dan motivasi segala tindakan lahir dan bathinnya.

Hidup yang dijalani seseorang haruslah senantiasa diniati ibadah (pengabdian kepada Allah Yang Maha pencipta). Karena pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini memiliki tugas pokok untuk beribadah kepada Allah yaitu mengemban amanah yang diberikan Allah kepadanya, yaitu sebagai abdi Allah (Abdullah) dan penebar kasih sayang di muka bumi (*khalifah fil ardl*). Aneh dan dusta, ketika seseorang mengaku mengaplikasikan *Basmalah* (dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maha Penyayang) dalam hidupnya, sedang perilaku kehidupannya jelek dan jauh dari nilai-nilai *Basmalah* itu sendiri.

Sikap seseorang ketika mengaplikasikan *basmalah* dalam kehidupannya adalah ia akan berlaku khusyuk (baik dan benar serta berorientasi pada semangat kasih sayang antar sesama), meniatkan dan mengisi seluruh kehidupannya semata-mata dengan ibadah kepada Allah Swt serta menebar kasih sayang.

Ketika seluruh hidup itu berorientasi hanya ibadah atau mengabdi kepada Allah, sebagai konsekuensi selanjutnya, akan selalu mamasang niat baik dalam setiap perilaku dan perbuatannya, baik pada tataran niat maupun tataran amaliah lahiriah. Seseorang akan berperilaku optimis dalam setiap langkahnya selain profesional dan prosedural sesuai dengan ketentuan Allah, dan kiprah hidupnya akan selalu mengarah kepada kebaikan, kemaslahatan, dan kemanfaatan bagi semua, tanpa pilih kasih. Hal ini merupakan implementasi dari sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim.

Sikap yang kedua ialah tidak akan mudah lupa diri apalagi sombong terhadap keberhasilan yang dicapai, tak akan putus asa dengan kegagalan-kegagalan yang ia temui. Nampak dalam hidupnya sikap bersahaja, jujur dan penuh kasih sayang dan seterusnya. Ini semua tiada lain merupakan kunci-kunci kesuksesan hidup.

Aplikasi dari Basmalah selain niat yang benar adalah selalu mengoptimalkan kemampuan dengan melakukan berbagai inovasi untuk memunculkan berbagai kreativitas, menciptakan kemaslahatan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menumbuhkan manfaat bagi kehidupan di bumi beserta seluruh isinya. Orientasi dan skill tersebut hanya dilakukan untuk mencapai ridla Allah, dan kasih sayang terhadap seluruh makhlukNya.

JALAN SUKSES KEDUA:ALHAMDULILLAHIROBBIL 'ALAMIN

Dalam memahami Allah sebagai *robbul 'alamin* akan muncul sebuah konsep keyakinan bahwa1) segala daya dan usaha harus didasarkan pada Allah SWT berikut dengan berbagai konsekuensi positif dan negatifnya sekalipun merupakan hal yang terbaik bagi dirinya; 2) kesadaran berupa keharusan bekerja keras/berikhtiar sebaik mungkin guna mencapai kebaikan dan prestasi, serta mengasihi sesama makhluk; 3) selalu bersyukur dengan memuji Allah adalah bagian dari proses iktiyar, karena atas segala nikmatNya seseorang mampu berusaha untuk memenuhi hajat hidupnya.

Apabila seorang telah menjadikan Allah Swt sebagai sandaran segala ikhtiyar yang dilakukan dan meyakini Allah sebagai penguasa alam semesta maka sikap yang harus dimiliki dan diaplikasikan adalah berlaku qanaah, sabar, tak mudah sombong, tidak akan pernah putus asa dan selalu optimis, tidak mudah tergoda dengan penampilan lahiriah, mencintai ilmu pengetahuan, kreatif dan inovatif dalam melakukan sesuatu. Sikap-sikap tersebut muncul dari kesadaran bahwa Allah-lah yang menjamin keberhasilan segala daya dan upaya yang dilakukan oleh seseorang, selain itu sikap-sikap tersebut merupakan kunci dasar dalam memperoleh kesuksesan dalam berbagai hal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan dasar yang ingin dicapai dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang tidak lain hanya untuk memperoleh ridla Allah sebagai Tuhan semesta alam dan memproduksi manfaat bagi seluruh alam. Namun ia tidak akan gelap mata dan mengembalikan segala urusan hanya kepada TuhanNya. Ia merasa bukan apa-apa. Allah lah yang memberikan ide, gagasan, pikiran dan tenaga dan potensi sehingga kreasi dan inovasi serta persembahan prilaku yang baik terpancar dari dalam dirinya.

Tidak dipungkiri bahwa manusia juga memiliki skill (keterampilan) kurang positif. Tetapi itu tidak membuatnya terhambat justru ia gunakan untuk selalu melakukan koreksi dan evaluasi dengan meminimalisir, mencegah bahkan melindungi diri dan sesamanya dari kemungkaran serta kejahatan.

Dalam kaidah fiqhiyyah disebutkan: aku tahu dan memiliki skill yang bersifat jahat, namun itu hanya aku gunakan untuk menjaga diri dan menyelamatkan masyarakat dari kejahatan tersebut) Selain itu, orang yang berpegang dengan keyakinan ini akan selalu berbuat dan berusaha sekuat tenaga (berikhtiar baik lahir maupun baik) untuk mengaplikasikan prilaku yang terpuji (akhlak mahmudah).

JALAN SUKSES KETIGA: ARRAHMAN ARRAHIM

Allah Swt, menciptakan dunia ini dengan berbagai keindahan dan keunikan di dalamnya merupakan bagian dari kasih sayang Allah kepada manusia. Tidak hanya itu Allah juga memberikan modal kepada manusia berupa berbagai potensi yang melekat pada diri manusia untuk memanfaatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai fasilitas dunia bahkan keberadaan makhluk lain diperuntukkan untuk menunjang kehidupan manusia. Itu semua merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia.

Dengan memahami konsep pengetahuan yang benar tentang kasih sayang Allah, akan menjadi dasar atas segala niat, perilaku yang muncul, bukan perhatian dan prilaku yang semu, temporer, dan bertendensi kepentingan tertentu, namun kasih sayang dan perilaku yang murni didorong oleh rasa untuk menggapai keridlaan serta kasih sayang Allah Swt.

Allah telah menciptakan manusia di muka bumi ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan menabur kasih sayang. Sikap kasih-sayang secara otomatis tumbuh sebagai aplikasi perintah berakhlak dengan akhlak Tuhan yang Maha Sempurna, disucikan dari sifat kekurangan dan kelemahan.

Dengan pendekatan akhlak Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang penuh kasih sayang ini akan mengantarkan seseorang pada jalan yang terang, yaitu jalan kesuksesan penuh keridlaan Allah Swt dan keselamatan lahir batin. Karena melalui kasih-sayang Allah segala harapan dan cita-cita akan lebih dekat menuju kesuksesan, ketercapaian apa yang diharapkan dan yang dicita-citakan. Lebih-lebih manusia dikaruniai akal, sedang akal dan kecerdasan tertinggi adalah bersikap kasih sayang kepada sesama makhluk. Sebuah maqolah mengatakan "*Ra'sul aqli mudaarotun nas*" (pokok kecerdasan akal adalah kasih sayang sesama manusia).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika seseorang mampu mengaplikasikan sikap rahman rahim dalam kehidupannya, maka segala aktivitasnya, mulai dari diam dan geraknya, senang dan marahnya, akan selalu bertujuan dan bermuara demi kebaikan dan kasih sayang terhadap sesama, kebaikan dan kasih-sayang tidak bersifat semu, dan tidak temporer, serta tidak berindikasi kepentingan-kepentingan melainkan menembus batas dunia yang fana ini, hingga ke *The hereafter* (*akhirat*).

JALAN SUKSES KEEMPAT: MALIKI YAUMIDDIN

Kehidupan yang dilalui manusia tidak hanya di dunia saja, tetapi berlanjut pada kehidupan akhirat, yang perlu difahami adalah kehidupan di dunia ini akan menjadi penentu kehidupan akhirat, artinya dunia merupakan media untuk mempersiapkan diri menuju akhirat dengan segala bekal yang akan dibawa. Bekal yang banyak dan baik akan berakibat pada kenyamanan setiap orang untuk menjalani kehidupan yang damai di akhirat.

Keyakinan akan adanya hari pembalasan amal perbuatan selama di dunia dan kesadaran berupa keharusan bekerja keras guna mencapai kebaikan dan prestasi, mengasihi sesama makhluk, memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada sebaik mungkin, harus tertanam dalam benak setiap orang dan menjadi spirit dalam berusaha, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Q.S. *"apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah di muka bumi, carilah anugrah Allah SWT, dan ingatlah banyak-banyak kepada Allah .."*. Namun, meski ia bekerja segiat dan sebaik mungkin, ia menyadari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengakui bahwa ia kelak ada hari pembalasan *(Maaliki Yaumiddiin)* dan ia akan mempertangungjawabkan segala amalnya.

Dengan memahami bahwa dunia ini merupakan jalan yang menentukan kehidupan akhirat, maka sikap kehati-hatian dalam bertindak dan bertutur kata adalah kunci kesuksesan dalam berbagai bidang, karena sikap tersebut merupakan refleksi dari pengakuan akan adanya hari perhitungan dan pembalasan amal. Hati-hati dalam bertindak,karena semua tindakan akan menentukan kualitas pengendalian diri, hati-hati dalam bertutur kata, karena seluruhnya akan membuahkan ketenangan dan keselamatan.

Sebagaimana sebuah hadits yang menjelaskan bahwa *yang paling banyak menjadikan seseorang masuk Neraka adalah karena mulutnya*. Selain itu, sikap keikhlasan, kejujuran, dan profesional menapaki karya hidupnya. Ia akan selalu berusaha mempersembahkan sikap dan akhlak terbaik terhadap siapa saja, dan jauh dari sifat kemunafikan.

Bertolak dari sikap kehati-hatian dan kesadaran akan temporeritas kehidupan dunia serta sifatnya yang berupa ujian guna mencapai kesuksesan, akan mengantarkan seseorang pada pemahaman bahwa kesuksesan itu adalah apabila manusia mampu meningkatkan kiprah dan kualitas hidup dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan, segala bentuk perbuatan yang muncul selanjutnya hanya yang sesuai dengan perintah dan anjuran agama yang implikasinya adalah peningkatan kualitas diri dan memunculkan manfaat bagi sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang yang ingin sukses akan mempersembahkan bentuk *action* kehidupan dan kreasi serta inovasi terbaik, memanfaatkan segala potensi yang dimiliki: potensi fitrah, nafsu, akal (hati), pendengaran, penglihatan, dan sebagainya akan difungsikan dan dimanfaatkan secara maksimal.

Sebab ia sadar betul bahwa apa yang diperbuatnya harus dipertanggungajawabkan pada "*yaumiddin*", yaitu hari pembalasan amal perbuatan, dan dilihat serta dinilai oleh Allah dan segenap orang-orang yang beriman. Allah berfirman: *'beramallah maka Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman akan melihat amal perbuatan kamu itu'*.

JALAN SUKSES KELIMA: IYYAKA NA'BUDU WAIYYAKA NAST'AIN

Manusia apabila dibandingkan dengan makhluk yang lain merupakan ciptaan Allah yang sempurna dan paling baik penciptaannya, namun di sisi Allah manusia merupakan makhluk lemah, dalam hidup di dunia membutuhkan sandaran untuk beribadah dan meminta pertolongan. Manusia akan kuat menjalani hidup apabila memiliki sandaran yang kuat, yang diperoleh dengan mendekatkan diri kepada Allah *al-Qowiyyu* dengan beribdah.

Hidup sama dengan ibadah, artinya aktivitas keseharian, hidupnya tidak akan bernilai ibadah apabila; 1) tidak diniatkan dengan niat ibadah, baik itu aktivitas yang bentuknya memang merupakan aktivitas ibadah, seperti shalat, puasa, dan sejenisnya atau dalam aktivitas yang merupakan refleksi fitrah jasmaniyah manusia, misalkan bersosial, menikah, mandi, makan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejenisnya; 2) aktivitas tersebut dilakukan dengan standar aturan yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Bijaksana.

Hidup adakalanya sulit, berat dan susah tetapi tidak sulit untuk memperoleh hidup yang mudah, ringan dan senang. Hidup akan terasa sulit, berat dan susah apabila manusia tidak memiliki sandaran yang kuat yaitu kurang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Yang Maha Pemberi kekuatan. Sebaliknya, hidup akan terasa mudah, ringan dan senang apabila manusia memiliki sandaran yang kokoh, konsisten dan loyal dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan ibadah.

Setiap mukmin harus selalu memunculkan sikap hidup yang kosistens loyalitas yang sejati. Pandangan hidup dan sikapnya tidak akan didasarkan pada fanatisme buta terhadap (fisik) figur, tetapi lebih tertuju pada keberpihakan norma-norma dan perilaku yang dimunculkan dari figur. Sikap fanatiknya hanya kepada nilai-nilai kebenaran, berani dan takut hanya didasarkan pada ukuran nilai kebenaran yang tidak diragukan.

Dengan kata lain, ia hanya memiliki konsistensi hanya kepada Allah yang Maha Benar dan dalam hal kebaikan saja. Loyalitas yang ada dalam dirinya adalah loyalitas terhadap Tuhan, Al-Haqq, Yang Maha Benar. Hidupnya akan diisi dengan berbagai kebaikan, sebab ia telah meyakini dan sadar betul bahwa segala sepak terjang dirinya serta potensi yang dianugrahkan dalam dirinya berelasi langsung dengan ibadah dan beribadah.

Beribadah bagi setiap muslim adalah hidup itu sendiri. Sehingga ukuran kesuksesan adalah apabila setiap orang telah berhasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempersembahkan karya terbaiknya, dan salah satu indikasi karya terbaik adalah memberikan manfaat dan maslahat bagi sesama. Dengan demikian sukses di sini adalah apabila ia mampu mempersembahkan amal terbaik dan dapat melaksanakan pengabdian terbaik kepada Allah Swt. Diantara amal terbaik indikasinya adalah standar kemanfaatan yang tinggi dan seluas-luasnya bagi kemanusiaan,lingkungan serta taraf kemaslahatan yang dirasakan masyarakat luas.

Ada usaha kuat untuk mencapai kesuksesan, diantaranya dengan menguatkan, memperdalam pengetahuan dan wawasan serta membekali diri dengan berbagai skill ataupun keahlian positif. Nabi Saw. bersabda: *"Orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari pada orang mukmin yang lemah"*. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman: *"hendaknya orang-orang (yang beriman) takut/khawatir andaikata mereka meninggalkan di belakang mereka keturunan-keturunan yang lemah,..."*.

JALAN SUKSES KEENAM: IHDINASHIROTOL MUSTAQIN

Dunia adalah jembatan menuju akhirat, di dalamnya terdapat berbagai jalan yang dilalui manusia, ada jalan yang lurus dan ada jalan yang sesat. Jalan yang lurus adalah jalan kebenaran yang menawarkan kesuksesan dan kebahagiaan. Sebaliknya, jalan sesat adalah jalan yang jauh dari kebenaran dan menawarkan kegagalan dan kesengsaraan.

Allah Swt, menganugerahkan iradah (*kebebasan*) untuk memilih jalan hidupnya, namun Allah Swt menginginkan manusia sebagai wakil di muka bumi untuk memilih jalan lurus dengan membekali berbagai potensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melekat dalam diri yang berupa potensi jasmani yang berwujud pada kesempurnaan serta kekuatan fisik yang dapat digunakan untuk berusaha. Potensi rohani yang berwujud akal untuk berfikir, hati untuk memilih dan memutuskan dan fitrah yang mengarahkan manusia pada jalan kebenaran.

Disamping potensi yang melekat pada diri manusia itu sendiri, Allah juga memberikan petunjuk dan bimbingan melalui para nabi dan rasul serta kitab suci yang dibawanya. Kesemua potensi itu akan bermanfaat dan berdayaguna apabila manusia mampu memberdayakan dengan baik yaitu digunakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Swt.

Jalan panjang kehidupan manusia dilalui dengan berbagai ujian dan tantangan yang akan menentukan apakah manusia memilih jalan yang lurus atau jalan yang sesat. Jalan hidup setiap muslim harus dilalui dengan ukuran kebenaran dan kebaikan di bawah otoritas dan legitimasi Allah Swt yang tertuang dalam Al-Qur'an yang secara ringkas terangkum dalam surat al-Fatihah. Termasuk jalan sukses adalah sejalan dengan konsep Allah, yaitu hanya dapat dilalui dengan cara-cara yang benar yang ditunjukkan oleh Allah.

Andaikata sukses dilalui dengan cara yang tidak dibenarkan Allah maka kesuksesan itu bersifat semu dan sementara sehingga akan menimbulkan rasa kecewa. Sebab otoritas kesuksesan itu hanya di tangan Tuhan Yang Maha Pencipta. Sehingga, barometer kesuksesan yang diformulasikan itu mencerminkan kualitas diri.

Penghayatan dari ayat *ihdinash shirothol mustaqim* akan mumunculkan sebuah sikap psikologis yang waspada dalam menjalani hidup,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teliti dalam memilih cara dan jalan hidup, jauh dari kesombongan, memiliki semangat yang tinggi selalu mencari ilmu pengetahuan, tawadlu, taat aturan dan prosedur yang ada dan lain sebagainya. Kecenderungan negatif nafsiyah, semisal: suka mencela orang lain, egois, dan memperturutkan nafsu hedonistik (kesenangan) akan terkendali dan terkontrol selalu berada dalam batas-batas kewajaran di bawah naungan norma-norma jalan yang lurus.

Prilaku motorik dan kejiwaan (psikologis) yang lahir dari penghayatan *ihdinash shirothol mustaqim* dapat memunculkan komitmen kuat untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam menentukan jalan hidup dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan yang baik dengan selalu berbuat yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diembankan.

Apabila potensi negatif nafsiyah telah bisa dikendalikan dibawah nilai-nilai shirotol mustaqim, misalkan: suka mencela orang lain, egois, dan memperturutkan nafsu hedonistik, dan sebagainya; kemudian ditumbuh kembangkan secara kokoh potensi diri, seperti potensi akal, dan fitrah manusia, maka pintu kesuksesan hidup akan terbuka lebar baginya, baik itu kesuksesan di dunia maupun kehidupan akhirat.

JALAN SUKSES KETUJUH: SHIRATOL LADZINA 'AN'AMTA 'ALAIHIM

Dalam sejarah kehidupan manusia disebutkan berbagai macam tipe manusia yang mengalami kesuksesan dan kegagalan. Mereka yang sukses adalah yang selalu mengikuti tata aturan yang telah ditetapkan oleh Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Swt, sedangkan mereka yang gagal adalah yang selalu melanggar tata aturan yang telah ditetapkan Allah Swt. Hal ini membuktikan bahwa kesuksesan hanya akan diperoleh apabila diusahakan sesuai dengan tata aturan yang telah ditetapkan.

Bagian dari ikhtiyar manusia dalam meraih kesuksesan adalah melalui pencermatan terhadap sejarah guna mengambil i'tibar (pelajaran). Karena hal itu merupakan suatu keniscayaan sebagai prasyarat mencapai kesuksesan. Kesuksesan itu akan lebih mudah dicapai apabila seorang muslim mampu mengimplementasikan pengalaman yang diperoleh pada bidang apapun.

Dengan mengambil i'tibar (pelajaran) dari sejarah masa lalu akan nampaklah sebuah sikap untuk selalu belajar dengan sungguh-sungguh dalam melakukan perbuatan yang terbaik bagi kehidupan dan introspeksi terhadap fenomena sejarah serta fenomena perubahan zaman agar kesalahan yang terjadi di masa lalu tidak terulang kembali.

Mengadopsi kebaikan-kebaikan dari sejarah dan memanfaatkannya demi kesuksesan (falah) adalah bagian dari usaha yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Memperbaharui kekurangan dan kelemahan sejarah dengan memperoduksi solusi baru dapat dijadikan tameng untuk mengantisipasi kegagalan, bahkan dengan usaha yang dilakukan itu akan dapat membantunya memprediksi irama sunnatullah yang diberlakukan oleh Yang Maha Pencipta terhadap hamba-hambaNya. Itu semua diperoleh selain melalui potret generasi sebelum dirinya –baik dari kesuksesan maupun gagalnya- juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui kitab Allah (Al-Qur'an). Dengan demikian, dalam dirinya telah tergambar dengan terang dan jelas jalan menuju kesuksesan.

Prilaku motorik dan kejiwaan (psikologis) yang lahir dari upaya mengadopsi kebaikan-kebaikan dari sejarah adalah prilaku mengikuti jalan sukses generasi terdahulu dan menghindari atau tidak mengulangi kesalahan generasi terdahulu, dengan sedikit melakukan perubahan yang bersifat adaptif terhadap arus perubahan zaman. Salah satunya adalah dilakukan dengan cara "*menjaga nilai-nilai dan tradisi generasi terdahulu yang baik, dan mengambil trobosan dan temuan-temuan baru yang lebih maslahah*".

JALAN SUKSES KEDELAPAN: GHOIRIL MAGHDHUBI 'ALAIHIM

Menurut ayat ini dapat dimunculkan konsep pengetahuan bahwa kesuksesan, kebaikan, dan kejayaan, hanya bisa diperoleh dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang digariskan Allah Swt, dan dengan mengambil i'tibar seusai melihat sejarah masa lampau.

Adanya kegagalan dalam hidup, juga dapat disebabkan karena seorang mengetahui kebenaran tetapi tidak mejalankannya, tidak melaksakan amar-makruf nahi mungkar, atau mengimani sebagian. Sedangkan sebagian yang lain diragukan serta mengamalkan sebagian dan yang sebagian diabaikan. Kegagalan disebabkan tidak adanya kepedulian sosial dalam melakukan tindakan preventif terhadap kemungkaran, mencegah, menolak, menghilangkan kemugkaran-kemungkaran; dan disebabkan hanya mengamalkan petunjuk kesuksesan yang digariskan Allah hanya setengah-setengah, mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penghayatan ayat ini muncullah sikap profesional, berbuat sesuai prosedur yang baku yang sudah ditetapkan, dan berusaha komit dan konsisten terhadap aturan main, juklak (petunjuk pelaksanaan) yang ada. Menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah disepakati bersama guna mencapai keberhasilan dan tujuan bersama.

Implementasi terhadap aturan itu dijalankan dengan sebaik mungkin dan seefektif dan efisien serta dengan dibarengi dengan proses evaluasi dan *assesment* terhadap aturan dan prosedur serta implementasinya. Kemudian tidak akan berkhianat, melencengkan hukum dan aturan yang diundangkan.

Apabila seseorang mampu mengimplemetasikan pesan-pesan Al-Qur'an dalam kehidupan maka akan melahirkan pribadi-pribadi yang terampil mengatur strategi, dan mengaplikasikannya dalam tindakan yang efektif dan efisien. Efektif artinya tepat pada sasaran yang dimaksud, sedang efisien adalah hanya dengan cara yang mudah dan waktu yang relatif singkat, namun dengan keberhasilan yang maksimal.

JALAN SUKSES KESEMBILAN: WALADHDLOLLIN

Kebaikan dan kesuksesan yang diusahakan oleh setiap muslim dalam berbagai bidang kehidupan harus didasarkan dengan ilmu. Apabila berbagai usaha untuk mencapai tujuan itu tanpa didasari dengan ilmu, atau didasari dengan praduga-praduga *(wahm)* maka keberhasilan yang dicapai adalah semu dan mudah rapuh, dan dibelakangnya akan menimbulkan kelemahan, kehancuran, dan kebencian-kebencian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pilihan sikap yang dimunculkan agar tidak tersesat adalah agar tetap mengobarkan semangat yang tinggi untuk selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya tanpa batas usia dan waktu demi mencapai kebenaran (*research*) terus-menerus. Hal itu lakukan guna memenuhi fitrah keingintahuannya, memperoleh pengetahuan yang benar agar tidak tersesat atau salah jalan dalam mencapai tujuannya, sasaran, cita-cita kesuksesan yang diharapkan.

Mengaplikasikan sikap dengan selalu menelaah perkembangan dan perubahan, selalu meng-update dan meng-upgrade pengetahuan juga wawasannya guna menghadapi tantangan zaman, menghalau arus negatif perubahan dan memanfaatkan segi positif perkembangan dan kemajuan sebagai fasilitas. Selain itu, selalu menelaah, mengevaluasi aturan dan prosedur serta mengaplikasikannya, mengembangkannya guna mencapai target maksimal dan efisien agar dapat mempercepat serta memudahkan mencapai tujuan kesuksesan hidup.

Mengusahakan skill-skill positif dan mengembangkan demi mempersiapkan diri untuk tetap kokoh berada dalam jalan yang lurus adalah skill yang diperoleh seseorang yang selalu berusaha sungguh-sungguh untuk memberdayakan dan mengembangkan dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian waspada dan berusaha untuk menjauhi segala bentuk keraguan serta ketidakpastian.

Segala aktivitasnya hanya didasarkan pada ilmu dan pengetahuan yang benar, tidak pada praduga atau asumsi-asumsi yang tidak berdasar. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini sejalan dengan firman Allah SWT*:"sesungguh prasangka itu tidak bisa mencukupi dan mencakupi kebenaran".*

Mengingat ilmu pengetahuan itu berkembang, maka orang yang berpegang pada ayat ini akan memunculkan atau berusaha untuk memperoleh *skills*(keterampilan), kecakapan-kecakapan baru yang diperlukan seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Ia akan selalu haus terhadap temuan-temuan keilmuan baru dan selalu meng*update* dan meng*upgrade* pengetahuan yang dibutuhkan oleh perubahan zaman.

JALAN SUKSES KESEPULUH: AMIN YA RABBAL 'ALAMIN

Setiap muslim harus senantiasa memperjuangkan terwujudnya amal terbaik yang bisa dilakukan, hal ini merupakan doktrin pokok yang tidak bisa ditawar. Setelah mewujudkan amal terbaiknya, setiap muslim harus menerima dengan tawakkal apa pun hasil dan kensekuensi dari ikhtiyar yang sudah diusahakan. Disamping itu setiap muslim harus mengembangkan sikap ta'awun (tolong-menolong) dalam urusan al-bir wa al-taqwa, memberikan kedamaian dan ketenangan pada masyarakat sekitar merupakan konsep kuat tercapainya keamanan dan keselamatan yang menjadi dasar kesuksesan dalam menjalani status *khalifah fil ard*, memakmurkan dan mendamaikan dunia.

Doa amin ini, harus dapat memunculkan sikap optimisme yang tinggi, dan tawakkal setelah melewati usaha dan kerja keras, mengusahakan amal terbaik, selanjutnya menerima dengan tawakkal apa pun hasil dan kensekuensi dari ikhtiarnya. Bahkan memiliki sikap ta'awun yang tinggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal al-bir wa al-taqwa. Memberikan jaminan kedamaian dan ketenangan pada masyarakat sekitar dengan berbagai strategi dan pendekatan.

Perilaku motorik dan psikis dari Amiin yaitu selalu berusaha menempatkan diri dalam aturan main yang benar dan baik, prosedur kerja yang tepat, dan fokus dan konsentrasi serta ketenangan diri yang kuat dalam menapaki berbagai aktivitas dan perilaku kehidupannya. Bahkan akan menjadi penyejuk dan penolong bagi masyarakat tanpa pilih kasih.

Spirit Amiin manjadi pemandu skill bagi setiap muslim dalam mengembangkan potensi diri dan memerankan diri dalam berbagai tugas, fungsi dan peranan setiap orang yang berorientasi kesuksesan hidup dunia akhirat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

MEMAHAMI KONSTRUKSI SOSIAL DAKWAH POLITIK SUYOTO

A. Konstruksi Dakwah Politik Suyoto: Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi

1. Eksternalisasi: Momen Adaptasi Diri

Eksternalisasi merupakan proses awal dalam konstruksi sosial. Ia merupakan momen daptasi diri dengan dunia sosio kultural. dalam momen ini, sarana yang digunakan adalah bahasa dan tindakan. Manusia menggunakan bahasa untuk melakukan adaptasi dengan dunia sosio-kulturalnya dan kemudian tindakannya juga disesuaikan dengan dunia sosio-kulturalnya. Pada momen ini, terkadang dijumpai orang yang mampu beradaptasi dan juga ada yang tidak mampu beradaptasi. Penerimaan dan penolakan tergantung dari mampu atau tidaknya individu untuk menyesuaikan dengan dunia sosio-kultural tersebut. Secara konseptual, momen penyesuaian diri dengan dunia sosio kultural tersebut dapat digambarkan sebgai berikut:

Pertama, penyesuaian dengan aliran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di birokrasi maupun masyarakat. Suyoto terlahir dari keluarga yang bercondong pada Muhammadiyah. Fakta tersebut sempat menjadi rintangan kecil ketika Suyoto harus memimpin daerah yang mayoritasnya merupakan warga NU. Walaupun Suyoto lebih sering berkegiatan di lingkungan Muhammadiyah, ia juga aktif di beberapa pengajian NU. Ia dekat dengan beberapa kiai-kiai NU tempat ia mengaji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kang Yoto menikahi putri seorang kiai NU. Fakta bahwa isterinya ialah putri tokoh besar NU seringkali ia jual untuk membuktikan kadar ke-NU-annya selama kampanye maupun awal ia menjabat Bupati Bojonegoro. Selain itu, Suyoto juga mempunyai kedekatan personal dengan beberapa kiai NU. Relasi tersebut ia gunakan untuk membangun citra bahwa dirinya seorang "Muhammadiyah-NU". Dengan harapan, masyarakat dan para birokrat yang loyalis NU di Bojonegoro menjadi tidak ragu, tidak merasa ada batasan-batasan dan kecenderungan untuk mengelompok hanya ke sesama loyalis aliran.

Dalam mewujudakan kebersamaan di anatar para birokrat, maka tidak salah jika Suyoto berusa meng-NU-kan diri, dengan melakukan *ziyarah* ke pemakaman, tahlilan, yasinan, sedekah bumi, tayuban dan lain-lain. Semua itu dilakukan untuk menjaga keseimbangan antar individu. Berger[1] mengasumsikan bahwa, memang banyak pengalaman manusia dengan yang lain terjadi di dalam hubungan tatap muka., sehingga setiap individu haruslah memandang dan memahami manusia lainnya di dalam konteks itu. Melalui proses budaya tersebut, terjadilah kemudian proses pelembagaan dan institusionalisasi, yang merupakan tindakan sehari-hari. Tindakan sehari-hari yang telah melembaga tersebut, tidak hanya dipahami oleh si empunya tindakan, tetapi dipahami oleh individu lainnya dalam kerangka *negosiated meaning.*

[1] Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padahal jika membaca data Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Bojonegoro, 90% warganya merupakan penganut NU, 5% penganut Muhammadiyah dan 5% sisanya adalah warga non muslim dan kepercayaan lain. Tapi bagaimanapun, bagi Suyoto politik aliran itu kalah dengan pragmatisme. Pragmatisme adalah sesuatu yang menurutnya nyata dihadapi oleh rakyat. Dan kebetulan Suyoto saat terpilih menjadi Bupati ia mendapatkan momentum di Bojonegoro. Pada saat orang lelah dengan politik aliran, reformasi, di mana orang-orang bicara aliran-aliran. Reformasi sudah berjalan hampir 10 tahunan, nyatanya belum banyak dampak yang ditimbulkan. Justru itulah rakyat sangat menginginkan dampaknya, dan rakyat punya hak memilih dengan DPR.

Maka kemudian Suyoto menawarkan solusi pragmatis praktis untuk masalah Bojonegoro yang waktu itu, masalah utamanya adalah jalan. Masalah utamanya adalah pengairan, orang tidak bisa makan, orang tidak bisa berobat, tidak bisa sekolah, kemudian pemerintah dianggap absen dan nipu rakyat. Masalah-masalah seperti itulah yang Suyoto berikan jawabannya. Kemudian di samping itu, orang sakit dicarikan solusinya, sehingga orang tidak mampu pun tetap bisa berobat dan Suyoto sekolahkan anak-anak yang tidak mampu sekolah karena biaya, maka Suyoto carikan beasiswa.

Konsepsi pragmatis yang dilakukan Suyoto di atas, sejalan dengan konsepsi Berger tentang motif yang disebutnya sebagai *pragmatic*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motive.[2] Motif ini terjadi ketika pengetahuan manusia ditentukan oleh kepentingan pragmatis individu setiap hari. Manusia melakukan tindakan berdasarkan atas pengetahuannya tentang ada atau tidakntya kepentingan. Jadi, semakin besar kepentingan di balik tindakan, maka akan semakin besar pula usaha untuk melakukan tindakan tersebut. Motif pragmatis inilah yang sesungguhnya memicu berbagai benturan di antara individu. Namun demikian, karena realitas kehidupan keseharian, hakikatnya adalah berbagi dengan yang lain, maka manusia mengembangkan pengetahuan untuk berbagi dengan yang lain. Melalui pengetahuan seperti itulah, maka akan terjadi keteraturan dan keseimbangan dalam dinamika sosial.

Kedua, Suyoto mengawali pemerintahannya dan mulai beradaptasi dengan para birokrat maupun masyarakat melalui beberapa cara, di antaranya: (1) Dengan membuka ruang untuk nyambung itu dengan membagikan *Contack Person*nya. Dengan cara itu, rakyat bisa menyampaikan usulan, umpan balik dan permasalahan via SMS. (2) Suyoto hadir hadir keliling untuk menjumpai warga yang tersebar di 27 Kecamatan, 420 Desa dan 7 Kelurahan, dengan melihat urgensi permasalahan maupun isu yang perlu untuk segera ditangani. (3) Secara fungsional berkomunikasi melalui Perangkat Desa, Kades, Lurah dan Camat itu. Sedangkan cara yang ke (4)Dengan membuka dialog publik setiap hari Jum'at. Dialog Publik pada hari Jum'at itu sebenarnya dalam

[2] Peter L Berger dan Kellner Hansfried, *Sosiologi Ditafsirkan Kembali* (Jakarta: LP3S, 1985), 294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangka memberikan ruang kepada masyarakat untuk berbicara secara langsung dengan saya dan seluruh jajaran pemerintah.

Di luar keempat cara tersebut, Suyoto juga mengembangkan forum dialog dan komunikasi tematik baik melalui media maupun secara langsung *(face to face).* Beberapa dialog dan komunikasi tematik itu seperti tema pertanian, tema ekonomi, sosial, lingkungan dan sebagainya. Selain itu, Suyoto juga menggunakan media sosial dan teknologi informasi untuk menyapa, menanggapi dan menjalin relasi dengan semua kalangan.

Terkait pemanfaatan media sosial untuk penjangkauan dan melibatkan warga, awalnya Suyoto menggunakan *facebook*, tapi ternyata *facebook* ini kurang efektif untuk menjangkau kalangan akar rumput di wilayah pedesaan. Solusi yang dilakukan Suyoto adalah mengintegrasikan antara SMS, *facebook,* dan radio. Proses integrasi inilah yang menjadi landasan dari pengembangan sistem *online* ini. Apresiasi, layanan, dan pengaduan dikelola menjadi input dalam aplikasi LAPOR UKP4, dan melalui sistem inilah Suyoto dan anggota pegawai birokrat beserta masyarakat bisa lebih responsif dalam menjangkau aspirasi serta melibatkan seluruh warga dalam penyelenggaraan pembangunan. Belakangan ini, dengan adanya WA *(Whats App)* input dari warga menjadi lebih cepat lagi. Untuk itu, juga telah dikembangkan group WA, yang keanggotaannya terdiri dari seluruh Muspida, SKPD, sampai Camat, SKPD punya group WA dengan *stakeholder*-nya, tingkat Camat maupun Kepala Desa juga punya media ini. Jadi kalau ada keluhan, permasalahan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggapan dan aspirasi warga, bisa ditanggapi dengan cara di-*upload* dalam *group* WA. Dengan cara itu, tidak lebih dari 10 menit semua pengguna dari layanan tersebut mampu mendapatkan data yang akurat tentang apa yang terjadi di lapangan termasuk *evidence*-nya (foto, video, dan data pendukung lainnya). Pada kasus di mana diperlukan komunikasi dan respon cepat-tepat seperti ketika terjadi banjir misalnya, maka *group* menjadi sangat penting.

Selain memanfaatkan media tersebut, Suyoto juga menggunakan Blackbarry untuk menyampaikan buah permenungan, dukungan, refleksi, sapaan serta kristalisasi dari pikiran dan perasaan Suyoto. Semuanya itu ditulis dalam bentuk puisi, prosa atau kompilasi atas berbagai informasi yang kemudian oleh Suyoto di-*broadcast* kepada semua kontak. Buah permenungan, sapaan, refleksi ini diperlukan agar semua orang khusunya warga Bojonegoro tidak kehilangan "roh dan *spirit"* dari setiap aktivitas yang dilakukan. Media sosial lain juga digunakan oleh Suyoto untuk disemenisasi dan sosialisasi adalah Youtube. Dan dari media ini juga masyarakat bisa mendengarkan dari banyak pemikir maupun pemimpin dunia.

Pada intinya, semua cara tersebut ditempuh dalam rangka menjangkau-merangkul semua pemangku kepentingan pembangunan. Agar masukan, aspirasi, keluhan, harapan dari warga tidak sekedar ditampung tanpa tindak lanjut. Selain itu yang tidak kalah penting adalah Suyoto menggunakan IT modern untuk mengolah berbagai masukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat itu menjadi keputusan politik dan manajemen pembangunan. Aplikasi IT ini diperlukan untuk memastikan agar masukan tersebut dapat dipilih secara tepat dan kemudia diterjemahkan dalam sistem perencanaan dan penyelenggaraan program-program pembangunan. Dengan cara ini, masyarakat juga dapat mengotrol, memantau dan mengevaluasi setiap keputusan politik dan manajemen pemerintah daerah.

Ketiga, Penysuaian nilai dengan budaya para birokrat pemerintah Bojonegoro. Suyoto sejak pertama kali menjabat sebagai Bupati selalu memasukkan unsur *value*. Di mana manusia selalu ia sentuh, dengan berfikir tentang "kita ini dari mana, untuk apa, lalu bagaimana kita menjadikan diri kita ini bermakna, bersyukurlah kita mendapatkan peran-peran birokrasi, ini adalah kesempatan kita beramal sholeh." Nilai-nilai yang ditanamkan Suyoto memberikan kerangka aksiologi, maka tidak salah jika orang lain menilai dan merasakan bahwa pemkab Bojonegoro itu seperti pesantren. Mungkin itulah yang Suyoto maksudkan dalam dakwah politiknya, dengan memasukkan unsur-unsur *value*, *spirit* Al-Fatihah dalam semua prosesnya.

Apa yang telah dilakukan oleh Suyoto tersebut tidaklah lepas dengan pengalaman subjektifnya. Ketika masih muda ia sudah terlibat dalam dunia dakwah. Ia aktif dalam organisasi dakwah Muhammadiyah termasuk gemarmenulis buku, ceramah kesana kemari. Bahkan pengalaman pribadinya menjadi rektor dan pernah menjabat sebagai DPR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pusat, sudah berang tentu menjadi bekal ia dalam memimpin Bojonegoro dengan *style* komunikasi politik yang dimilikinya.

Bahasa sebagai media dakwah politik Suyoto dengan bawahan, menjadi seperti mantra bagi pemimpin daerah dalam menyampaikan pesan kepada anggota birokratnya, sehingga dapat dimengerti secara jelas dan mampu diamalkan. Oleh karena itu, bahasa persuasif Suyoto sangatlah menjadi rangsangan dan motivasi kuat bagi bawahan untuk menjalankan tanggung jawab pemerintah secara bersih dan baik. Seperti yang dikatakan Berger bahwa untuk menularkan atau mentransformasi pengalaman subjektif, salah satu diantara instrumen penting ialah bahasa. Bahasa digunakan manusia untuk menobjektivasi pengalaman-pengalaman tersebut kepada orang lain.

Upaya yang telah dilakukan Suyoto adalah mengadakan pengajian yang dikemas dalam beberapa kegiatan di antaranya; membuat program outbond dan refleksi ke hutan. Jadi para keseluruhan birokrat diajak pergi ke hutan dan nantinya diberikan motivasi, refleksi dan siraman rohani. Namun, hasil yang didapat masih jauh dengan harapan bahkan cenderung ada penolakan dari beberapa birokrat. Karena untuk mengikuti program ini tidak sedikit para birokrat yang merasa ada unsur keterpaksaan. Dengan berbagai alasan seperti outbond ini durasi pelaksanaannya panjang, kemudian materi yang didapatkan itu sulit untuk diimplementasikan, dan juga biayanya yang cukup mahal. Karena tidak efektif, akhirnya dilakukan survei oleh Suyoto dan Tim ternyata ada tujuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karakter pegawai ataupun masyarakat Bojonegoro yang disebut dengan tujuh setan.

Untuk melawan tujuh setan tersebut maka lahirlah konsep Al-Fatihah atau yang disebut "Jalan Sukses Melalui Al-Fatihah". Program ini berjalan selama tiga tahun dan sudah menjangkau ke seluruh birokrat mulai dari para birokrat Pemkab sampai di tingkat kelurahan. Selain itu juga dilakukan pengajian kebangsaan yang pesertanya adalah Bupati, para birokrat di masing-masing dinas dan juga masyarakat setempat yang terjadwal menjadi tempat acara.

Perlulah ditarik kembali konsepsi Berger[3] dalam kontek Suyoto dalam mengeksternalisasi pengalamannya kepada para birokrat bahwa, di dalam kehidupan ini ada aturan-aturan atau hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi berbagai institusi sosial. Aturan itu sebenarnya ialah produk manusia untuk melestarikan keteraturan sosial, sehingga meskipun aturan di dalam struktur sosial itu bersifat mengekang, tidak menutup kemungkinan adanya "pelanggaran" yang dilakukan oleh individu. Pelanggarandari aturan itulah yang disebabkan oleh proses eksternalisasi yang berubah-ubah dari individu untuk menyesuaikan dengan dengan aturan yang digunakan untuk memelihara ketertiban sosial tersebut. Oleh karena itu, problem perubahan berada di dalam proses eksternalisasi ini.

> *"Banyak orang yang mau berdakwah tapi kenapa berpolitik tidak. Bukankah lewat politik, kekuasaan, kita bisa membuat aturan, kita bisa mengalokasikan anggaran dan bisa mendayagunakan resource. Di situlah kemudian tujuan politik*

[3] Berger dan Luchmann, (1990), 185-233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *diberi makna, diberi value sebagai bagian dari keberislaman dan keberagamaan. Tentu keagamaan bukan keagamaan yang simbolik tapi keagamaan-keagamaan yang substantif tentang makna keadilan, makna kasih sayang, makna hidup berkemajuan, bersih, saling toleran dan menghargai. Bagi saya tulah esensi dari pada dakwah dan itulah esensi dari pada politik keberagamaan." (Suyoto).*

2. Objektivasi: Momen Interaksi Diri dengan Dunia Sosio-kultural

Di dalam objektivasi, realitas sosial itu seakan-akan berada di luar diri manusia. Ia menjadi realitas objektis. Karena objektif, sepertinya ada dua realitas, yaitu realitas diri yang subjektif dan realitas lainnya yang berada di luar diri yang objektif. Dua realitas itu membentuk jaringan interaksi intersubjektif melalui proses pelembagaan atau institusionalisasi. Proses di dalam objektivasi itu dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, pelembagaan atau institusionalisasi, yaitu proses untuk membangun kesadaran menjadi tindakan. Di dalam proses pelembagaan tersebut, nilai-nilai yang menjadi pedoman di dalam melakukan interpretasi terhadap tindakan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan sehingga apa yang disadari adalah apa yang dilakukan. Mereka yang melakukan pelatihan dalam membangun karakter melalui Jalan Sukses Al-fatihah, melakukan pengajian kebangsaan, outbond ke hutan dalam rangka mendapatkan siraman rohani dan refleksi diri tentunya tidak hanya berdasar atas tindakan berpura-pura, tetapi telah menjadi tindakan bertujuan.Mereka tahu sebenarnya tentang apa manfaat tindakan itu bagi dirinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam membangun birokrasi yang bersih dan baik mereka selalu mengadakan dialog interaktif setiap hari jum'at siang yang paginya diisi dengan melakukan evaluasi kerja pada masing-masing dinas untuk mengetahui hambatan-hambatan dan problem pekerjaan yang seharusnya perlu dicarikan solusi penyelesaiannya. mereka selalu bersikap terbuka kepada sesama birokrat maupun masyarakat dengan menjalan transparansi anggaran yang mana publik dapat langsung mengtahui secara mudah di wibesite Pemkab Bojonegoro kapanpun dan dimanapun. Mereka tahu betul apa tujuan dan arti pentingnya dengan dilakukan kegiatan-kegitan tersebut. Sesungguhnya, melalui proses pelembagaan tersebut, tindakan individu telah diperhitungkan secara matang dan konseptual, sehingga tindakannya itu menjadi tindakan rasional bertujuan.

Kedua, habitualisasi atau pembiasaan, yaitu proses di mana tindakan rasional bertujuan itu telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak dibutuhkan lagi berbagai penafsiran terhadap tindakan, karena tindakan tersebut telah menjadi bagian dari sistem kognitif dan sistem evaluatifnya. Peta kesadarannya telah menerima dan sistem evaluasi yang berasal dari sistem nilai juga telah menjadi bagian di dalam seluruh mekanisme kehidupannya. Dengan demikian, ketika suatu tindakan telah menjadi sesuatu yang habitual, maka telah menjadi tindakan mekanis, yang mesti dilakukan begitu saja. Seorang akan datang ke Pendopo Pemkab Bojonegoro jika hari jum'at siang untuk ikut berpartisipasi dalam acara dialog interaktif, memeraka akan segera mencarikan solusi jika ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang punya problem dan butuh penyelesaian, jika hal-hal itu menjadi *habitual action*-nya.

Mereka sangat tahu jika ingin memajukan pendidikan, maka mereka harus mencari duit dan menggalang dana. Kalau mereka berencana menolong rakyat yang kurang mampu, maka mereka harus menggerakkan amal.Mereka mendapatkan mandat dari rakyat maka mereka bicaranya adalah selalu *output* dan *outcome.* Rakyat menginginkan begini, *polesing*-nya begini, anggarannya begini, mereka merasa dibayar, hak-hak mereka diberikan, maka rakyat juga menginginkan seperti mereka. Mereka terbiasa bagaimana agar selalu melayani masyarakat dengan terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi, bagaimana berlaku adil antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Semua dilakukannya atas dasar adanya habitualisasi tersebut.

Dari keseluruhan proses ini, kata kuncinya terletak pada adanya agen yang memainkan peran sebagai individu atau sekelompok individu untuk proses penyadaran, pelembagaan, dan habitualisasi. Hampir semua proses dan habitualisasi memerlukan agen. Oleh karena, bisa jadi kesuksesan berbagai program yang diadakan Suyoto kepada para birokrat dalam membangun birokrasi pemerintah yang bersih dan baik itu juga karena faktor figur Bupati.[4]

[4] Institusi tidak hanya mengatur tetapi juga mengontrol aktivitas manusia sebaik mungkin. Sistem kontrol itu terjadi hanya saat ada proses institusionalisasi yang tidak sepenuhnya berhasil. Di dalam institusi inilah dikenal dengan konsep peran dan roles. Peranan Suyoto sebagai Bupati tersebut memediasikan makna subjektif dan objektivikasinya di dalam masyarakat di dalam dunia sosial. di dalam tataran kognitif, peran Suyoto memediasikan sektor spesifik dari sumberdaya umum pengetahuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anwar Arifin, menjelaskan dalam bukunya Komunikasi Politik, bahwa salah satu strategi komunikasi politik adalah merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Artinya, ketokohan politikus dan kemantapan lembaga politiknya dalam masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam berkomunikasi politik. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode, dan memilih media politik yang tepat.[5]

Ketokohan adalah orang yang memiliki kreadibilitas, daya tarik, dan kekuasaan, menurut Rahmat menyebutkannya *ethos.* Dengan kata lain ketokohan adalah *ethos,* yaitu gabungan antara kredibilitas, atraksi dan kekuasaan. Dimensi ethos yang paling relevan disini ialah kredibilitas, yaitu keahlian komunkator (pemimpin) atau kepercayaan kita kepada beliau. Apabila pemimpin memiliki tiga hal yang ini (kredibilitas, raksi, dan kekuasaan), maka ketokohannya dapat disebut juga sebagai tokoh utama pemimpin politik.

Suyoto di sini bukan saja menjaga dan merawat ketokohannya, lebih dari itu ia berusaha menjadi pribadi yang menarik di mata semua orang. Seperti yang pernah ia katakan:

> *"Saya menemukan rumus berpolitik di Bojonegoro. saya menggunakan politik cinta. Apa itu politik cinta? Cinta itu kata Imam Al-Asfari adalah "kecenderungan hati pada sesuatu karena sesuatu itu menarik". Jadi hukum daya tarik itu sudah universal. Bukan karena saya yang hebat, hukum yang diciptakan Allah ini yang hebat. Hukumnya mengatakan; siapa yang tawadhu' itu menarik. Ini kan hukum, hati kita semua suka orang yang*

[5]Anwar Arifin, *Komunikasi Politik, Filsafat, Teori, Tujuan, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *tawadhu', hati kita suka orang bersih, hati kita suka orang yang peduli, hati kita suka dengan siapapun orang yang adil, itu semua kan hukum. Nah saya tinggal berusaha untuk menjalankan. Saya itu fokus sebab bukan akibat. Saya menjalani yang menurut sunnatullah akan dicintai orang lain dan orang kalau cinta dia akan merelakan apapun."*

3. Internalisasi : Momen Identifikasi Diri dalam Dunia Sosio-Kultural

Internalisasi adalah proses individu melakukan identifikasi diri dalam dunia sosio-kulturalnya. Internalisasi merupakan momen penarikan realitas sosial ke dalam diri atau realitas sosial menjadi kenyataan subjektif. Realitas sosial itu berada di dalam diri manusia dan dengan cara itu maka diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunia sosio-kulturalnya.

Nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam suatu internal birokrasi pemerintah Bojonegoro telah disosialisasikan selama bertahun-tahun dan dilakukan secara turun temurun. Tentu saja untuk melakukan reorientasi atau perubahan nilai juga akan memakan waktu. Lama tidaknya waktu yang diperlukan untuk mengenalkan nilai yang baru sangat tergantung pada strategi yang disiapkan, perlu upaya yang sistematis, logis dan terukur. Beberapa cara yang umum dilakukan yaitu melalui pelatihan (pelatihan peran, belajar sosial, studi kasus, dsb), merumuskan doktrin baru bagi birokrat, ritual dan yang lebih tepat dengan memberi contoh.

Dalam tinjauan peneliti di beberapa dinas pemerintahan Bojonegoro, Suyoto dianggap sebagai pemimpin daerah yang cerdas dan memiliki keinginan kuat untuk berubah yang lebih baik. Selain itu Suyoto memiliki kekuasaan *(power)* dan sistem dalam membangun birokrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah Bojonegoro yang bersih. Maka digunakanlah "Jalan Sukses Melalui Al-Fatihah" sebagai instrumen dan sistem kontrol dalam membangun karakter dan *mindset* buruk para birokrat.Bukan para birokrat saja yang terkentrol melainkan juga Suyoto, sebagai agen tindakan.

Dari "Jalan Sukses Melalui Al-Fatihah" itulah kemudian di*brakdown* menjadi sebuah pemahaman. Belum dapat dipastikan juga bahwa "Jalan Sukses Melalui Al-Fatihah" ini mampu merubah segalanya, tapi training itu mampu memberikan nuansa baru. Jika mereka para birokrat mempunyai masalah pribadi dengan keluarganya, maka mereka tidak mungkin mengurusi pekerjaan dengan baik. Karena hal itu sudah melawan ketaatan terhadap Jalan Sukses Al-Fatihah ke delapan yaitu, *"Ghoiril Maghdhubi 'Alaihim".* Menurut ayat ini dapat dimunculkan konsep pengetahuan bahwa kesuksesan, kebaikan, dan kejayaan, hanya bisa diperoleh dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang digariskan Allah Swt, dan dengan mengambil i'tibar seusai melihat sejarah masa lampau.

Adanya kegagalan dalam hidup, juga dapat disebabkan karena seorang mengetahui kebenaran tetapi tidak mejalankannya, tidak melaksakan amar-makruf nahi mungkar, atau mengimani sebagian. Sedangkan sebagian yang lain diragukan serta mengamalkan sebagian dan yang sebagian diabaikan. Kegagalan disebabkan tidak adanya kepedulian sosial dalam melakukan tindakan preventif terhadap kemungkaran, mencegah, menolak, menghilangkan kemugkaran-kemungkaran; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan hanya mengamalkan petunjuk kesuksesan yang digariskan Allah hanya setengah-setengah, mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian.

Dari penghayatan ayat ini muncullah sikap profesional, berbuat sesuai prosedur yang baku yang sudah ditetapkan, dan berusaha komit dan konsisten terhadap aturan main, juklak (petunjuk pelaksanaan) yang ada. Menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah disepakati bersama guna mencapai keberhasilan dan tujuan bersama.

Implementasi terhadap aturan itu dijalankan dengan sebaik mungkin dan seefektif dan efisien serta dengan dibarengi dengan proses evaluasi dan *assesment* terhadap aturan dan prosedur serta implementasinya. Kemudian tidak akan berkhianat, melencengkan hukum dan aturan yang diundangkan.

Apabila seseorang mampu mengimplemetasikan pesan-pesan Al-Qur'an dalam kehidupan maka akan melahirkan pribadi-pribadi yang terampil mengatur strategi, dan mengaplikasikannya dalam tindakan yang efektif dan efisien. Efektif artinya tepat pada sasaran yang dimaksud, sedang efisien adalah hanya dengan cara yang mudah dan waktu yang relatif singkat, namun dengan keberhasilan yang maksimal.

Suyoto sendiri ketika ia berhadapan dengan para politisi, Para Pemborong yang tidak jarang mereka bermain politik uang, maka Suyoto dalam konteks ini mampu berpijak pada prinsip ketaatan, seperti yang tercantum dalam Jalan Sukses Al-Fatihah ke lima, *"Iyyaka Na'budu*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waiiyaka Nast'in". Artinya Manusia apabila dibandingkan dengan makhluk yang lain merupakan ciptaan Allah yang sempurna dan paling baik penciptaannya, namun di sisi Allah manusia merupakan makhluk lemah, dalam hidup di dunia membutuhkan sandaran untuk beribadah dan meminta pertolongan. Manusia akan kuat menjalani hidup apabila memiliki sandaran yang kuat, yang diperoleh dengan mendekatkan diri kepada Allah *al-Qowiyyu* dengan beribadah. Dalam konteks Suyoto dalam berinteraksi dengan para politisi maupun para pemborong, maka kesuksesan Bojonegoro serta para pegawai birokratnya bukan ada di tangan para politisi maupun para pemborong tersebut, melainkan juga karena ada pondasi iman yang selalu bersandar dan meminta pertolongan kepada Allah swt.

Pada tataran internalisasi, momen yang terjadi adalah identifikasi diri dengan dunia sosio kultural. inti teori kebudayaandalam perspektif berger adalah tentang dialektika *self* dan *body* atau diri Dalam hubungannya dengan dunia sosial. sebagai inti teori kebudayaan, kiranya perlu untuk ditegaskan bahwa konsepsi berger tersebut juga memiliki bias lokalitas. Konsepsi yang dibangun atas dasar lokalitas masyarakat barat, yang maju dan rasional juga haruslah direvisi ulang ketika pola dialektika tersebut digunakan untuk melihat masyarakat transisional, seperti masyarakat Bojonegoro khusunya para birokrat Pemerintah Bojonegoro. mereka memiliki pengalaman sosio-kultur tersendiri dalam menjalankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

roda pemererintahan Bojonegoro dan di samping itu mereka juga tidak mudah untuk melawan tujuh setan yang dimilikinya.

Maka dalam tahap internalisasi, "Jalan Sukses Al-Fatihah" sangatlah beranfaat bagi mereka dalam merefleksikan dan sistem kontrol dalam tindakan mereka. Walaupun Al-Fatihah ini bukan sebagai dasar sentral mereka dalam bertindak, namun Al-Fatihah tersebut mampu memberikan nuansa baru, motivasi, semangat dalam mengemban tanggung jawab dan amanat masyarakat. Dengan konsep yang telah diyakini bersama yakni, "Jalan Sukses Al-Fatihah", budaya transparansi anggaran dan melakukan pengajian kebangsaan, mereka mampu mengelola dirinya dengan spirit *smart emotional, dan smart spiritual.* Nantinya, amanat dari masyarakat tersebut bukan dijalankan atas dasar taat kepada aturan birokrasi saja (menggugurkan kewajiban birokrasi saja) namun, dikerjakan dengan memasukkan unsur-unsur *value* dan yang lebih penting adalah dikerjakanatas dasar taat kepada Sang Pencipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dialektika Esternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi

Momen	Proses	Fenomena
Esternalisasi	Penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural	Proses dakwah politik Suyoto meliputi; penyelenggaraan outbon (refleksi diri), pengajian kebangsaan, dialok publik, motivasi di tiap pertemuan, dan pelatihan "Jalan Sukses Al-Fatihah". Berbagai kegiatan tersebut tidak lepas dari pengalaman subjektif Suyoto. Ketika masih muda/masih kuliah, ia sudah aktif dalam organisasi dakwah Muhammadiya termasuk gemar menulis buku, ceramah di berbagai temapat serta pengalaman pribadinya yang pernah menjadi rektor dan DPR.
Objektivasi	Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural	Mereka menyadari betul apa tujuan dan arti pentingnya dengan dilakukan kegiatan-kegitan tersebut. Melalui pembangunan karakter Jalan Sukses Al-Fatihah tersebut, tindakan individu telah diperhitungkan secara matang dan konseptual, sehingga tindakannya itu menjadi tindakan rasional bertujuan. Pembiasaan tindakan melalui pengulangan dan pelembagaan budaya birokrasi melalui berbagai varian tindakan (pelatihan, pengajian, rapat kerja, pertemuan antar pegawai, dialog publik dan berbagai forum lainnya).
Internalisasi	Identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural	Para birokrat Pemerintah Bojonegoro memiliki pengalaman sosio-kultur tersendiri dalam menjalankan roda pemererintahan Bojonegoro dan di samping itu mereka juga tidak mudah untuk melawan tujuh setan (7 karakter/*mindset* buruk). Maka dalam tahap internalisasi, "Jalan Sukses Al-Fatihah" menjadi referensi penting dalam proses refleksi diri maupun sistem kontrol dalam tindakan mereka. Sehingga, secara berkala Al-Fatihah tersebut mampu memberikan nuansa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		baru, motivasi, semangat dan percaya diri dalam menjadi pribadi birokrat yang lebih baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Prinsip Dakwah Politik Suyoto: Unsur *Value* Sebagai Subjek, Objek, dan Subjek-Objek

Good Governance merupakan sebuah konstruksi yang dibangun atas dasar reformasi birokrasi pemerintahan dan penyelenggaraannya melalui proses pelayanan publik dan perbaikan terhadap institusi birokrasi. Namun, dalam perkembagannya sampai dewasa ini, membangun pemerintah yang bersih dan baik belum sepenuhnya dipahami secara spesifik dan substantif. Masih banyak para pemimpin birokrasi yang belum menerapkan konse *good givernance* secara maksimal. Sehingga, tujuan secara subsantantif masih belum dirasakan oleh masyarakat dan segenap elemen birokrat pemerintah.

Dalam bagian ini akan dipaparkan rinsip-prinsip dakwah politikyang dilakukan Suyoto dalam perannya terhadap tujuan membangun birokrasi yang bersih dan baik, sehingga mampu menjawab segala problematika di atas. Berikut ini beberapa prinsip dakwah politik Suyoto, berdasarkan unsur-unsur maupun karakterisik sejumlah fenomena menurut ideal pengamat.

1. Prinsip Adaptif.

   Adaptif berarti kepemimpinan yang cerdas menyesuaikan dirinya dengan perubahan dan keadaan baru. Perubahan selalu membentuk pandangan baru, dan pandangan baru akan mempengaruhi berbagai peristiwa yang sedang berjalan. Dalam hal ini Suyoto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beradaptasi serta mempraktekkan perubahan dengan melengkapkan diri dalam sebuah kepribadian bersama nilai-nilai, tata kelola, sistem dan prosedur.

Kemampuan Suyoto dalam beradaptasi dengan lingkungan birokrasi Bojonegoro dilakukan berdasarkan pengalaman subjektifnya. Pengalaman pernah menjadi santri, menjadi rektor dan DPR paling tidak cukup sebagai modal ia dalam mentranformasi perubahan budaya birokrasi yang lebih baik. Bahasa politik, motivasi, penanaman unsur *value,* membangun karakter birokrat ia kemas dan disampaikan melalui pelatihan, dialog, rapat, mimbar pidato dan sebagainya. Hal itu dapat tercapai juga karena figus Bupati yang memiliki bahasa dan tindakan, yang diinterpretasikan berdasarkan konsep keberagamaan, keberpihakan dan berkeadilan. Dan semua itu telah dikonsep dalam "Jalan Sukses Melalui Al-Fatihah".

2. Prinsip Transparansi

Dalam mewujudkan prinsip transparansi Suyoto bersikap terbuka dan bertanggung jawab untuk mendorong segenap birokrat dan seluruh sumber daya manusia dalam berperan mengamalkan visi-misinya. Agar masyarakat tidak mencurigai dan menganggap bahwa para Birokrat telah membohongi rakyat, makadibuatkanlahsistem transparansi keuangan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mana rakyat dapat ikut langsung mengontrol dan memonitor segala bentuk keuangan manajemen pemerintah. Dan itu semua dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai bagian dari pelaksanaan (akuntabilitas) atau tanggung jawab, baik tanggung jawab kepada sesama maupun kepada Sang Pencipta.

3. Prinsip Solutif.

Salah satu cara yang dilakukan suyoto dalam menerapkan prinsip solutuf adalah menyelenggarakan dialog publik. Orientasinya adalah *pertama,* untuk memberdayakan masyarakat. Artinya, betul-betul problem dan programnya itu mendapat masukan dari masyarakat serta masalahnya nanti langsung mendapat masukan dari Bupati. Kalau ada masalah langsung diberi petunjuk, solusi dan bahkan diberikan fasilitas untuk memecahkan masalah tersebut. *Kedua*, dalam forum dialog publik, para pegawai dan masyarakat langsung tahu permasalahan-permasalahan dan keluhan-keluhan yang muncul di tengah masyarakat yang kemudian program untuk memecahkannya dituangkan dalam agenda program yang segera dikerjakan.

4. Prinsip visionaris

Kepemimpinan visionaris Suyoto dapat dipahami sebagai pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota birokrasi. Selain mengandung unsur kemampuan memberikan makna dan arti, jiwa visionaris adalah sosok yang bisa menjadi agen perubahan yang unggul dan menjadi penentu arah organisasi pemerintahan yang memahami prioritas, menjadi pelatih yang profesional, serta dapat membimbing bawahannya untuk bisa bekerja sesuai harapan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui pelatihan “Jalan Sukses Al-Fatihah”, Suyoto memberikan transformasi nilai-nilai keagamaan maupun kebangsaan serta penyentuhan sisi kultur para birokrat. Sehingga karakter-karakter setan seperti, bekerja instan, bekerja terburu-buru, suka meminta, suka menyalahkan orang lain, sombong, iri dan dengki secara keseluruhan mampu meraka singkirkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

A. Kesimpulan

Dari kajian ini, kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemampuan Suyoto dalam beradaptasi dengan lingkungan birokrasi Bojonegoro dilakukan berdasarkan pengalaman subjektifnya. Bahasa politik, motivasi, ilmu berpolitik dan penanaman unsur *value,* ia kemas dan disampaikan melalui berbagai macam bentuk kegiatan. Langkah awal Suyoto dalam beradaptasi adalah menemukan masalah yang melekat pada diri para birokrat. Pelatihan "Jalan Sukses Melalui Al-fatihah" (JSA) merupakan kunci keberhasilan Suyoto dalam menjawab permasalahan para birokrat. Tumbuh rasa percaya diri, perubahan *mindset* yang sebelumnya salah, dan keinginan berubah untuk menjadi pribadi birokrat yang lebih baik merupakan beberapa hasil yang di dapatkan dari pelatihan tersebut.

   Dalam tataran eksternalisasi kegitan tersebut menjadi instrumen para birokrat dalam berinteraksi dan wadah untuk tranformasi, legitimasi, dan habitualisasi. Sukses tidaknya Suyoto dalam langkah adaptasi di lingkungan birokrasi juga dipengaruhi oleh latar belakang Suyoto sebagai penganut Muhammadiyah. Ia mengikuti ritualitas maupun budaya Nu merupakan wujud pembentukan citra bahwa dirinya seorang "Muhammadiyah-NU". Dengan harapan, masyarakat dan para birokrat yang loyalis NU tidak berkecenderungan untuk mengelompok hanya ke sesama loyalis aliran.

2. Dengan menggunakan metode "JSA" sebagai pembentukan karakter, maka transformasi nilai-nilai yang diupayakan di dalamnya, baik yang berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ucapan maupun tindakan dari Suyoto menjadi sebuah kenyataan obyektif. Secara perlahan dan alamiah, nilai-nilai yang ditanamkan tersebut benar-benar menjadi sebuah kenyataan obyektif. Mereka menyadari betul apa tujuan dan arti pentingnya dengan dilakukan kegiatan-kegitan tersebut. Melalui pembangunan karakter Jalan Sukses Al-Fatihah tersebut, tindakan individu telah diperhitungkan secara matang dan konseptual, sehingga tindakannya itu menjadi tindakan rasional bertujuan. Suyoto menggunakan pelatihan tersebut sebagai sistem kontrol dan pembiasaan keteladanan terhadap para birokrat di dalam interaksi budaya birokrasi pemerintah.

3. JSA dalam tataran internalisasi diyakini sebagai kebenaran obyektif, ia benar-benar menjadi referensi utama pada diri Suyoto maupun para birokrat. JSA sebenarnya ialah produk manusia untuk membangun birokrasi yang *good governance,* sehingga meskipun aturan di dalam JSA itu bersifat mengekang, tidak menutup kemungkinan adanya "pelanggaran" yang dilakukan oleh para birokrat. Dalam konteks membangun birokrasi pemerintahan Bojonegoro yang bersih dan baik, maka konfigurasi Suyoto di tengah dinamika kehidupan sosial birokrasi sangatlah penting sebagai agen perubahan, sebagai keteladanan, serta pengontrol stabilitas kerja para birokrat.

B. Saran dan Rekomendasi

Dari hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti terhadap dakwah politik Bupati Bojonegoro Suyoto dalam membangun birokrat yang bersih dan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagi Bupati Bojonegoro dan segenap Tim Struktur pelatihan "Jalan Sukses Al-Fatihah" agar lebih mengontrol terkait sejauh mana efek yang dirasakan oleh para birokrat usai mengikuti pelatihan tersebut. Karena dengan mengikuti pelatihan hanya satu kali selama beberapa tahun, dapat dipastikan adanya penurunan kualitas moral maupun spiritual birokrat jika kurang diberikan siraman rohani secara intensif yang dikemas dalam pelatihan "JSA" tersebut. Dengan jumlah birokrat yang cukup banyak, secara otomatis pelatihan "JSA" tersebut memakan waktu yang cukup lama pula dalam menjangkau keseluruhan birokrat. Namun, dengan diprogram dan dijadwal secara berkala, dapat dipastikan pelatihan tersebut dapat menjadi rutinitas bagi para birokrat.
2. Bagi Bupati setelah Suyoto, diharapkan temuan inovatif dan kreatif berupa pelatihan "JSA" masih tetap diadakan untuk para birokrat. Termasuk pengajian kebangsaan yang dilakukan Bakesbangpol bersama seluruh OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) yang lain. Namun, Para Panitia pengajian kebangsaan perlulah menjadwal secara efisien, sehingga pengajian dapat terlaksana secara merata dan menyentuh di seluruh masyarakat Bojonegoro.
3. Dengan ditemukannya tujuh karakter yang salah pada diri birokrat atau yang disebut dengan tujuh setan, diharapkan Bupati setelah Suyoto paling tidak dapat meneruskan pelatihan tersebut atau bahkan mencari terobosan baru yang dinilai lebih efektif dan efisien. Guna mewujudkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

generasi birokrat yang berkontribusi penuh dalam terselenggaranya pemerintahan yang *clean and good governance.*

Penelitian ini hanya memfokuskan pada dakwah politik Bupati Bojonegoro Suyoto dalam membangun birokrasi pemerintah yang bersih dan baik, tetapi tidak mengukur tingakat keberhasilannya dalam terwujudnya birokrat yang bersih dan baik. Karena dalam mengetahui tingkat keefektifan seperti pelatihan "JSA" peneliti hanya menggali data dari beberapa informan saja. Oleh karena itu diperlukan penelitian lanjut yang lebih mendalam dengan menganalisis hasil, pengaruh atau keefektivan dakwah politik yang dilakukan Bupati Suyoto maupun Bupati mendatang. Hal ini dapat ditujukan agar dapat mengukur tingkat keberhasilan dakwah politik seorang Bupati dalam konteks membangun para birokrat yang bersih dan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Masykuri. Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi. Jakarta: *Ahkam,* 2013.

Alberthiene, Endah. *Jokowi: Memimpin Kota Menyentuh Jakart.* Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014.

Albrow, Martin. *Birokrasi*. Yogyakarta: TiaraWacana, 2005.

Ali, Aziz, Moh. *Ílmu Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2004.

Anis, Bachtiar, M. Dakwah Kolaboratif: Model Alternatif Komunikasi Islam Kontemporer. Surabaya*: Jurnal Komunikasi Islam*, 2013,

Aziz, Mohd, Zin, Ab. "Strategi Dakwah Dalam Sirah Nabi S.A.W.", Kuala Lumpur, Jabatan Dakwah Dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2012.

Ardial. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Qaradawi, Yusuf, (al). *al-Din wa al-Siyasah: Ta'silu wa Raddu Shubuhat*. Qaherah : Darul Shuruq, 2007.

Aspinal, Edward and Mietzner, Marcus (eds.). *Problem of Democratizations in Indonesia*: *Elections,Institutions, and Society.* Singapure: ISEAS, 2010.

Chalik, Abdul. *Nahdlatul Ulama dan Geo Politik.* Yogyakarta: Impulse, 2011.

Chrouch, Harold. *political Reform in Indonesia After Soeharto.* Singapure: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faqih, Zamany, Achmad. "Dakwah Politik: Telaah Aktivitas Dakwah Politik Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2014-2019," Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2015.

Farhan. Bahasa Dakwah Struktural dan Kultural Da'I dalam Perspektif Dramaturgi. Probolinggo: *At-Turas,* 2014.

Hisyam, Usamah. *Sepanjang Jalan Dakwah Tifatul Sembiring*. Jakarta: Dharmapena Citra Media, 2012.

Hasan, Siswanto, Ali. "Moral Kiai Politik: Studi Relasi Kiai dan Politik di Jawa Timur," Thesis UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2014.

Hayat. Konsep Kepemimpinan dalam Reformasi Birokrasi: Aktualisasi Pemimpin dalam Pelayanan Publik Menuju Good Governance. Universitas Islam Malang: *Jurnal Borneo Administrator*, 2014.

L. Berger, Peter and Lukhmann, Thomas. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES, 1990.

Kamus digital Kamus Besar Bahasa Indonesia offline versi 1.3.

Kamus Digital KBBI Offline versi 1.3.

Kuntjoro, Jakti, Dorojatun. Birokrasi di Dunia Ketiga: Alat Rakyat, Alat Penguasa, atau Penguasa. *Jurnal Prisma,* No.10, 1980.

Kusnawan, Aep. dan Aep Sy, Firdaus. *Manajemen Pelatihan Dakwah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Kusnawan, Aep. *Ilmu Dakwah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 1971.

Latif, HSM, Nasaruddin. *Teori dan Praktik Dakwah Islamiyyah,* Jakarta: Firma Dara, 2010.

Lubis, Satria, Hadi. *Aktivis Dakwah*. Yogyakarta: Pro You, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merc, Jerome, Kirk, Miller L. *Reability and Validity in Qualitative Research*. Baverly Hills: SagePublication, 1986.

Maschan, Moesa, Ali. *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama.* Yogyakarta: LkiS, 2007.

Machfoed, A. *Filsafat Dakwah Ilmu Dakwah dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004.

Marcus, Berliant dan John, Duggan. *Dynamic Politycal Agency with Adverse Selection and Moral Hazard.* Tokyo: The University of Tokyo, 2008.

Masdar, Hilmy. Peran Agama dalam Tranformasi Politi. Surabaya, *Lemlit IAIN SA,* 2002.

Mahmud, Ali, Abdul, Halim. *Dakwah Fardiyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosda Karya, 1989.

Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Rosdakarya, 2007.

Muhammad, bin Muhammad Abu Shuhbah. *al-Sirah al-Nabawiyyah fi Daw' al-Quran wa al-Sunnah*. Damshiq: Dar al-Qalam, 2009.

Mustofa, Kurdi. *Dakwah di Balik Kekuasaan*. Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2012.

Morissan. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa.* Jakarta: Kencana, 2013.

Muhiddin, Asep. *Dakwah Dalam Perspektif al-Qur`an*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Muhyiddin, Asep dan Agus Ahmad Safei. *Metode Pengembangan Dakwah.* Bandung: Pustaka Setia, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MZ, Zainuddin. *Dakwah dan Politik "Da'i Berjuta Umat".* Bandung: Penerbit Mizan, 1997.

Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Nuh, Muhammad. *Dakwah dan Tarbiyah.* Solo: Dar al-Wafa, 2003.

Nuh, Muhammad. *Dakwah Fardiyah Pendekatan Personal dalam Dakwah.* Surakarta: Era Intermedia, 2004.

Pusat Kajian Manajemen Pelayanan: Deputi II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, Standar Pelayanan Publik; Langkah-Langkah Penyusunan, Jakarta*: Lembaga Administrasi Negara,* 2009.

Ritzer, George-s, J. and Goodman Dougla. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Rakhmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Rumzi, Samin. Reformasi Birokrasi. *Jurnal FISIP UMRAH*, V. 2, No. 2, 2011.

Saputra,Wahidin. *Pengantar Ilmu Dakwah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Syamsul, Bachhri Day. Hubungan Politik dan Dakwah. *Mediator*, Vol. 6, No. 1, 2005.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sukayat, Tata. *Quantum Dakwah.* Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Suryanto, Cahyo. *Resonansi Kepemimpinan Transformatif Kang Yoto.* Sleman: Grahatma Semesta, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2008.

Sunarto, A. *Kiai Prostitusi; Pendekatan Dakwah Kiai Khoiron di Lokalisasi Kota Surabaya.* Surabaya: Jaudar Press, 2012.

Suparno, Paul. *Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan.* Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Suparta, Munzier dan Harjani Hefni. *Metode Dakwah.* Jakarta: Kencana, 2003.

Syam, Nur. *Pembangkangan Kaum Tarekat*. Surabaya: LEPKIS, 2005.

Syarifudin, Jurdi. *Pemikiran Politik Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Suharmanto, Ja'far. *Relasi Kuasa: Antara Kiai Khos dan Kiai Kampung: Studi Tentang Efektifitas Komunikasinya dalam Masyarakat Politik.* Surabaya: LP3Esdam, 2008.

Syaeful, Bahar, M. Implikasi konflik Politik Kiai terhdap Disintegrasi Sosial Masyarakat: Studi pada Pemilu 2004 di Kabupaten Bondowoso, Surabaya, *Lemlit IAIN SA,* 2006.

Safi, Rahman, Mubarakfuri, Al, 2004, *al-Rahiq al-Makhtum: Bahth fi al-Sirah al-Nabawiyyah `ala Sahibiha Afdal al-Salah wa al-Salam*, Riyad : Dar al-Salam Lil-Nasr wa al-Tawzi.

Sidi, Ritaudin, M. Kungkungan Patologi Politik Hancurkan Budaya Luhur Bangsa. *Jurnal TAPIs,* 2012.

Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Suprayogo, Imam. dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suny, Ismail. *Menegakkan Prinsip Konstitusi.* tt, Jakarta: Kelompok Studi Indonesia.

Thahadi, Miswan. *Quantum Dakwah dan Tarbiyah.* Jakarta: al-I'tishom, 2008.

Thoha, Miftah. *Pembangunan Organisasi: Proses Diagnose dan Intervensi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

TribunNews.com, Tersangka Korupsi, Rumah Mewah Mantan Bupati Bojonegoro dilelang, Bojonegoro, Nopember 2013.

Yahya, Muhaimin. Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Prisma*, No. 10, 1980.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesi.* Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.

Yusoff, Zulkifli, Mohd dan Naemah, Abd, Rahman Noor. *Biografi Muhammad Bin Abdullah : Perjalanan Hidup Seorang Nabi*. Selangor : PTS Islamika Sdn Bhd, 2011.

Yusuf, A. R. M. Fenomena Kepemimpinan Politik Jokowi. *Jurnal GaneC Swara*. 2014.

Umar, Thoha, Yahya. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Wijaya, 1971.

Zalikha. Dakwah dan Kekuasaan Perspektif Histori. Banda Aceh: *Jurnal Al-Bayan,* 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id